

**PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DAN
CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP
PENGUNGKAPAN SUSTAINABILITY REPORT
(STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN YANG MASUK DALAM
INDEKS KOMPAS100 SELAMA PERIODE 2018-2020)**

Skripsi

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S1**

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh:

**Alviana Kartika Sari
31401700192**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2021**

SKRIPSI

PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGUNGKAPAN SUSTAINABILITY REPORT (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN YANG MASUK DALAM INDEKS KOMPAS100 SELAMA PERIODE 2018-2020)

Disusun Oleh:

Alviana Kartika Sari

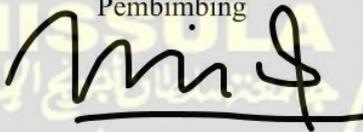
31401700192

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian skripsi

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang,

Pembimbing



Dr. Dra. Winarsih, S.E., M.Si., CSRS., CSRA

NIK. 211415029

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Alviana Kartika Sari

NIM : 31401700192

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan dengan dengan judul **“Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Sustainability Report (Studi Empiris pada Perusahaan yang Masuk Dalam Indeks Kompas100 Selama Periode 2018-2020)”** ini adalah hasil karya saya sendiri, atau bukan plagiat hasil karya tulis orang lain yang digunakan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi lainnya. Skripsi ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini adalah tanggung jawab saya.

Semarang, 31 Desember 2021



Alviana Kartika Sari
NIM. 31401700192

**PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DAN
CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP
PENGUNGKAPAN SUSTAINABILITY REPORT
(STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN YANG MASUK DALAM
INDEKS KOMPAS100 SELAMA PERIODE 2018-2020)**

Disusun Oleh:

**Alviana Kartika Sari
31401700192**

Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal 21 Oktober 2021

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing



Dr. Dra. Winarsih, S.E., M.Si., CSRS., CSRA
NIK. 211415029

Penguji



Dr. Luluk Muhimatul Ifada, SE, MSi, Akt, CSRS
NIK. 210403051

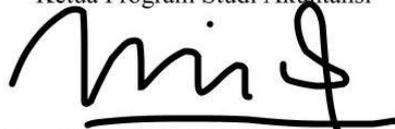
Penguji



Hendri Setiawan, S.E., M.PA
NIK. 211406019

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Tanggal 21 Oktober 2021

Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Dra. Winarsih, S.E., M.Si., CSRS., CSRA
NIK. 211415029



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alviana Kartika Sari
NIM : 31401700192
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan *Corporate Governance*
Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report (Studi Empiris*
Pada Perusahaan Yang Masuk Dalam Indeks Kompas100
Selama Periode 2018-2020)

Menyatakan tidak akan mengikuti dan tidak mempublish paper Skripsi/Tugas Akhir/Tesis/Disertasi saya pada Prosiding KIMU 5 karena :
Sudah/Akan submit pada Jurnal Internasional/Nasional)
Alamat Jurnal : <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIA/>
Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun harap untuk dijadikan maklum.

Mahasiswa,

Alviana Kartika Sari
NIM. 31401700192

Dosen Pembimbing,

Dr. Dra. Winarsih, S.E., M.Si., CSRS., CSRA
NIK. 211415029

Ketua Program Studi,

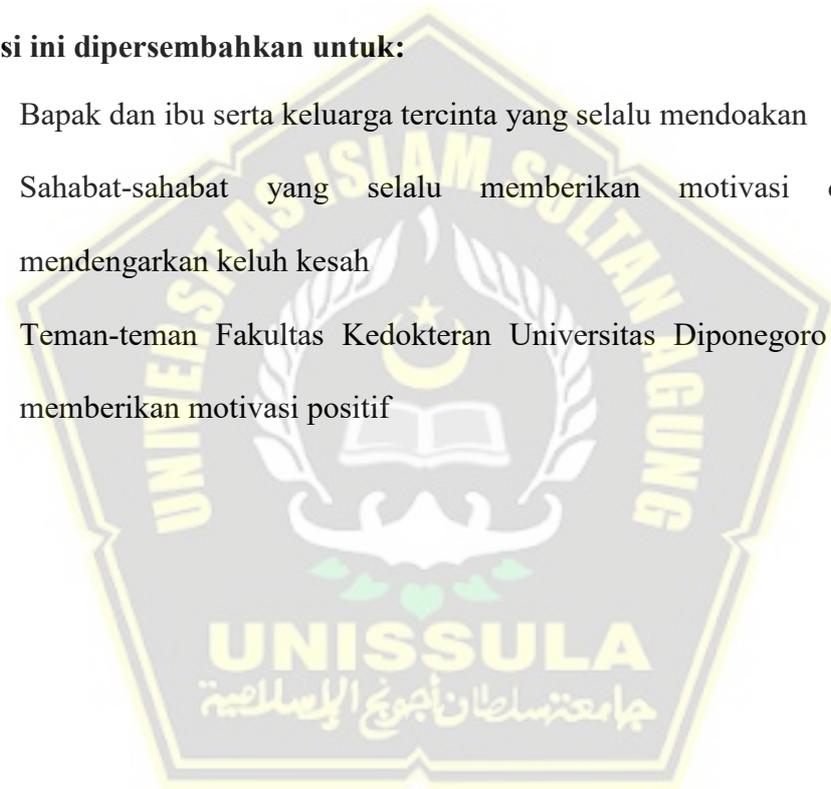
Dr. Dra. Winarsih, S.E., M.Si., CSRS., CSRA
NIK. 211415029

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- Selesaikan apa yang telah kamu mulai
- Janganlah sedih dan berputus asa, Berlarilah mendekati Allah karena *“Kalau dia mendekat sejengkal, maka Aku akan mendekat kepadanya sehasta. Kalau dia mendekat kepada diri-Ku sehasta, maka Aku akan mendekatinya sedepa. Kalau dia mendatangi-Ku dengan berjalan, maka Aku akan mendatangnya dengan berlari.”* (HR bukhari, no. 7405 dan Muslim, no. 2675)

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- ❖ Bapak dan ibu serta keluarga tercinta yang selalu mendoakan
- ❖ Sahabat-sahabat yang selalu memberikan motivasi dan selalu mendengarkan keluh kesah
- ❖ Teman-teman Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro yang telah memberikan motivasi positif



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
INTISARI	vi
BAB I.....	2
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Rumusan Masalah.....	13
1.3. Tujuan Penelitian	13
1.4. Manfaat Penelitian	14
BAB II.....	16
2.1 Landasan Teori.....	16
2.1.1 Teori Stakeholder.....	16
2.1.2 Teori legitimasi (<i>Legitimacy Theory</i>).....	17
2.1.3 Sustainability Report.....	19
2.1.4 Karakteristik Perusahaan.....	23
2.1.5 Tata Kelola Perusahaan (<i>Corporate Governance</i>).....	28
2.2 Penelitian Terdahulu	32
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis	40
2.3.1 Kerangka Pemikiran Teoritis	40
2.4 Pengembangan Hipotesis	42
2.4.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	42
2.4.2 Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	43
2.4.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> 44	
2.4.4 Pengaruh Tipe Industri terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	45
2.4.5 Pengaruh Komite Audit terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> ... 45	
2.4.6 Pengaruh Dewan Direksi terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> 46	
2.4.7 Pengaruh Governance Committe terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> 47	

BAB III	48
3.1. Jenis Penelitian.....	48
3.2. Populasi dan Sampel.....	48
3.2.1. Populasi.....	48
3.2.2. Sampel.....	49
3.3. Sumber dan Jenis Data.....	50
3.4. Metode Pengumpulan Data.....	50
3.5. Variabel dan Indikator	51
3.5.1. Variabel Independen (X).....	51
3.5.2. Variabel Dependen (Y).....	56
3.6. Teknik Analisis Data.....	57
3.6.1. Analisis Statistik Deskriptif.....	57
3.6.2. Uji Asumsi Klasik.....	58
3.6.3. Analisis Regresi	61
3.6.4. Uji Kebaikan Model.....	62
3.6.5. Uji Hipotesis	63
BAB IV	65
4.1 Hasil Penelitian	65
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	65
4.1.2 Deskripsi Variabel.....	68
4.1.3 Uji Asumsi Klasik.....	71
4.1.4 Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	75
4.1.5 Uji Goodness of Fit.....	78
4.1.6 Pengujian Hipotesis.....	80
4.2 Pembahasan.....	84
4.2.1 Pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i>	84
4.2.2 Pengaruh <i>leverage</i> terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i>	85
4.2.3 Pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i>	86
4.2.4 Pengaruh tipe industri terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i>	87
4.2.5 Pengaruh komite audit terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i>	87
4.2.6 Pengaruh dewan direksi terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i>	88

4.2.7	Pengaruh <i>governance committee</i> terhadap pengungkapan sustainability report	89
BAB V		91
5.1	Kesimpulan	91
5.2	Keterbatasan Penulisan	92
5.3	Saran	93
DAFTAR PUSTAKA		94



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	34
Tabel 4.1 Hasil Seleksi Pemilihan Sampel	66
Tabel 4.2 Sampel Perusahaan	67
Tabel 4.3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Sebelum Data Outlier.....	68
Tabel 4.4 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Setelah Data Outlier	69
Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas	72
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinieritas	73
Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi	74
Tabel 4.8 Model Persamaan Regresi.....	76
Tabel 4.9 Hasil Uji F.....	78
Tabel 4.10 Hasil Uji Analisis Koefisien Determinasi	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.11 Hasil Uji t	Error! Bookmark not defined.1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian	42
Gambar 4.1 Uji Normalitas	73
Gambar 4.2 Uji Heterokedastisitas	93



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Populasi dan Sampel Perusahaan Indeks Kompas100	98
Lampiran 2 Hasil Perhitungan Variabel <i>Return On Asset</i> (ROA)	104
Lampiran 3 Hasil Perhitungan Variabel <i>Leverage</i> (<i>DER</i>) Error! Bookmark not defined.	
Lampiran 4 Hasil Perhitungan Variabel <i>Ukuran Perusahaan</i> (<i>Size</i>)	Error!
Bookmark not defined.	
Lampiran 5 Hasil Perhitungan Variabel Tipe Industri Error! Bookmark not defined.	
Lampiran 6 Hasil Perhitungan Variabel Komite Audit Error! Bookmark not defined.	
Lampiran 7 Hasil Perhitungan Variabel Dewan Direksi Error! Bookmark not defined.	
Lampiran 8 Hasil Perhitungan Variabel <i>Governance Committee</i> Error! Bookmark not defined.	
Lampiran 8 Hasil Indikator Pengungkapan Sustainability Report Berdasarkan Standar GRI 2016.....	Error! Bookmark not defined.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris tentang pengaruh karakteristik perusahaan dan corporate governance terhadap pengungkapan sustainability report. Variabel independen dalam penelitian ini adalah profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, tipe industri, dewan direksi, komite audit, governance committee. Variabel dependen yang digunakan adalah pengungkapan sustainability report. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 87 perusahaan yang terdaftar dalam indeks Kompas100. Teknik yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan periode 2018-2020. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode Regresi Linier Berganda dan menggunakan aplikasi SPSS 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report. Sedangkan tipe industri, dewan direksi dan governance committee tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report.

Kata kunci : sustainability report, profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, tipe industri, dewan direksi, komite audit, governance committee

ABSTRACT

This study aims to to examine and provide empirical evidence of the effect of company characteristics and corporate governance on the disclosure of sustainability reports. The independent variables in this study are profitability, leverage, firm size, industry type, board of directors, audit committee, governance committee. The dependent variable used is the disclosure of the sustainability report. The sample used in this study amounted to 87 companies listed in the Kompas100 index. The technique used is purposive sampling technique. This research method is a quantitative method using secondary data obtained from the annual financial statements for the 2018-2020 period. Data analysis was performed using the Multiple Linear Regression method and uses the SPSS 25 application. The results of this study indicate that profitability, leverage, firm size, and audit committee affect the disclosure of sustainability reports. Meanwhile, the type of industry, the board of directors and the governance committee have no effect on the disclosure of the sustainability report.

Keywords: sustainability report, profitability, leverage, firm size, industry type, board of directors, audit committee, governance committee

INTISARI

Laporan keberlanjutan adalah praktik pengukuran, pengungkapan, dan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal, tentang kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan keberlanjutan. Laporan keberlanjutan merupakan praktik pelaporan organisasi secara transparan mengenai dampak ekonomi, lingkungan, dan/atau sosialnya, dan karena itu juga termasuk kontribusinya positif atau negatif terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Hipotesis penelitian ini yaitu, 1) Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*. 2) Leverage berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*. 3) Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*. 4) Tipe industri berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *sustainability report*. 5) Komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*. 6) Dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*. 7) *Governance committee* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Populasi penelitian ini yaitu perusahaan yang terdaftar dalam Indeks Kompas100 periode tahun 2018-2020. Diperoleh 87 data sampel dengan metode *purposive sampling*. Analisis data dilakukan dengan metode Regresi Linier Berganda. Berdasarkan uji hipotesis disimpulkan bahwa profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report. Sedangkan tipe industri, dewan direksi dan *governance committee* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi yang berjudul **“Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Sustainability Report (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Masuk Dalam Indeks Kompas100 Selama Periode 2018-2020)”** yang disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat sarjana S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa dukungan, bimbingan, semangat, motivasi serta doa dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis ucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Ibu Hj. Olivia Fachrunnisa, SE, M.Si, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Ibu Dr. Winarsih, SE, M.Si Selaku Ketua Program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus dosen pembimbing yang telah sabar dan bersedia meluangkan waktu dan tenaga, memberikan motivasi, saran, inspirasi serta kesempatan untuk berdiskusi kepada penulis hingga terselesainya skripsi ini.
3. Dosen-dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
4. Karyawan dan Staf Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Agung Semarang yang telah memberikan sarana dan informasi perkuliahan selama tahun ajaran.
5. Kepada kedua orang tua, keluarga dan sahabat yang telah mendukung dan memberikan saran, motivasi, semangat serta doa.
6. Kepada teman-teman seperjuangan yang telah kebersamai selama menempuh bangku kuliah program transfer S1 Akuntansi Universitas Sultan Agung Semarang.
7. Kepada teman-teman Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang yang telah mendukung dan membantu pekerjaan kantor selama proses pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Semarang, 30 Desember 2021

Penulis

Alviana Kartika Sari

NIM. 31401700192



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tujuan perusahaan secara umum adalah untuk memperoleh laba dengan cara memenuhi kebutuhan konsumen. Dengan memperoleh laba perusahaan dapat mengembangkan dan mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Kelangsungan usaha atau eksistensi perusahaan sangat dipengaruhi oleh berbagai pihak/ pemangku kepentingan mulai dari pemegang saham, pemerintah, karyawan bahkan masyarakat umum.

Perusahaan dan masyarakat memiliki hubungan saling terikat yang mana perusahaan sebagai produsen membutuhkan masyarakat sebagai konsumen dan masyarakat membutuhkan perusahaan sebagai sumber pendapatan karena menyediakan lapangan pekerjaan. Hal tersebut memberikan dampak positif karena dapat meningkatkan perolehan laba perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun untuk meraih keuntungan yang maksimal banyak perusahaan melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam dan sumber daya manusia secara berlebihan. Hal tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap sosial dan lingkungan apabila tidak memperhatikan tata kelola yang baik dan keberlanjutannya di masa depan. Pencemaran lingkungan, polusi, kerusakan alam berupa banjir, tanah longsor, kebakaran hutan yang menyebabkan korban jiwa. Bahkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti tambang

dan minyak bumi akan habis jumlahnya dan kesejahteraan masyarakat juga tidak dapat tercapai.

Kasus semburan lumpur panas yang menenggelamkan beberapa wilayah pemukiman disekitar lokasi penambangan gas milik Lapindo Brantas Inc. di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur akibat kelalaian dan tidak memperhatikan standar operasional pengeboran telah menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat berupa kehilangan hak ekonomi, sosial, budaya dan politik (dikutip dari <https://majalah.tempo.co/> pada 18 Juni 2019). Kasus lain yaitu jatuhnya korban jiwa akibat lubang bekas tambang PT. Insani Bara Perkasa yang tidak direklamasi (dikutip dari <https://www.viva.co.id/> pada 18 Juni 2019). Kemampuan daya dukung lingkungan semakin rendah menyusul banyaknya izin eksploitasi yang telah diberikan kepada pihak pengusaha tambang dan tidak adanya jaminan kesejahteraan masyarakat di sekitar area tambang. Kasus lain adalah demo menolak pengembangan PLTU batubara di Celukan Bawang, Bali karena mencemari laut, merusak lingkungan dan polusi udara yang menyebabkan masalah kesehatan (dikutip dari <https://baliexpress.jawapos.com/> pada 18 Juni 2019). Bebarapa kasus tersebut menunjukkan bahwa perusahaan masih kurang peduli terhadap lingkungan dan tanggung jawab sosial masyarakat.

Namun masyarakat sekarang lebih kritis dengan hal yang terjadi di sekitar mereka dan menuntut perusahaan untuk lebih peduli terhadap kelangsungan sosial dan lingkungan. Sehingga pandangan bahwa tujuan perusahaan yang awalnya berorientasi pada perolehan laba saja semakin bergeser menjadi untuk menyeimbangkan antara memperoleh keuntungan dengan

perbaikan lingkungan dan sosial masyarakat yang secara tidak langsung terdampak oleh kegiatan usaha. Perusahaan tidak hanya akan memberikan pertanggungjawaban dari aspek ekonomi saja, tetapi juga pertanggungjawaban dari aspek sosial dan aspek lingkungan yang biasa disebut *Tripel Bottom Line* atau konsep 3P yang diperkenalkan oleh Elkington (1988), yaitu *People, Planet and Profit*. Konsep tersebut dimaksudkan agar kegiatan usaha tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitar dengan cara mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial dan lingkungan. Informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diungkapkan melalui *sustainability report* atau laporan berkelanjutan.

Laporan keberlanjutan adalah praktik pelaporan organisasi secara transparan mengenai dampak ekonomi, lingkungan, dan/atau sosialnya, dan karena itu juga termasuk kontribusinya positif atau negatif-terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (GRI, 2016). Laporan keberlanjutan adalah komunikasi dalam hal ekonomi, lingkungan serta kebijakan sosial, akibat dan performa dari sebuah organisasi serta produknya dalam konteks pengembangan yang berkelanjutan (dikutip dari <http://sra.ncsr-id.org> pada 18 Juni 2019).

Perusahaan dapat mengungkapkan laporan tambahan seperti laporan tentang lingkungan hidup dan laporan nilai tambah khususnya bagi perusahaan yang menganggap jika faktor-faktor lingkungan hidup dan pegawai memegang peranan penting atas laporan tersebut, (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1). Dalam Undang-undang No. 40 tahun 2007 pasal 74 tentang

Perseroan Terbatas (PT) disebutkan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kewajiban Perseroan tersebut harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Perseroan yang tidak menjalankan kewajiban ini akan dikenakan sanksi. Kemudian Pemerintah menerbitkan PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas sebagai petunjuk teknis dari kewajiban pelaporan keberlanjutan tersebut. Berdasarkan Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM LK) No. KEP-431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik disebutkan bahwa, emiten atau perusahaan publik dapat mengungkapkan informasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan meliputi kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan pada laporan tahunan atau tersendiri yang disampaikan bersamaan dengan laporan tahunan kepada BAPEPAM LK, seperti laporan keberlanjutan (*sustainability report*) atau laporan tanggung jawab social perusahaan (*corporate social responsibility report*).

Sedangkan untuk perusahaan yang kegiatan usahanya tidak berkaitan dengan sumber daya alam, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor: 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik juga mengeluarkan aturan yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan

pembuatan sustainability report untuk melengkapi laporan tahunan perusahaan (annual report) sebagai bagian yang tidak terpisah.

Penyusunan laporan keberlanjutan berpedoman pada standar *Global Reporting Initiative* (GRI). GRI adalah lembaga organisasi internasional yang berfokus pada pencapaian transparansi mengenai pengungkapan standar dan pedoman pelaporan keberlanjutan. Sebagaimana disebutkan dalam GRI, laporan keberlanjutan (sustainability report) adalah praktik pengukuran, pengungkapan, dan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal, tentang kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan keberlanjutan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya yang telah menjadi komitmen nasional dan global (dikutip dari <http://sdgs.bappenas.go.id/> pada 3 November 2020).

Pengungkapan sustainability report di Indonesia saat ini masih sebatas bersifat sukarela (voluntary). walaupun masih bersifat sukarela, sudah terdapat hampir 9% perusahaan yang telah listing di Bursa Efek Jakarta (BEI) telah menerbitkan laporan keberlanjutan. Penerbitan laporan keberlanjutan yang ada di Indonesia saat ini, hampir sebagian besar berdasarkan standar pengungkapan yang ada dalam Global Reporting Index (GRI). Sampai dengan akhir tahun 2016, dapat

dilihat bahwa sebanyak 49 perusahaan listing BEI telah menerbitkan laporan keberlanjutan (dikutip dari <https://www.ojk.go.id/> pada 18 Juni 2019). Data terbaru dari GRI dan BEI menunjukkan bahwa dari total 629 Perusahaan Tercatat per 23 April 2019, hanya sebanyak seratus sepuluh laporan keberlanjutan yang sudah dirilis (dikutip dari <https://www.liputan6.com/> pada 3 November 2020).

Azwir Nasir et al (2014) menemukan adanya pengaruh profitabilitas dan *governance committee* terhadap pengungkapan *sustainability report*. Sedangkan hasil penelitian Ria Aniktia dan Muhammad Khafid (2015) menemukan bahwa profitabilitas dan *governance committee* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Disamping itu Ria Aniktia dan Muhammad Khafid (2015) menemukan adanya pengaruh jumlah rapat komite audit dan *leverage* terhadap pengungkapan *sustainability report*. Berbeda dengan penelitian Idah (2013) yang menemukan bahwa jumlah rapat komite audit dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Azwir Nasir et al (2014) juga menemukan bahwa tidak adanya pengaruh dewan direksi dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Berbeda dengan Idah (2013) yang menemukan hubungan positif dewan direksi dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Karakteristik perusahaan merupakan ciri khas yang melekat pada suatu perusahaan dalam berbagai faktor antara lain tipe industri, ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage dan lain sebagainya. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan seluruh sumber daya yang dimiliki berupa pendapatan terkait penjualan, asset dan ekuitas. Profitabilitas perusahaan

merupakan indikator pengelolaan manajemen yang baik, sehingga manajemen akan cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi ketika ada peningkatan profitabilitas (Nasir et al, 2014). *Return on Asset* (ROA) merupakan salah satu rasio yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asset-aset yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Berdasarkan penelitian Nasir et al (2014) ROA berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan. Hal ini sejalan dengan dengan penelitian Adila dan Syofyan (2016) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Namun dalam penelitian Doktoralina et al (2018) hasil berbeda diungkapkan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Leverage adalah kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset dari dana hutang untuk menciptakan hasil pengembalian (return) yang baik dan mengurangi biaya. *Leverage* dapat dihitung dengan membandingkan total hutang dengan total ekuitas perusahaan. Menurut penelitian Ria Aniktia dan Muhammad (2015), *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. *Leverage* merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya baik jangka pendek maupun jangka panjang jika suatu perusahaan dilikuidasi (Hadiningsih dalam Suryono, 2011). Untuk mendapatkan dukungan dari para kreditor maka perusahaan melaporkan laba yang lebih tinggi, untuk menunjukkan kondisi keuangan yang baik sehingga dapat meyakinkan kreditor untuk mendapatkan pinjaman. Searah dengan penelitian Azwir Nasir et al (2014) yang menyatakan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan

sustainability report. Akan tetapi hal tersebut berbeda dengan hasil penelitian Idah (2013) dan Doktoralina et al (2018) yang mengemukakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Ukuran perusahaan menurut Basyaib (2017) merupakan ukuran dimana perusahaan bisa dibedakan besar kecilnya berdasarkan total modal, total aktiva, dan pendapatan. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan nilai *log of total asset* yang dimiliki oleh perusahaan. Idah (2013) menyatakan bahwa semakin besar suatu perusahaan, maka akan semakin mendapat perhatian dari para *stakeholder*. Dalam hal tersebut, perusahaan berupaya untuk mendapatkan legitimasi dari para *stakeholder* dengan mengungkapkan informasi yang lebih, baik bersiat wajib maupun sukarela. Penelitian tersebut konsisten dengan hasil penelitian Candri Puspita Marwati dan Yulianti (2015) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Berbeda dengan hasil penelitian Wanda Adila dan Erizal Syofyan (2016) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Tipe Industri membagi perusahaan berdasarkan lingkup operasi, risiko perusahaan serta kemampuan dalam menghadapi tantangan bisnis. Perusahaan *high profile* tidak perlu banyak melakukan pinjaman atau mencari sumber dana untuk kegiatan operasi perusahaan karena kemampuan pemenuhan kebutuhan dana yang baik dan adanya sumber daya yang luas. Sedangkan perusahaan *low profile* memiliki kebutuhan dana yang cukup tinggi tetapi kemampuan pemenuhan dan sumber daya yang dimiliki terbatas, sehingga perusahaan *low profile* harus

melakukan peminjaman dana untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Secara umum perusahaan *high profile* merupakan perusahaan yang memperoleh perhatian dari masyarakat karena aktivitas operasinya memiliki potensi untuk bersinggungan dengan kepentingan luas dibandingkan dengan perusahaan *low profile*. Namun baik perusahaan *high profile* maupun *low profile* keduanya akan mengupayakan legitimasi dan mendapatkan dukungan dengan mengungkapkan lebih banyak informasi perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Anggiyani dan Yanto (2016) dan Ihsan (2019) yang menunjukkan bahwa tipe industri tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Namun hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian Anindita, M, (2015) yang menyatakan bahwa tipe industri berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Good Corporate Governance merupakan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang. Salah satu indikator tata kelola perusahaan yang baik dapat dilihat dari Komite Audit yang merupakan komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab terhadap Dewan Komisaris yang bertugas menjalankan fungsi pengawasan terhadap Direksi. Komite Audit wajib melaporkan aktivitasnya secara rutin (berkala) kepada Dewan komisaris. Koordinasi komite audit akan semakin baik seiring dengan frekuensi rapat pertemuan yang dilakukan, sehingga pengawasan terhadap manajemen dapat dilakukan lebih efektif dan meningkatkan pengungkapan informasi perusahaan ke publik. Hal tersebut dapat mendukung

terwujudnya *good corporate governance*. Aniktia dan Muhammad (2015) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Namun berbeda dengan hasil penelitian Adila dan Syofyan (2016) menyatakan dalam penelitiannya bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Sehingga jumlah rapat tidak memiliki peran terhadap pengungkapan *sustainability report*. Penelitian Azwir Nasir et al (2014) menunjukkan hasil yang konsisten yaitu komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Dewan Direksi merupakan sekelompok individu yang dipilih oleh pemegang saham perusahaan untuk mewakili kepentingan perusahaan. Dewan direksi biasanya melakukan pertemuan secara berkala untuk menetapkan kebijakan bagi manajemen dan pengawasan perusahaan. Menurut Idah (2013) dewan direksi memiliki peran positif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Hal tersebut mengindikasikan bahwa frekuensi rapat antara anggota dewan direksi menunjukkan semakin seringnya komunikasi serta koordinasi antara anggota sehingga mempermudah dalam mewujudkan *good corporate governance*. Akan tetapi berbeda dengan hasil penelitian Ni'matul Hasanah et al (2015) dan Nasir et al (2014) yang menyatakan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Governance committee merupakan komite yang bertugas mengawasi proses pencalonan komisaris dan direksi, menyeleksi para kandidat yang akan dicalonkan dan mengusulkan kebijakan-kebijakan prosedur-prosedur tentang struktur dewan dan proses nominasinya. *Governance committee* dapat

merekomendasikan untuk melakukan tanggung jawab social melalui *sustainability report* (A Nasir et al, 2014). Hal tersebut menunjukkan keseriusan tanggung jawab perusahaan untuk kestabilan jangka panjang. Sesuai hasil penelitian A Nasir et al (2014) dan Idah (2013) yang menyatakan bahwa *Governance committee* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Namun berbeda dengan hasil penelitian Andri Pratama dan Agung Yulianto (2015) yang mengungkapkan bahwa *Governance committee* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Beberapa penelitian diatas memberikan hasil yang konsisten, namun beberapa diantaranya memberikan hasil yang belum konsisten mengenai beberapa variabel independen yang mempengaruhi pengungkapan *sustainability report*. Adanya beberapa hasil penelitian yang berbeda pada penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali guna menguji ulang mengenai pengaruh karakteristik perusahaan dan *corporate governance* terhadap pengungkapan *sustainability report*. Penelitian ini mengacu pada penelitian W Adila dan E Syofyan (2016) dengan menambah dan mengganti beberapa variabel independen yang berpengaruh. Selain itu perbedaan penelitian ini dengan penelitian W Adila dan E Syofyan (2016) yaitu pada penelitian ini menggunakan data perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) termasuk ke dalam indeks Kompas 100. Periode pengamatan yang diambil dalam penelitian ini yaitu tahun 2018-2020. Sedangkan penelitian W Adila dan E Syofyan (2016) menggunakan data perusahaan yang terdaftar di BEI periode tahun 2013-2015.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian terdahulu, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Adakah pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *sustainability report*?
- 2) Adakah pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan *sustainability report*?
- 3) Adakah pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *sustainability report*?
- 4) Adakah pengaruh tipe industri terhadap pengungkapan *sustainability report*?
- 5) Adakah pengaruh komite audit terhadap pengungkapan *sustainability report*?
- 6) Adakah pengaruh dewan direksi terhadap pengungkapan *sustainability report*?
- 7) Adakah pengaruh *governance committee* terhadap pengungkapan *sustainability report*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *sustainability report*.
- 2) Untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan *sustainability report*.
- 3) Untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *sustainability report*.

- 4) Untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh tipe industri terhadap pengungkapan *sustainability report*.
- 5) Untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh dewan direksi terhadap pengungkapan *sustainability report*.
- 6) Untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh komite audit terhadap pengungkapan *sustainability report*.
- 7) Untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh *governance committee* terhadap pengungkapan *sustainability report*.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak. Manfaat tersebut dibagi menjadi dua aspek, yaitu sebagai berikut:

- 1) Aspek Teoritis (Keilmuan)

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya bidang akuntansi mengenai pengaruh karakteristik perusahaan dan *corporate governance* terhadap pengungkapan *sustainability report*. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian yang akan datang.

- 2) Aspek Praktis (Guna Laksana)

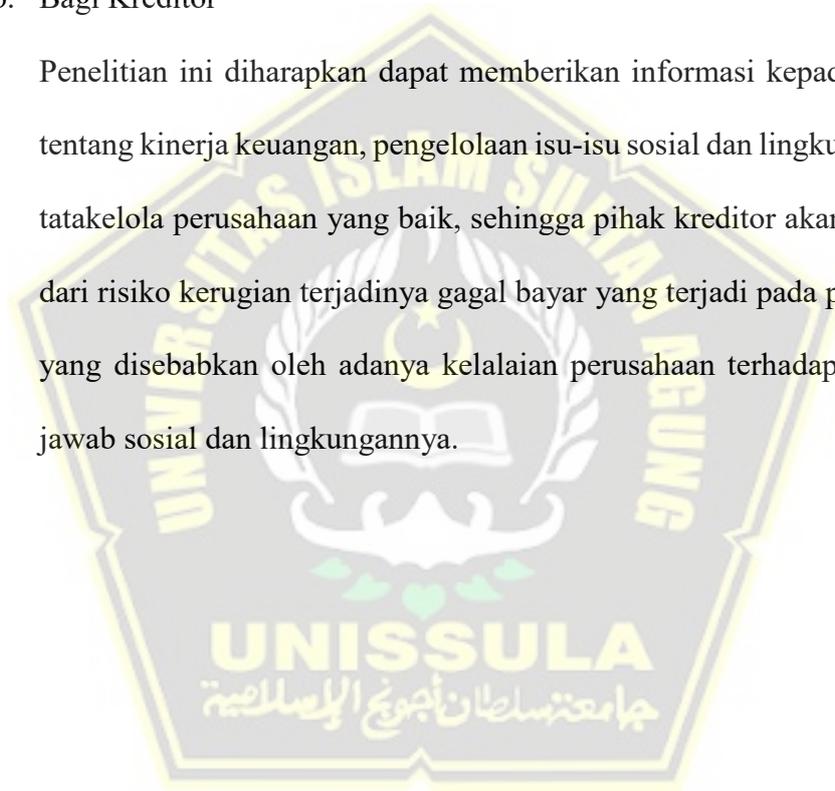
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, diantaranya:

- a. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada investor dalam menilai reputasi atau citra suatu perusahaan dalam wujud tanggung jawab dan kepedulian perusahaan terhadap sosial dan lingkungannya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Karena hal tersebut mempengaruhi kepercayaan masyarakat, yang akan mendorong pergerakan harga dan volume penjualan saham perusahaan.

b. Bagi Kreditor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada kreditor tentang kinerja keuangan, pengelolaan isu-isu sosial dan lingkungan serta tatakelola perusahaan yang baik, sehingga pihak kreditor akan terhindar dari risiko kerugian terjadinya gagal bayar yang terjadi pada perusahaan yang disebabkan oleh adanya kelalaian perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungannya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Stakeholder

Stakeholder adalah pihak pemangku kepentingan atau beberapa kelompok orang yang memiliki kepentingan di dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan usaha secara keseluruhan. *Stakeholder* dikelompokkan menjadi dua yaitu *Stakeholder* internal dan *Stakeholder* eksternal. *Stakeholder* internal meliputi organisasi itu sendiri, pemegang saham, pemilik bisnis, dan para karyawan. Sedangkan *Stakeholder* eksternal meliputi konsumen, *supplier*, pesaing, investor, pemerintah, sebuah komunitas lokal di suatu daerah, media, masyarakat secara umum dan pihak lainnya.

Teori *stakeholder* adalah setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi (Freeman dan McVea , 2001). Ghozali dan Chariri (2007) menyatakan bahwa dalam teori *stakeholder* perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholder*. Keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan para stakeholder kepada perusahaan tersebut. Sehingga setiap individu atau kelompok yang telah memberikan kontribusi terhadap nilai suatu perusahaan memiliki hak moral untuk menerima imbalan atau *rewards* dari perusahaan dan

menjadi kewajiban bagi manajemen untuk memenuhi apa yang menjadi hak para *stakeholder*. Hal tersebut menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggung jawab atas kegiatan usahanya.

Perusahaan mampu berkembang dengan baik karena dukungan dari para *stakeholder*. Untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan dan hubungan dengan *stakeholder*, perusahaan akan memberikan berbagai informasi yang terintegritasi terkait aktivitas perusahaan yang diperlukan oleh para *stakeholder* dalam pengambilan keputusan. Pengungkapan informasi dapat dibagi menjadi dua yaitu pengungkapan informasi yang sifatnya wajib (*mandatory*) dan sukarela (*voluntary*). Pengungkapan informasi yang bersifat wajib bagi perusahaan adalah laporan keuangan yang dapat memberikan informasi kondisi ekonomi perusahaan. Salah satu bentuk pengungkapan sukarela informasi perusahaan adalah laporan keberlanjutan atau *sustainability report*. Melalui pengungkapan *sustainability report* perusahaan dapat memberikan informasi yang cukup lengkap terkait kegiatan perusahaan dan pengaruhnya terhadap kondisi lingkungan dan sosial masyarakat.

2.1.2 Teori legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Legitimasi merupakan suatu pengakuan terhadap legalitas sesuatu. Teori legitimasi menjelaskan tentang pengakuan masyarakat. Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi merupakan bagian dari masyarakat sehingga harus memperhatikan norma-norma sosial kemasyarakatan karena kesesuaian dengan norma sosial dapat membuat perusahaan semakin diakui. Ghozali dan Chariri

(2007) menyatakan bahwa hal yang mendasari teori legitimasi adalah kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Legitimasi sangat penting bagi perusahaan karena keberadaan perusahaan dalam lingkungan sosial yang mengharuskan terjadi interaksi dengan masyarakat dan lingkungan sekitar.

Aktivitas yang dijalankan perusahaan harus mengandung nilai-nilai sosial yang selaras dengan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Apabila terjadi ketidakselarasan antara nilai-nilai perusahaan dengan nilai-nilai sosial di masyarakat, maka legitimasi perusahaan dapat terancam dan dapat mempengaruhi kelangsungan perusahaan. Perbedaan yang terjadi diantara nilai-nilai tersebut disebut sebagai *legitimacy gap* yang dapat menyebabkan hilangnya legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Menurut Warticl dan Mahon (1994) dalam Ghozali dan Chariri (2007), *legitimacy gap* dapat terjadi karena tiga alasan:

- 1) Ada perubahan dalam kinerja perusahaan tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan tidak berubah.
- 2) Kinerja perusahaan tidak berubah tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan telah berubah.
- 3) Kinerja perusahaan dan harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan berubah atau tidak ada kesesuaian nilai antara keduanya.

Untuk mengurangi terjadinya *legitimacy gap* maka perusahaan harus mengidentifikasi aktivitas yang berada dalam kendalinya dan mengidentifikasi

public yang memiliki kekuatan sehingga mampu memberikan legitimasi kepada perusahaan (Neu et al. (1998) dalam Ghozali dan Chariri (2007).

Perusahaan dapat mengupayakan legitimasi dari masyarakat dengan mengungkapkan informasi yang berhubungan dengan organisasi sosial, komunitas masyarakat dan lingkungan. Salah satu caranya dengan mengungkapkan informasi tersebut ke dalam laporan keberlanjutan atau *sustainability report* sebagai perwujudan akuntabilitas perusahaan terhadap publik untuk menjelaskan dampak sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan baik dalam aspek positif maupun negatif.

2.1.3 Sustainability Report

Sustainability report atau laporan keberlanjutan merupakan bentuk laporan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mengungkapkan atau mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai kinerja lingkungan, sosial dan tata kelola yang baik (LST) secara akuntabel.

Menurut Elkington (1997), dalam laporan keberlanjutan tidak hanya menyajikan informasi kinerja keuangan tetapi juga informasi nonkeuangan yang terdiri dari informasi aktivitas sosial dan lingkungan yang memungkinkan perusahaan bisa bertumbuh secara berkesinambungan (*sustainable performance*). Sehingga selain mengejar keuntungan (*profit*), perusahaan juga harus terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*), dan turut berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*). Ketiga hal ini sering disebut *Tripel*

Bottom Line atau Konsep 3P yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan saling mempengaruhi.

Menurut *Global Reporting Initiative* (GRI), laporan keberlanjutan adalah praktik pengukuran, pengungkapan, dan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal, tentang kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan keberlanjutan. Laporan keberlanjutan merupakan praktik pelaporan organisasi secara transparan mengenai dampak ekonomi, lingkungan, dan/atau sosialnya, dan karena itu juga termasuk kontribusinya positif atau negatif terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya (dikutip dari <http://sdgs.bappenas.go.id/> pada 3 November 2020). TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya mensejahterakan masyarakat yang mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi

yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Sustainability report memberikan banyak manfaat bagi perusahaan. Menurut *World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) (dikutip dari Suryono dan Prastiwi, 2011) memberikan manfaat sebagai berikut.

- 1) Memberikan informasi kepada *stakeholder* (pemegang saham, anggota komunitas lokal, pemerintah) sehingga meningkatkan prospek perusahaan dan membantu mewujudkan transparansi.
- 2) Membantu membangun reputasi sebagai alat yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan brand value, market share, dan customer loyalty jangka panjang.
- 3) Menjadi cerminan bagaimana perusahaan mengelola risikonya.
- 4) Digunakan sebagai stimulasi leadership thinking dan performance yang didukung dengan semangat kompetisi.
- 5) Mengembangkan dan memfasilitasi pengimplementasian dari sistem manajemen yang lebih baik dalam mengelola dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial.
- 6) Mencerminkan secara langsung kemampuan dan kesiapan perusahaan untuk memenuhi keinginan pemegang saham untuk jangka panjang.
- 7) Membantu membangun ketertarikan para pemegang saham dengan visi jangka panjang dan membantu mendemonstrasikan bagaimana

meningkatkan nilai perusahaan yang terkait dengan isu sosial dan lingkungan.

Pengungkapan *sustainability report* di Indonesia memang masih bersifat sukarela, namun Pemerintah dalam UU No. 40 tahun 2007 pasal 74 telah mewajibkan perseroan yang menjalankan kegiatan usaha dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kewajiban Perseroan tersebut harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Perseroan yang tidak menjalankan kewajiban tersebut akan dikenakan sanksi. Kemudian Pemerintah menerbitkan PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas sebagai petunjuk teknis dari kewajiban pelaporan keberlanjutan tersebut. Berdasarkan Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM LK) No. KEP-431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik disebutkan bahwa, emiten atau perusahaan publik dapat mengungkapkan informasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan meliputi kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan pada laporan tahunan atau tersendiri yang disampaikan bersamaan dengan laporan tahunan kepada BAPEPAM LK, seperti laporan keberlanjutan (*sustainability report*) atau laporan tanggung jawab social perusahaan (*corporate social responsibility report*).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan

Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik juga mengeluarkan aturan yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan pembuatan sustainability report untuk melengkapi laporan tahunan perusahaan (*annual report*) sebagai bagian yang tidak terpisah.

Penyusunan laporan keberlanjutan berpedoman pada standar *Global Reporting Initiative* (GRI). GRI adalah lembaga organisasi internasional yang berfokus pada pencapaian transparansi mengenai pengungkapan standar dan pedoman pelaporan keberlanjutan. *Sustainability report* dapat dinilai dari seberapa banyak indikator yang diungkapkan dalam laporan tersebut. Semakin banyak indikator yang diungkapkan maka semakin tinggi kualitas dari *sustainability report* tersebut. Standar penyusunan *sustainability report* telah diperbaiki secara kontinu pada tahun 2016 dan efektif per tanggal 1 Juli 2018 dalam *GRI Standards*. Komponen dalam *GRI Standards* terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Pengungkapan Standar Universal
 1. GRI 101 Landasan
 2. GRI 102 Pengungkapan Topik Umum
 3. GRI 103 Pendekatan Manajemen
- 2) Pengungkapan Topik Spesifik
 1. GRI 200 Indikator Ekonomi
 2. GRI 300 Indikator Lingkungan
 3. GRI 400 Indikator Sosial

2.1.4 Karakteristik Perusahaan

Karakteristik perusahaan merupakan ciri khas yang melekat pada suatu perusahaan dalam berbagai faktor antara lain profitabilitas, *leverage*, tipe industri, ukuran perusahaan, dan lain sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi karakteristik perusahaan tersebut dapat memberikan informasi terkait kondisi suatu perusahaan pada periode tertentu, sehingga dapat dijadikan pertimbangan bagi para *stakeholder* dalam pengambilan keputusan.

2.1.4.1 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan seluruh sumber daya yang dimiliki berupa pendapatan terkait penjualan, asset dan ekuitas. Profitabilitas perusahaan merupakan indikator pengelolaan manajemen yang baik, sehingga manajemen akan cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi ketika ada peningkatan profitabilitas (Azwir Nasir et al, 2014).

Return on Asset (ROA) merupakan salah satu rasio yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asset-aset yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. ROA adalah rasio keuangan perusahaan yang terkait dengan profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan atau laba atas tingkat pendapatan, asset dan modal saham tertentu.

ROA menjadi salah satu hal penting yang diperhatikan oleh para *stakeholder* karena berhubungan dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Apabila kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba

rendah maka akan menurunkan tingkat kepercayaan *stakeholder* terhadap perusahaan. Sebaliknya, apabila nilai ROA semakin tinggi dapat meningkatkan kepercayaan para *stakeholder* sehingga dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan.

Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung untuk mengungkapkan lebih banyak informasi dibandingkan perusahaan lain dengan menunjukan kepada publik dan *stakeholder* agar mendapatkan pengakuan. Semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, maka menunjukan kinerja keuangan yang semakin baik. Sehingga perusahaan memiliki kemampuan yang lebih untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

2.1.4.2 Leverage

Leverage adalah kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset dari dana hutang untuk menciptakan hasil pengembalian (return) yang baik dan mengurangi biaya. *Leverage* dapat dihitung dengan membandingkan total hutang dengan total ekuitas perusahaan. Menurut penelitian Ria Aniktia dan Muhammad (2015) *Leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report. *Leverage* merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya baik jangka pendek maupun jangka panjang jika suatu perusahaan dilikuidasi (Hadiningsih dalam Suryono dan Prastiwi, 2011). Jadi, perusahaan dengan rasio *leverage* tinggi akan berusaha untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan dari *stakeholder* melalui pengungkapan *sustainability report*

Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi sangat bergantung pada kepercayaan dan dukungan dari para kreditor. Untuk tetap mendapatkan dukungan dari para kreditor perusahaan harus melaporkan laba yang lebih tinggi, sehingga menunjukkan kondisi keuangan perusahaan yang baik dan meyakinkan untuk memperoleh pinjaman dari kreditor.

2.1.4.3 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan ukuran dimana perusahaan bisa dibedakan besar kecilnya berdasarkan total ekuitas, total aset, dan pendapatan. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan nilai *log of total asset* yang dimiliki oleh perusahaan. Idah (2013) menyatakan bahwa semakin besar suatu perusahaan, maka akan semakin mendapat perhatian dari para stakeholder. Dalam hal tersebut, perusahaan berupaya untuk mendapatkan legitimasi dari para *stakeholder* dengan mengungkapkan informasi yang lebih, baik bersiat wajib maupun sukarela. Legitimasi dibutuhkan perusahaan untuk menyelaraskan nilai-nilai sosial dari kegiatannya dengan norma perilaku yang ada dalam masyarakat (Suryono dan Prastiwi, 2011). Secara umum perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan untuk melakukan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan. Dengan mengungkapkan tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan dalam *sustainability report*, maka perusahaan dalam jangka panjang dapat menghindari biaya yang sangat besar akibat tuntutan dari masyarakat. Semakin besar perusahaan semakin banyak mengungkapkan informasi perusahaan termasuk *sustainability report* dibandingkan perusahaan kecil.

2.1.4.4 Tipe Industri

Tipe industri merupakan karakteristik yang dimiliki oleh perusahaan mengenai bidang usaha, karyawan yang dimiliki, resiko usaha, dan lingkungan perusahaan. Tipe industri membagi perusahaan berdasarkan lingkup operasi, risiko perusahaan serta kemampuan dalam menghadapi tantangan bisnis. Tipe industri dibagi menjadi dua ukuran yaitu *high-profile* dan *low-profile*.

Perusahaan *high profile* tidak perlu banyak melakukan pinjaman atau mencari sumber dana untuk kegiatan operasi perusahaan karena kemampuan pemenuhan kebutuhan dana yang baik dan adanya sumber daya yang luas. Sedangkan perusahaan *low profile* memiliki kebutuhan dana yang cukup tinggi tetapi kemampuan pemenuhan dan sumber daya yang dimiliki terbatas, sehingga perusahaan *low profile* harus melakukan peminjaman dana untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Secara umum perusahaan *high profile* merupakan perusahaan yang memperoleh perhatian dari masyarakat karena aktivitas operasinya memiliki potensi untuk bersinggungan dengan kepentingan luas dibandingkan dengan perusahaan *low profile*.

Berdasarkan penelitian Hackston dan Milne (1996) dalam Anindita (2014) perusahaan yang masuk dalam klasifikasi kelompok *high profile* antara lain perusahaan perminyakan dan pertambangan lain, penerbangan, otomotif, kimia hutan, kertas, agribisnis, tembakau dan rokok, produk makanan dan minuman, media dan komunikasi, energy (listrik), *engineering*, kesehatan serta transportasi dan pariwisata. Sedangkan perusahaan yang termasuk kedalam industri *low profile* adalah bangunan, keuangan dan perbankan, supplier peralatan medis,

retailer, property, tekstil dan produk tekstil, produk personal dan produk rumah tangga.

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (UU PT No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 ayat 1). Hal ini menunjukkan bahwa baik perusahaan tersebut *high profile* maupun *low profile* akan tetap mengungkapkan *sustainability report* atas dasar peraturan tersebut.

2.1.5 Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)

Tata Kelola Perusahaan atau *Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan. Menurut *Finance Committee on Corporate Governance*, mendefinisikan *corporate governance* merupakan proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta aktivitas perusahaan kearah peningkatan pertumbuhan dan akuntabilitas perusahaan (Wanda dan Efrizal, 2016).

Pihak-pihak utama dalam *corporate governance* adalah pemegang saham, manajemen, dan dewan komisaris. Sedangkan *stakeholder* atau pemangku kepentingan lain diantaranya yaitu karyawan, kreditor, pemasok, pelanggan, regulator, lingkungan, dan masyarakat. Penerapan komitmen CG yang baik atau biasa disebut *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan proses dan struktur yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan kebijakan dalam rangka

meningkatkan keberhasilan dan akuntabilitas perusahaan. Sehingga dapat memaksimalkan nilai tambah dan menjaga keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang bagi para pemegang saham maupun pemangku kepentingan yang lain berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Good corporate governance yang diterapkan oleh perusahaan harus memperhatikan asas-asas dalam pedoman umum *good corporate governance* oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) tahun 2009. Asas tersebut diantaranya sebagai berikut:

1) Transparansi (*Transparency*)

Prinsip dasar transparansi adalah menjaga obyektivitas sehingga perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

2) Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip dasar akuntabilitas yaitu perusahaan harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara wajar dan transparan. Untuk itu perusahaan harus dikelola dengan benar, terukur dan sesuai dengan tujuan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

3) Responsibilitas (*Responsibility*)

Prinsip dasar responsibilitas yaitu perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tanggung jawab

terhadap masyarakat serta lingkungan sehingga dapat usaha dapat terus bertumbuh secara berkesinambungan dalam jangka panjang.

4) Independensi (*Independency*)

Prinsip dasar independensi yaitu perusahaan harus dikelola secara profesional sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak terpengaruh iintervensi dari pihak lain.

5) Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Prinsip dasar *fairness* yaitu perusahaan harus selalu memperhatikan kepentingan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2.1.5.1 Komite Audit

Komite audit merupakan organ pendukung yang berada di bawah dewan komisaris. Komite audit yang merupakan komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab terhadap dewan komisaris yang bertugas menjalankan fungsi pengawasan terhadap direksi. Komite audit dan wajib melaporkan aktivitasnya secara rutin (berkala) kepada dewan komisaris. Menurut Surat Edaran Bapepam Nomor: SE-03/PM/2000 tentang komite audit menjelaskan yang menjelaskan bahwa tujuan komite audit adalah membantu dewan komisaris untuk:

- 1) Meningkatkan kualitas laporan keuangan
- 2) Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan
- 3) Meningkatkan efektivitas fungsi internal audit maupun eksternal audit

4) Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris

Koordinasi komite audit akan semakin baik seiring dengan frekuensi rapat pertemuan yang dilakukan, sehingga pengawasan terhadap manajemen dapat dilakukan lebih efektif dan meningkatkan pengungkapan informasi perusahaan ke publik. Pembahasan dalam rapat lebih mengutamakan kinerja perusahaan pada laporan yang bersifat wajib yaitu pengungkapan laporan keuangan.

2.1.5.2 Dewan Direksi

Dewan Direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas pengelolaan perusahaan berjalan secara efektif dan efisien sesuai prinsip-prinsip *good corporate governance*.

Dewan Direksi merupakan sekelompok individu yang dipilih oleh pemegang saham perusahaan untuk mewakili kepentingan perusahaan. Hal ini dapat mendorong pihak manajemen (direksi) untuk mengutamakan kepentingan pemegang saham daripada tujuan perusahaan yang menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan tanggung jawan sosial dan lingkungan perusahaan. Dewan direksi biasanya melakukan pertemuan secara berkala untuk menetapkan kebijakan bagi manajemen dan pengawasan perusahaan. Jumlah anggota dewan direksi tidak menjamin terciptanya kualitas komunikasi yang baik dalam hal

keterbukaan informasi yang secara teoritis akan meningkatkan keluasan pengungkapan informasi termasuk informasi *sustainability report*.

2.1.5.3 Governance Committee

Menurut Willey, *governance committee* adalah sebuah komite yang terdiri dari beberapa anggota dewan direksi, yang memiliki tugas untuk mengembangkan dan merekomendasi kepada dewan, pedoman dalam pelaksanaan dan etika *corporate governance* (Suryono dan Prastiwi, 2011).

Governance committee merupakan komite yang bertugas mengawasi proses pencalonan komisaris dan direksi, menyeleksi para kandidat yang akan dicalonkan dan mengusulkan kebijakan-kebijakan prosedur-prosedur tentang struktur dewan dan proses nominasinya. *Governance committee* dapat merekomendasikan untuk melakukan tanggung jawab social melalui *sustainability report* (Azwir et al, 2014). Keberadaan *governance committee* dapat meningkatkan efektifitas penerapan GCG sehingga pengelolaan perusahaan memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholder* sesuai dengan konsep GCG. Dengan adanya *governance committee* maka penerapan GCG dapat terlaksana dengan baik dan mendorong perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab social dan pelaporan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengungkapan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) telah banyak dilakukan sebelumnya, diantaranya adalah A Nasir, E Ilham,

dan VI Utara (2014) meneliti tentang pengaruh karakteristik perusahaan dan *corporate governance* terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan LQ45 yang terdaftar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas, *leverage*, dan *governance committee* berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*, sedangkan ukuran perusahaan, komite audit dan dewan direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Penelitian lain dilakukan oleh Aniktia dan Khafid (2015) tentang pengaruh mekanisme good corporate governance dan kinerja keuangan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Penelitian tersebut menggunakan dewan komisaris, komite audit, kepemilikan manajerial, *governance committee*, profitabilitas dan *leverage* sebagai variable independen yang mempengaruhi pengungkapan *sustainability report*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan komite audit, *governance committee*, *leverage* berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Sedangkan dewan komisaris, kepemilikan manajerial, dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *sustainability report*.

I Syakirli, C Cheisviyanny, dan Halmawati (2019) melakukan penelitian dengan menggunakan profitabilitas, ukuran perusahaan, dan tipe industri sebagai variable independen yang mempengaruhi pengungkapan *sustainability report*. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan, dan tipe industri tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Berbeda hasil dengan penelitian Anindita (2014) yang menggunakan ukuran

perusahaan, profitabilitas dan tipe industri sebagai variabel independen yang berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela pelaporan keberlanjutan (*sustainability reporting*). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas dan tipe industri berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela pelaporan keberlanjutan (*sustainability reporting*), sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela pelaporan keberlanjutan (*sustainability reporting*).

Berikut dalam tabel 2.1 dijelaskan beberapa ringkasan penelitian tentang pengaruh karakteristik perusahaan dan *corporate governance* terhadap pengungkapan *sustainability report* yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Variabel	Hasil
1	W Adila dan E Syofyan (2016)	<p><u>Variabel Independen:</u> Dewan Komisaris Independen Komite Audit Profitabilitas Ukuran Perusahaan</p> <p><u>Variabel Dependen:</u> Sustainability Report</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengungkapan sukarela sustainability report masih rendah 2. Dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan Sustainability Report 3. Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan Sustainability Report 4. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan Sustainability Report 5. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan Sustainability Report

2	I Syakirli, C Cheisviyanny, dan Halmawati (2019)	<u>Variabel Independen:</u> Profitabilitas Ukuran Perusahaan Tipe Industri <u>Variabel Dependen:</u> Sustainability Reporting	1. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability reporting 2. Ukuran tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability reporting 3. Tipe industri tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability reporting
4	Aniktia dan Khafid (2015)	<u>Variabel Independen:</u> Dewan Komisaris Komite Audit Kepemilikan Manajerial Governance committee Profitabilitas Leverage <u>Variabel Dependen:</u> Sustainability Report	1. Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report 2. Komite Audit berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report 3. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report 4. Governance committee berpengaruh terhadap sustainability report 5. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap sustainability report 6. Leverage berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report
4	Mariya Safitri & Saifudin (2019)	<u>Variabel Independen:</u> Profitabilitas Likuiditas Leverage Aktivitas Perusahaan Ukuran Perusahaan Komite Audit	1. Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sustainability report 2. Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap

		<p>Dewan Komisaris Governance Committe</p> <p><u>Variabel Dependen:</u> Praktik Pengungkapan Sustainability Report</p>	<p>pengungkapan sustainability report</p> <p>3. Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sustainability report</p> <p>4. Aktivitas perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sustainability report</p> <p>5. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sustainability report</p> <p>6. Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sustainability report</p> <p>7. Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sustainability report</p> <p>8. Governance Committee berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sustainability report</p>
5	Anindita (2014)	<p><u>Variabel Independen:</u> Ukuran Perusahaan Profitabilitas Tipe Industri</p> <p><u>Variabel Dependen:</u> Pelaporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Reporting</i>)</p>	<p>1. Ukuran tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela pelaporan keberlanjutan</p> <p>2. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela pelaporan keberlanjutan</p> <p>3. Tipe industri berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela pelaporan keberlanjutan</p>
6	Pratama dan Yulianto (2015)	<p><u>Variabel Independen:</u> Profitabilitas Ukuran Perusahaan Kepemilikan Institusioanl Dewan Komisaris</p>	<p>1. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan sustainability report</p> <p>2. Ukuran perusahaan berpengaruh positif</p>

		<p>Governance committee Komite Audit</p> <p><u>Variabel Dependen:</u> Sustainability Report</p>	<p>terhadap pengungkapan sustainability report</p> <p>3. Kepemilikan institusi berpengaruh negative terhadap pengungkapan sustainability report</p> <p>4. Dewan komisaris berpengaruh negative terhadap pengungkapan sustainability report</p> <p>5. Governance committee berpengaruh negative terhadap pengungkapan sustainability report</p> <p>6. Komite Audit berpengaruh negative terhadap pengungkapan sustainability report</p>
7	A Nasir, E Ilham, dan VI Utara (2014)	<p><u>Variabel Independen:</u> Profitabilitas Likuiditas Leverage Aktivitas Perusahaan Ukuran Perusahaan Komite Audit Dewan Direksi Governance Committe</p> <p><u>Variabel Dependen:</u> Praktik Pengungkapan Sustainability Report</p>	<p>1. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sustainability report</p> <p>2. Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sustainability report</p> <p>3. Leverage berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sustainability report</p> <p>4. Aktivitas perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sustainability report</p> <p>5. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sustainability report</p> <p>6. Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sustainability report</p> <p>7. Dewan Direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sustainability report</p>

			<p>terhadap pengungkapan sustainability report</p> <p>8. Governance Committee berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sustainability report</p>
8	Widia Yula Riza (2017)	<p><u>Variabel Independen:</u> Ukuran Perusahaan Struktur Modal Pertumbuhan Perusahaan</p> <p><u>Variabel Dependen:</u> Sustainability Reporting</p>	<p>1. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap sustainability reporting</p> <p>2. Struktur modal berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap sustainability reporting</p> <p>3. Pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap sustainability reporting</p>
9	Idah (2013)	<p><u>Variabel Independen:</u> Dewan Komisaris Komite Audit Dewan Direksi Governance committee Profitabilitas Likuiditas Leverage Aktivitas Perusahaan Ukuran Perusahaan</p> <p><u>Variabel Dependen:</u> Sustainability Report</p>	<p>1. Dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap pengungkapan sustainability report</p> <p>2. Komite audit berpengaruh negatif terhadap pengungkapan sustainability report</p> <p>3. Dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan sustainability report</p> <p>4. Governance committee berpengaruh positif terhadap pengungkapan sustainability report</p> <p>5. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan sustainability report</p> <p>6. Likuiditas berpengaruh negative terhadap pengungkapan sustainability report</p> <p>7. Leverage berpengaruh negative terhadap</p>

			<p>pengungkapan sustainability report</p> <p>8. Aktivitas perusahaan berpengaruh negative terhadap pengungkapan sustainability report</p> <p>9. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan sustainability report</p>
10	Suryono dan Prastiwi (2011)	<p><u>Variabel Independen:</u></p> <p>Profitabilitas</p> <p>Likuiditas</p> <p>Leverage</p> <p>Aktivitas Perusahaan</p> <p>Ukuran Perusahaan</p> <p><i>Corporat</i></p> <p><i>Governance:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Komite Audit - Dewan Direksi - Governance Committee <p><u>Variabel Dependen:</u></p> <p>Praktik Pengungkapan Sustainability Report</p>	<p>1. ROA berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sustainability report</p> <p>2. Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sustainability report</p> <p>3. Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sustainability report</p> <p>4. Aktivitas perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sustainability report</p> <p>5. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sustainability report</p> <p>6. Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sustainability report</p> <p>7. Dewan Direksi berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sustainability report</p> <p>8. Governance Committee tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sustainability report</p>

11	N Hasanah, D Syam, AW Jati (2015)	<u>Variabel Independen:</u> Dewan Komisaris Dewan Direksi Komite Audit <u>Variabel Dependen:</u> Sustainability Report	1. Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Sustainability Report 2. Dewan Direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Sustainability Report 3. Komite Audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Sustainability Report
----	-----------------------------------	---	---

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Kerangka Pemikiran Teoritis

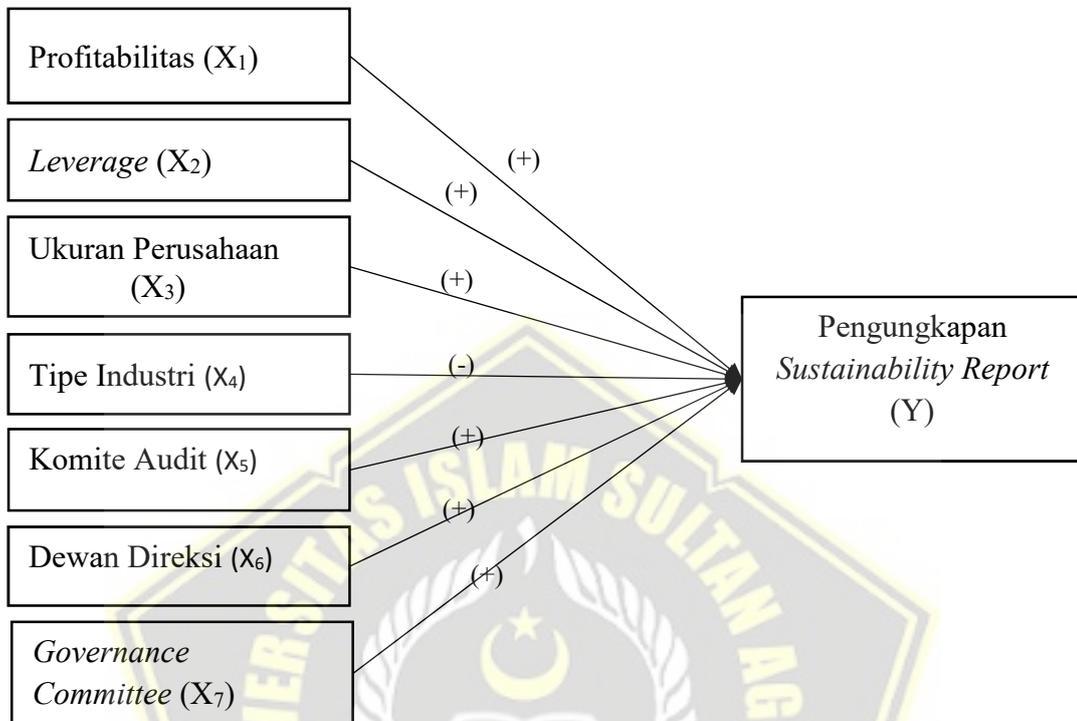
Sustainability report atau laporan keberlanjutan adalah praktik pengukuran, pengungkapan, dan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal, tentang kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan keberlanjutan. Pengungkapan *sustainability report* masih bersifat sukarela, tidak diwajibkan tetapi menjadi tuntutan bagi perusahaan untuk memberikan informasi yang transparan, akuntabel, serta praktik tata kelola perusahaan yang semakin baik.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengungkapan *sustainability report* oleh perusahaan. Beberapa indikator kriteria perusahaan dan *corporate governance* menunjukkan pengaruh positif perusahaan untuk mengungkapkan informasi *sustainability report*. Profitabilitas dan *leverage* dapat dijadikan pertimbangan perusahaan dalam merancang program sosial dan pelestarian lingkungan. Ukuran perusahaan merupakan salah satu karakteristik perusahaan yang menentukan tingkat kepercayaan investor. Untuk mendapatkan

kredibilitas yang baik maka perusahaan berupaya menunjukkan perannya dalam pertumbuhan sosial dan lingkungan sekitar. Sedangkan pengungkapan *sustainability report* tidak dipengaruhi oleh tipe perusahaan. Karena baik perusahaan *high profile* maupun *low profile* akan mengutamakan untuk mendapatkan citra yang baik dari masyarakat untuk kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang dengan mengungkapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Corporate governance merupakan proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta aktivitas perusahaan kearah peningkatan pertumbuhan dan akuntabilitas perusahaan Indikator *corporate governance* dalam penelitian ini yang mempengaruhi pengungkapan *sustainability report* oleh perusahaan adalah *governance committee*, karena dapat merekomendasikan pengungkapan tanggung jawab social dan lingkungan melalui *sustainability report*. Komite audit dan dewan direksi masing-masing akan melakukan pertemuan secara berkala untuk menetapkan kebijakan bagi manajemen dan pengawasan perusahaan. Jumlah kehadiran juga tidak mempengaruhi pengungkapan informasi *sustainability report*. Hal ini dikarenakan hasil pembahasan dalam rapat lebih menitikberatkan pembahasan kinerja perusahaan dalam pengungkapan laporan yang bersifat wajib berupa laporan keuangan dan laporan sukarela menjadi tidak diutamakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1
Model Penelitian

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

Menurut Bowman dan Haire (dalam Anindita, 2014) profitabilitas adalah faktor yang membuat manajemen menjadi bebas dan fleksibel untuk mengungkapkan pertanggungjawaban social kepada pemegang saham. Sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi sosial. Informasi dalam aspek ekonomi, social dan lingkungan diungkapkan dalam *sustainability report*. Hal ini menunjukkan bahwa

semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi informasi yang diungkapkan termasuk mengungkapkan *sustainability report*.

Rasio profitabilitas diproksikan dengan *Return on Asset* (ROA) yang merupakan rasio untuk mengukur kemampuan manajemen dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang digunakan dalam kegiatan operasi. Penelitian yang dilakukan oleh A Nasir, E Ilham, dan VI Utara (2014) menunjukkan bahwa profitabilitas yang diproksikan dengan ROA berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₁ : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*.

2.4.2 Pengaruh *Leverage* terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

Leverage menunjukkan bagaimana suatu perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, sehingga dapat menimbulkan beban dan resiko bagi perusahaan. Semakin tinggi tingkat *leverage*, maka perusahaan akan sangat bergantung pada dukungan para kreditor salah satunya dengan mengungkapkan *sustainability report*. Semakin banyak investor yang menjadikan laporan keberlanjutan sebagai pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan, karena melalui pengungkapan *sustainability report* dapat mengalihkan perhatian terhadap rasio utang perusahaan yang tinggi.

Hal ini searah dengan penelitian Ria Aniktia (2015) yang membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₂ : *Leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*

2.4.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

Ukuran perusahaan merupakan salah satu karakteristik perusahaan yang dapat menentukan tingkat kepercayaan investor, membutuhkan kredibilitas yang baik sehingga perusahaan perlu melakukan sumbangsih dalam pertumbuhan sosial dan lingkungan sekitar (A Nasir, E Ilham, VI Utara, 2014). Ukuran perusahaan dapat diukur dengan nilai *log of total asset* yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar perusahaan, secara umum akan mengungkapkan informasi perusahaan lebih banyak daripada perusahaan kecil karena perusahaan besar cenderung mendapatkan tekanan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang lebih lebih besar.

Penelitian yang dilakukan Marwati dan Yulianti (2015) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Sama halnya dalam penelitian Idah (2013) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berperan positif terhadap pengungkapan *sustainability report* yang artinya perusahaan akan berusaha untuk mendapatkan legitimasi dari *stakeholder* dengan mengungkapkan lebih banyak informasi baik yang bersifat wajib maupun sukarela. Berdasarkan uraian di atas dan mengacu pada penelitian terdahulu maka hipotesis yang diusulkan adalah:

H₃ : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*.

2.4.4 Pengaruh Tipe Industri terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

Tipe industri hanya menunjukkan perbedaan kelompok perusahaan terkait dengan karakteristik yang dimiliki dalam bidang usaha, karyawan yang dimiliki, resiko usaha dan lingkungan. Sehingga perbedaan tipe industri tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Setiap perusahaan pasti ingin menunjukkan citra yang baik kepada *stakeholder*, salah satunya dengan mempublikasikan *sustainability report* baik bagi perusahaan *high profile* maupun perusahaan *low profile*. Hal ini sejalan dengan penelitian I Syakirli, C Cheisviyanny, dan Halmawati (2019) yang menyatakan bahwa tipe industri tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₄: Tipe industri berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *sustainability report*

2.4.5 Pengaruh Komite Audit terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

Komite audit merupakan komite yang ditunjuk perusahaan sebagai penghubung antara dewan direksi dan audit eksternal, internal auditor serta anggota independen, yang memiliki tugas pengawasan auditor, memastikan manajemen melakukan tindakan korektif yang tepat terhadap hukum dan regulasi. Koordinasi komite audit akan semakin baik seiring dengan frekuensi rapat pertemuan yang dilakukan, sehingga pengawasan terhadap manajemen dapat dilakukan lebih efektif dan meningkatkan pengungkapan informasi perusahaan ke publik.

Pembahasan dalam rapat lebih mengutamakan kinerja perusahaan pada laporan yang bersifat wajib yaitu pengungkapan laporan keuangan. Sejalan dengan hasil penelitian A Nasir, E Ilham, dan VI Utara (2014) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₅: Komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*

2.4.6 Pengaruh Dewan Direksi terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

Dewan direksi merupakan pusat dari system tata kelola perusahaan. Tanggung jawab utama dewan direksi adalah memastikan kelangsungan jangka panjang perusahaan dan mengawasi manajemen. Dewan direksi biasanya melakukan pertemuan secara berkala untuk menetapkan kebijakan bagi manajemen dan pengawasan perusahaan. Jumlah anggota dewan direksi tidak menjamin terciptanya kualitas komunikasi yang baik dalam hal keterbukaan informasi yang secara teoritis akan meningkatkan keluasan pengungkapan informasi termasuk informasi *sustainability report*. Hal ini disebabkan karena hasil pembahasan dalam rapat lebih menitikberatkan pembahasan kinerja perusahaan dalam pengungkapan laporan yang bersifat wajib berupa laporan keuangan. Sehingga pembahasan kinerja terhadap pengungkapan *sustainability report* tidak diutamakan. Hal ini sesuai dengan penelitian N Hasanah, D Syam, AW Jati (2015) yang menyatakan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan

sustainability report. Berdasarkan uraian di atas dan mengacu pada penelitian terdahulu maka hipotesis yang diusulkan adalah:

H₃: Dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*.

2.4.7 Pengaruh Governance Committe terhadap Pengungkapan Sustainability Report

Idah (2013) menyatakan bahwa salah satu prinsip GCG yaitu *responsibility* mengharuskan perusahaan melakukan kegiatan tanggung jawab sosial sebagai bentuk perhatian terhadap *stakeholder*-nya serta mendapatkan citra yang baik di lingkungan masyarakat. *Governance Committee* merekomendasikan pengungkapan tanggung jawab social melalui *sustainability report*. Pengungkapan tanggun jawab sosial dan lingkungan merupakan respon perusahaan terhadap tekanan pemerintah dan masyarakat sekaligus reaksi terhadap permintaan *stakeholder*. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya tambahan *governance committe* perusahaan akan melaksanakan prinsip-prinsip *good corporate governance* sehingga asumsi teori *stakeholder* dapat terpenuhi. Sejalan dengan hasil penelitian Aniktia dan Khafid (2015) yang menyatakan bahwa *governance committe* berpengaruh terhadap *sustainability report*. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₇: Governance Committe berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif karena data-data yang digunakan berupa angka-angka dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun hubungan antara suatu variabel dengan variabel yang lain. Menurut Sugiyono (2016) penelitian kuantitatif adalah metode penelitian menggunakan populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan untuk menjelaskan hubungan kausal variabel independen dan dependen.

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016). Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan masuk dalam indeks Kompas100.

Perusahaan yang masuk dalam indeks Kompas100 memiliki likuiditas tinggi, nilai kapitalisasi pasar yang besar, memiliki fundamental dan kinerja yang baik. Perusahaan yang terdapat dalam indeks Kompas100 diperkirakan dapat

mewakili 70-80% dari total perusahaan yang tercatat di BEI, sehingga dapat menggambarkan sebagian besar kondisi perusahaan yang ada di Indonesia.

3.2.2. Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan masuk dalam indeks Kompas100 selama periode tahun 2018-2020.

Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan rancangan sampel nonprobabilitas (*Nonprobability Sampling Design*) dengan menggunakan bentuk *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2016) *Nonprobability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sedangkan *purposive sampling* adalah teknik untuk menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016). Alasan pemilihan sampel dengan metode *purposive sampling* karena tidak semua sampel perusahaan memiliki kriteria yang sesuai dengan penelitian ini. Adapun kriteria perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang termasuk dalam indeks Kompas100. Periode yang digunakan selama periode 2018-2020 tersebut karena ingin memberikan hasil penelitian terbaru.
- 2) Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan melalui situs BEI secara berturut-turut per 31 Desember 2018 sampai 31 Desember 2020.
- 3) Perusahaan menyajikan laporan keuangannya dalam mata uang rupiah.

- 4) Perusahaan yang mempublikasikan *sustainability report* secara berturut-turut selama periode 2018-2020.

3.3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bersumber dari laporan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode penelitian. Data tersebut diperoleh dengan mengakses melalui website perusahaan dan website resmi BEI www.idx.co.id. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Menurut Sugiyono (2016) data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dan menunjang penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *time series* karena data dalam penelitian ini berada dalam interval waktu tertentu, yaitu pada periode 2018 – 2020.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan mengumpulkan data sekunder yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan dengan cara penelusuran dan pencatatan informasi yang diperlukan pada data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang termasuk dalam indeks Kompas100 pada periode 2018–2020.

3.5. Variabel dan Indikator

Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016). Variabel–variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel dependen berupa *sustainability report*, variabel independen berupa profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, tipe industri, komite audit, dewan direksi dan *governance committee*.

3.5.1. Variabel Independen (X)

Variabel independen atau variabel bebas menurut Sugiyono (2016) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen atau variabel bebas (X) yaitu sebagai berikut:

3.5.1.1 Profitabilitas (X₁)

Profitabilitas merupakan indicator yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Dalam penelitian profitabilitas diproksikan dengan *Return On Asset* (ROA). Semakin tinggi nilai ROA, menunjukkan semakin besar tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan tersebut dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan *asset*. Mengacu pada penelitian Adila dan Sofyan (2016), ROA dapat diformulasikan dengan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

3.5.1.2 *Leverage (X₂)*

Menurut Hadiningsih (dalam Suryono dan Prastiwi, 2011) *Leverage* merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya baik jangka pendek maupun jangka panjang jika suatu perusahaan dilikuidasi. Rasio *leverage* menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dibiayai oleh liabilitas dengan kemampuan perusahaan berdasarkan aset atau ekuitas yang dimiliki perusahaan tersebut.

Pada penelitian ini ukuran *leverage* dihitung menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) karena dapat mengukur sejauh mana modal perusahaan dapat menutupi utang yang berasal dari kreditor. Mengacu pada penelitian Nasir et al (2014), *leverage* dapat diformulasikan dengan rumus sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

3.5.1.3 *Ukuran Perusahaan (X₃)*

Ukuran perusahaan merupakan ukuran dimana perusahaan bisa dibedakan berdasarkan besar kecilnya berdasarkan total ekuitas, total aset, dan pendapatan. Ukuran perusahaan sebagai salah satu karakteristik perusahaan yang menjadi salah satu penentu tingkat kepercayaan investor, membutuhkan kredibilitas yang baik sehingga perusahaan perlu melakukan sumbangsih dalam pertumbuhan social dan lingkungan sekitar (Nasir et al, 2014).

Pada penelitian ini ukuran perusahaan diproksikan dengan *Log of Total Assets* yaitu logaritman natural dari total asset perusahaan. Total asset dipilih karena nilai asset cenderung lebih stabil. Penggunaan logaritma natural bertujuan untuk mengurangi perbedaan ukuran perusahaan yang terlalu besar dengan ukuran yang terlalu kecil sehingga data total asset akan terdistribusi normal dan memiliki standar error koefisien regresi normal. Mengacu pada penelitian Nasir et al (2014), ukuran perusahaan dapat diformulasikan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln} (\text{Total Aktiva})$$

3.5.1.4 Tipe Industri (X₄)

Tipe industri merupakan karakteristik yang dimiliki oleh perusahaan mengenai bidang usaha, karyawan yang dimiliki, resiko usaha, dan lingkungan perusahaan. Tipe industri dibagi menjadi dua ukuran yaitu *high-profile* dan *low-profile*.

Pada penelitian ini tipe industri diukur menggunakan variabel *dummy*, yaitu nilai 1 untuk perusahaan *high-profile* dan nilai 0 untuk perusahaan *low-profile*. Mengacu pada penelitian Anindita (2014), ukuran perusahaan dapat diformulasikan dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Nilai 1} &= \text{jika perusahaan tipe } \textit{high-profile} \\ \text{Nilai 0} &= \text{jika perusahaan tipe } \textit{low-profile} \end{aligned}$$

3.5.1.5 Komite Audit (X₅)

Jati, dalam Suryono dan Prastiwi (2011) menyatakan bahwa komite audit adalah komite yang ditunjuk oleh perusahaan sebagai penghubung Antara dewan direksi dan audit eksternal, internal auditor serta anggota independen, yang memiliki tugas untuk memberikan pengawasan auditor, memastikan manajemen melakukan tindakan korektif yang tepat terhadap hukum dan regulasi.

Pada penelitian ini, pelaksanaan *corporate governance* untuk komite audit diprosikan dengan jumlah rapat anggota komite audit pada suatu perusahaan dalam periode 1 tahun. Mengacu pada penelitian N Hasanah, D Syam, AW Jati (2015), komite audit dapat diformulasikan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{Rapat Komite Audit}$$

3.5.1.6 Dewan Direksi (X₆)

Undang-undang perseroan terbatas nomor 1 Tahun 1995 pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa dewan direksi merupakan bagian yang bertanggung jawab penuh terhadap kepengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai peraturan perundang-undangan.

Pada penelitian ini, pelaksanaan dewan direksi diprosikan dengan jumlah anggota dewan direksi pada suatu perusahaan. Mengacu pada penelitian A

Nasir, E Ilham, dan VI Utara (2014), dewan direksi dapat diformulasikan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Dewan Direksi} = \sum \text{Anggota Dewan Direksi}$$

3.5.1.7 *Governance Committee* (X₆)

Governance Committe merupakan komite yang bertugas mengawasi proses pencalonan komisaris dan direksi, menyeleksi para kandidat yang akan dicalonkan dan mengusulkan kebijakan-kebijakan prosedur-prosedur tentang struktur dewan dan proses nominasinya, sehingga dapat menunjang terlaksananya *good corporate governance*.

Komite GCG bertanggung jawab atas peningkatan dan penyempurnaan praktik GCG sehubungan dengan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Komite GCG bertanggung jawab terhadap Dewan Komisaris (AR Kalbe Hal 205)

Komite *Good Corporate Governance* (GCG) Perseroan bertugas dan bertanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta dapat memperoleh hasil, manfaat, dan dampak

positif yang optimal dari kinerja Perusahaan (AR WTON Hal 357)

Komite Tata Kelola Terintegrasi dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan tujuan untuk membantu dan memfasilitasi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas penerapan Tata Kelola (AR BMRI Hal 543)

Mengacu pada penelitian Aniktia dan Khafid (2015), dalam penelitian ini *governance committee* diukur menggunakan variabel *dummy*, yaitu nilai 1 untuk perusahaan yang membentuk *governance committee* dan nilai 0 untuk perusahaan yang tidak membentuk *governance committee*.

Nilai 1 = jika perusahaan membentuk *governance committee*

Nilai 0 = jika perusahaan tidak membentuk *governance committee*

3.5.2. Variabel Dependen (Y)

Sugiyono (2016) menjelaskan bahwa variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen atau variabel terikat yaitu *sustainability report*.

Sustainability report merupakan suatu praktik pengukuran, pengungkapan, dan upaya akuntabilitas yang menunjukkan aktivitas perusahaan kepada para *stakeholder*. Indikator yang digunakan untuk variabel ini adalah *Sustainability Report Disclosure Index* (SRDI) yang merupakan suatu indeks yang digunakan untuk menilai bagaimana tanggung jawab perusahaan sesuai dengan kriteria menurut Standar GRI, yang mewakili praktik pengungkapan pelaporan dampak ekonomi, lingkungan dan sosial kepada publik. Pelaporan keberlanjutan yang berdasarkan pada Standar GRI dapat memberikan informasi tentang kontribusi positif atau negatif organisasi untuk pembangunan berkelanjutan.

Perhitungan dilakukan dengan memberikan nilai 1 jika item diungkapkan dan nilai 0 jika item tidak diungkapkan. Selanjutnya setiap item dijumlahkan

seluruhnya, kemudian dibagi dengan jumlah total pengungkapan berdasarkan Standar GRI. Mengacu pada penelitian Marwati dan Yulianti (2015), ukuran perusahaan dapat diformulasikan dengan rumus sebagai berikut:

$$SRDI = \frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan perusahaan}}{\text{jumlah item yang diharapkan}}$$

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Regresi Linier Berganda. Data yang akan dianalisis dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau tidaknya pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, tipe industry, komite audit, dewan direksi dan *governance committee* terhadap pengungkapan *sustainability report*. Sebelum dilakukan uji hipotesis maka terlebih dahulu dilakukan analisis statistik deskriptif untuk melihat deskripsi obyek yang diteliti dan uji asumsi klasik untuk melihat variabel-variabel yang diteliti dengan metode analisis regresi.

3.6.1. Analisis Statistik Deskriptif

Ghazali (2016) menyatakan bahwa, statistik deskriptif merupakan analisis yang memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian maksimum, minimum, *sum*, *range*, *kurtosis* dan *skewness* (kemencengan distribusi). Standar deviasi digunakan untuk menilai dispersi rata-rata dari sampel sedangkan nilai minimum dan maksimum digunakan untuk melihat nilai minimal dan maksimal dari populasi. Hal ini

dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel yang berhasil dikumpulkan dan memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian.

3.6.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji kualitas data sebelum data tersebut digunakan dalam pengujian regresi sehingga dapat menghindari terjadinya estimasi bias. Model analisis regresi yang baik harus memenuhi asumsi klasik sehingga hasil analisis regresi dapat dikatakan BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Uji asumsi klasik yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

3.6.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji Adakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2016). Model regresi yang baik adalah model yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik. Uji normalitas data dapat dilakukan dengan uji normalitas probability plot dan menggunakan *Test Normality Kolmogorov-Smirnov* untuk lebih meyakinkan hasil uji normalitas. Menurut Ghozali (2016) kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian normalitas menggunakan probability plot adalah jika titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka pola distribusi dikatakan normal sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sedangkan kriteria pengambilan keputusan dalam uji

normalitas menggunakan *Test Normality Komlogorov-Smirnov* yaitu berdasarkan probabilitas (*Asymtotic Significanted*) sebagai berikut:

- 1) Jika probabilitas $> 0,05$ maka distribusi dari model regresi dikatakan normal.
- 2) Jika probabilitas $< 0,05$ maka distribusi dari model regresi dikatakan tidak normal.

3.6.2.2 Uji Multikolinieritas

Menurut Ghazali (2016), uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji Adakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Sunyoto (2016) menjelaskan bahwa uji asumsi klasik jenis ini diterapkan untuk analisis regresi berganda yang terdiri atas dua atau lebih variabel bebas atau independen variabel ($X_{1,2,3,\dots,n}$) di mana akan di ukur keeratan hubungan antar variabel bebas tersebut melalui besaran koefisien korelasi (r). Model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi diantara variabel independen.

Multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari (1) nilai *tolerance* dan lawannya (2) *Variance Inflation Factor* (VIF). Ukuran ini menunjukkan ukuran setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang dipilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Kriteria pengambilan keputusan penggunaan nilai toleran dan VIF tersebut menurut Ghozali (2016) adalah jika nilai *tolerance* $> 0,10$ atau nilai VIF < 10 maka tidak ada multikoleniaritas di antara variabel independen. Sebaliknya, jika

nilai toleran $\leq 0,10$ atau nilai VIF ≥ 10 maka ada multikoleniaritas di antara variabel independen.

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Dalam persamaan regresi berganda perlu diuji mengenai sama atau tidaknya varian dari residual observasi yang satu dengan observasi yang lain (Sunyoto, 2016). Jika residualnya mempunyai varian yang sama maka dapat dikatakan terjadi Homoskedastisitas dan jika variannya tidak sama atau berbeda maka dapat dikatakan terjadi Heteroskedastisitas. Persamaan regresi yang baik yaitu jika tidak terjadi Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji grafik *scatterplots* dan uji *Glejser*. Menurut Imam Ghozali (2016), tidak terjadi heteroskedastisitas jika tidak ada pola yang jelas (bergelombang, melebar kemudian menyempit) pada gambar *scatterplots*, serta titik-titik menyebar di atas gambar dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Sedangkan uji *glejser* dilakukan dengan cara meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen (Ghozali, 2016). Jika nilai probabilitas signifikansi dari variabel independen dan lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya gejala heteroskedastisitas.

3.6.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi menurut Ghazali (2016) bertujuan untuk menguji Adakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW) yaitu dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bila nilai DW terletak antara batas atas (du) dan $(4-du)$, maka koefisien autokorelasi sama dengan nol berarti tidak ada autokorelasi.
- 2) Bila nilai DW lebih rendah dari pada batas bawah (dl), maka koefisien autokorelasi lebih dari nol berarti ada autokorelasi positif.
- 3) Bila nilai DW lebih dari pada $(4-dl)$, maka koefisien autokorelasi lebih kecil dari nol berarti ada autokorelasi negatif.
- 4) Bila nilai DW terletak antara batas atas (du) dan batas bawah (dl) atau DW terletak antara $(4-du)$ dan (dl) , maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

3.6.3. Analisis Regresi

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) versi 25. Regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, tipe perusahaan, komite audit, dewan direksi, dan *governance committee* terhadap pengungkapan *sustainability report*. Adapun persamaan untuk menguji hipotesis secara keseluruhan dalam penelitian ini menggunakan model sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + e$$

Keterangan :

- Y = Indeks SRDI pengungkapan *sustainability report* perusahaan
- α = Konstanta regresi
- $\beta_1 - \beta_7$ = Koefisien regresi
- X₁ = Profitabilitas yang diproksikan melalui *Return on Assets*
- X₂ = *Leverage* yang diproksikan melalui *Debt to Equity Ratio*
- X₃ = Ukuran perusahaan yang diproksikan melalui *Log of Total Assets*
- X₄ = Tipe Industri
- X₅ = Komite audit yang diproksikan dengan jumlah rapat
- X₆ = Dewan Direksi yang diproksikan melalui jumlah anggota
- X₇ = Variabel *dummy*, keberadaan *governance committee* untuk perusahaan yang membentuk dan nilai 0 untuk yang tidak.
- ϵ = *Error term*

3.6.4. Uji Keباikan Model

3.6.4.1 Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Menurut Ghazali (2016), pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan Adakah seluruh variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ($\alpha=5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) H_0 ditolak dan H_a diterima apabila nilai signifikansi $F < 0,05$, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel dependen.
- 2) H_0 diterima dan H_a ditolak apabila nilai signifikansi $F > 0,05$, artinya koefisien regresi tidak signifikan. Hal ini berarti bahwa variabel-variabel independen dan variabel moderaing tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.6.4.2 Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R^2)

Koefisien determinasi (*Adjusted R^2*) berfungsi untuk mengukur seberapa jauh kemampuan keseluruhan variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol dan satu ($0 < R^2 < 1$). Nilai *Adjusted R^2* yang kecil mengindikasikan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai R^2 yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen mampu memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk menjelaskan perubahan variabel dependen. Jika nilai *adjusted R^2* semakin mendekati 1 maka semakin baik kemampuan model tersebut dalam menjelaskan variabel dependen.

3.6.5. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu dengan beberapa pengujian sebagai berikut.

3.6.5.1 Uji Hipotesis Analisis Parsial (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variable dependen (Ghozali, 2016). Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ($\alpha=5\%$). Kriteria penerimaan hipotesis sebagai berikut:

- 1) H_0 ditolak apabila nilai signifikansi $t < 0,05$, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.
- 2) H_0 diterima apabila nilai signifikansi $t > 0,05$, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh dari profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, tipe industry, komite audit, dewan direksi dan *governance committee* terhadap pengungkapan *sustainability report*. Populasi dalam penelitian ini menggunakan perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan tergolong dalam indeks Kompas100 pada periode tahun 2018-2020. Indeks Kompas100 merupakan salah satu jenis indeks saham dari 100 saham perusahaan publik yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Saham-saham yang masuk dalam indeks Kompas100 memiliki likuiditas yang tinggi, nilai kapitalisasi pasar yang besar, memiliki fundamental dan kinerja yang baik.

Alasan pemilihan objek penelitian tersebut karena saham-saham yang terdapat dalam indeks Kompas100 merupakan penggerak utama Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Nilai kapitalisasi pasar saham-saham indeks Kompas100 mewakili sekitar 70-80% dari total nilai kapitalisasi pasar seluruh saham yang tercatat di BEI, sehingga investor dapat melihat kecenderungan arah pergerakan indeks dengan mengamati pergerakan indeks Kompas100. Indeks Kompas100 dievaluasi setiap semester atau 6 bulan sekali yaitu bulan Februari dan Agustus.

Data perusahaan diperoleh dari situs resmi BEI yaitu www.idx.co.id.

Penelitian ini menggunakan sampel yang memenuhi kriteria pemilihan sebagaimana telah ditentukan sebelumnya dengan teknik *purposive sampling*, yaitu sebagai berikut.

Tabel 4.1
Hasil Seleksi Pemilihan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang termasuk dalam indeks Kompas100	100
2	Perusahaan tidak mempublikasikan <i>annual report</i> dan <i>sustainability report</i> secara berturut-turut selama periode penelitian 2018-2020	(64)
3	Perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah	(6)
4	Jumlah perusahaan sampel	30
5	Periode penelitian (tahun 2018-2020)	3
6	Jumlah perusahaan selama periode penelitian	90
7	Data Outlier	(3)
8	Jumlah perusahaan selama periode penelitian setelah data outlier	87

Sumber : Data sekunder yang telah diolah (2021)

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat dilihat bahwa jumlah perusahaan yang dapat dijadikan sebagai objek penelitian dan sesuai dengan kriteria adalah 30 perusahaan. Periode penelitian selama tiga tahun sehingga data penelitian selama periode 2018-2020 adalah 3 x 30 sampel berjumlah 90 observasi, tetapi ada 3 data yang harus di outlier yaitu data ke 11, 29, dan 68 jadi total akhir data sejumlah 87. Berikut adalah tabel sampel perusahaan yang sesuai kriteria dan digunakan dalam penelitian :

Tabel 4.2
Sampel Perusahaan

No	Kode	Nama Perusahaan
1	AALI	Astra Agro Lestari
2	ADHI	Adhi Karya (Persero)
3	AKRA	AKR Corporindo
4	ANTM	Aneka Tambang (Persero)
5	ASII	Astra International
6	BBCA	Bank Central Asia
7	BBNI	Bank Negara Indonesia (Persero)
8	BBRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero)
9	BBTN	Bank Tabungan Negara (Persero)
10	BJBR	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
11	BJTM	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
12	BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk
13	BNLI	Bank Permata Tbk
14	ELSA	Elnusa Tbk
15	EXCL	XL Axiata Tbk
16	INTP	Indocement Tunggul Prakarsa Tbk
17	JPFA	JAPFA Comfeed Indonesia Tbk
18	JSMR	Jasa Marga (Persero) Tbk
19	KLBF	Kalbe Farma Tbk
20	LSIP	PP London Sumatra Indonesia Tbk
21	PTBA	Tambang Batubara Bukit Asam (Persero)
22	PTPP	PP (Persero) Tbk
23	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk
24	TINS	Timah (Persero) Tbk
25	UNTR	United Tractors Tbk
26	UNVR	Unilever Indonesia Tbk
27	WIKA	Wijaya Karya (Persero) Tbk
28	WSBP	Waskita Beton Precast Tbk
29	WSKT	Waskita Karya (Persero) Tbk
30	WTON	Wijaya Karya Beton Tbk

Sumber : Data sekunder yang telah diolah (2021)

4.1.2 Deskripsi Variabel

4.1.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data dalam penelitian yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai minimum dan nilai maksimum dari masing-masing variabel yaitu variabel *return on asset* (ROA), *leverage* (DER), ukuran perusahaan (Size), tipe industri (TYPE), komite audit (KA), dewan direksi (DD), *governance committee* (GC), pengungkapan *sustainability report* (SR). Pengukuran nilai rata-rata (mean) adalah cara untuk mengukur nilai sentral dari distribusi suatu data. Standar deviasi atau simpangan baku adalah rata-rata penyimpangan nilai data yang diteliti dari nilai rata-rata. Nilai terendah atau minimum merupakan nilai paling kecil dari distribusi suatu data dan nilai tertinggi atau maksimum merupakan nilai terbesar dari distribusi suatu data. Adapun hasil statistik deskriptif pada penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 4.3
Hasil Analisis Statistik Deskriptif Sebelum Data Outlier

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ROA	90	-45.09	44.68	4.3116	9.23614
DER	90	17.62	1607.86	303.0489	303.99665
SIZE	90	29.36	34.95	31.8049	1.48106
TYPE	90	0	1	.47	.502
KA	90	4	77	16.12	12.750
DD	90	4	12	7.32	2.233
GC	90	0	1	.47	.502
SR	90	.29	.96	.4631	.11546
Valid N (listwise)	90				

Sumber : Data sekunder yang telah diolah (2021)

Tabel 4.4
Hasil Analisis Statistik Deskriptif Setelah Outlier

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ROA	87	-45.09	44.68	4.3803	9.38624
DER	87	17.62	1607.86	294.9927	304.83995
SIZE	87	29.36	34.90	31.7617	1.46564
TYPE	87	0	1	.48	.503
KA	87	4	77	16.09	12.909
DD	87	4	12	7.28	2.214
GC	87	0	1	.46	.501
SR	87	.29	.75	.4521	.09768
Valid N (listwise)	87				

Sumber : Data sekunder yang telah diolah (2021)

Berdasarkan hasil olah statistik deskriptif pada tabel 4.4 di atas maka dapat diketahui bahwa variabel independen yaitu pengungkapan *sustainability report* mempunyai nilai minimum sebesar 0,29 dan nilai maksimum sebesar 0,75 dengan nilai rata-rata sebesar 0,4521 dan standar deviasi sebesar 0,9768. Hal ini menunjukkan bahwa data pada variabel pengungkapan *sustainability report* memiliki tingkat akurasi yang kurang karena nilai rata-rata lebih rendah dibandingkan standar deviasinya.

Variabel profitabilitas mempunyai nilai minimum sebesar -45,09 dan nilai maksimum sebesar 44,68 dengan nilai rata-rata sebesar 4,3803 dan standar deviasi sebesar 9,38624. Hal ini menunjukkan bahwa data pada variabel profitabilitas memiliki tingkat akurasi yang kurang karena nilai rata-rata lebih rendah dibandingkan standar deviasinya.

Variabel *leverage* mempunyai nilai minimum sebesar 17,62 dan nilai maksimum sebesar 1607,86 dengan nilai rata-rata sebesar 294,9927 dan standar

deviasi sebesar 304,83995. Hal ini menunjukkan bahwa data pada variabel *leverage* memiliki tingkat akurasi yang kurang karena nilai rata-rata lebih rendah dibandingkan standar deviasinya.

Variabel ukuran perusahaan mempunyai nilai minimum sebesar 29,36 dan nilai maksimum sebesar 34,90 dengan nilai rata-rata sebesar 31,7617 dan standar deviasi sebesar 1,46564. Hal ini menunjukkan bahwa data pada variabel ukuran perusahaan memiliki tingkat akurasi yang baik karena nilai rata-rata lebih tinggi dibandingkan standar deviasinya.

Variabel tipe industri mempunyai nilai minimum sebesar 0 dan nilai maksimum sebesar 1 dengan nilai rata-rata sebesar 0,48 dan standar deviasi sebesar 0,53. Hal ini menunjukkan bahwa data pada variabel tipe industri memiliki tingkat akurasi yang kurang karena nilai rata-rata lebih rendah dibandingkan standar deviasinya.

Variabel komite audit mempunyai nilai minimum sebesar 4 dan nilai maksimum sebesar 77 dengan nilai rata-rata sebesar 16,09 dan standar deviasi sebesar 12,909. Hal ini menunjukkan bahwa data pada variabel komite audit memiliki tingkat akurasi yang baik karena nilai rata-rata lebih tinggi dibandingkan standar deviasinya.

Variabel dewan direksi mempunyai nilai minimum sebesar 4 dan nilai maksimum sebesar 12 dengan nilai rata-rata sebesar 7,28 dan standar deviasi sebesar 2,214. Hal ini menunjukkan bahwa data pada variabel dewan direksi memiliki tingkat akurasi yang baik karena nilai rata-rata lebih tinggi dibandingkan standar deviasinya.

Variabel *governance committee* mempunyai nilai minimum sebesar 0 dan nilai maksimum sebesar 1 dengan nilai rata-rata sebesar 0,46 dan standar deviasi sebesar 0,501. Hal ini menunjukkan bahwa data pada variabel *governance committee* memiliki tingkat akurasi yang kurang karena nilai rata-rata lebih rendah dibandingkan standar deviasinya.

4.1.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan dengan beberapa uji, antara lain uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

4.1.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2013). Kriteria pengambilan keputusan adalah jika nilai Asymp. Sig > 5% maka data residual berdistribusi normal dan jika nilai Asymp. Sig < 5% maka data residual tidak berdistribusi normal. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut :

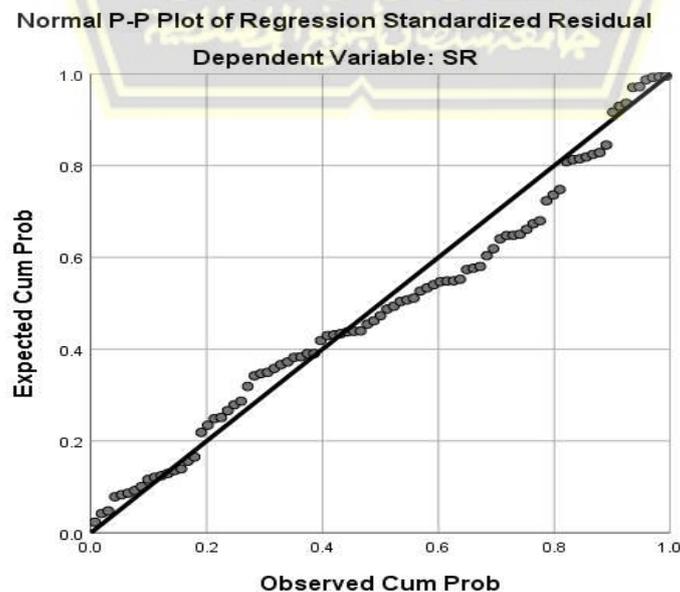
Tabel 4.5
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		87
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.08573216
Most Extreme Differences	Absolute	.095
	Positive	.095
	Negative	-.060
Test Statistic		.095
Asymp. Sig. (2-tailed)		.051 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber : Data sekunder yang telah diolah (2021)

Berdasarkan tabel diatas, pengujian menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa tingkat signifikansi yaitu sebesar 0,051 lebih besar dari 0,05, sehingga data dapat dinyatakan berdistribusi normal.

Gambar 4.1
Uji Normalitas



Berdasarkan gambar 4.1 menjelaskan bahwa P-Plot terlihat titik-titik menyebar di garis diagonalnya dan penyebarannya mendekati garis diagonalnya, sehingga model regresi dapat dikatakan normal.

4.1.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikoleniaritas bertujuan menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau tidak. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Pengujian ini dilakukan dengan menilai VIF, masing-masing variabel kurang dari 10 dan nilai tolerance value lebih besar dari 0 (Ghozali, 2013). Adapun hasil pengujian adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6
Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
1 (Constant)			
ROA	.730	1.370	Tidak terjadi Multikolinieritas
DER	.472	2.119	Tidak terjadi Multikolinieritas
SIZE	.240	4.166	Tidak terjadi Multikolinieritas
TYPE	.419	2.386	Tidak terjadi Multikolinieritas
KA	.904	1.107	Tidak terjadi Multikolinieritas
DD	.318	3.149	Tidak terjadi Multikolinieritas
GC	.601	1.663	Tidak terjadi Multikolinieritas

a. Dependent Variable: Pengungkapan *Sustainability Report*

Hasil pengujian Tabel 4.6 menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan model regresi tidak mengalami multikolinearitas.

4.1.3.3 Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson (DW). Hasil uji autokorelasi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.479 ^a	.230	.161	.08945	1.769

a. Predictors: (Constant), GC, KA, ROA, DD, DER, TYPE, SIZE

b. Dependent Variable: SR

Berdasarkan hasil analisis tabel 4.7, nilai DW sebesar 1,769. Dari hasil tersebut dapat dicari bahwa nilai d_U pada tabel distribusi alfa 5%, dengan variabel bebas 7 dan jumlah data sebanyak 87 adalah 1,8282 dan $4-d_U$ bernilai $(4-1,8282) = 2,1582$ dan d_L sebesar 1,4824. Nilai DW sebesar 1,769 terletak pada $DW < d_U < 4 - d_U = 1,769 < 1,8282 < 2,182$ artinya tidak terdapat autokorelasi positif maupun negatif.

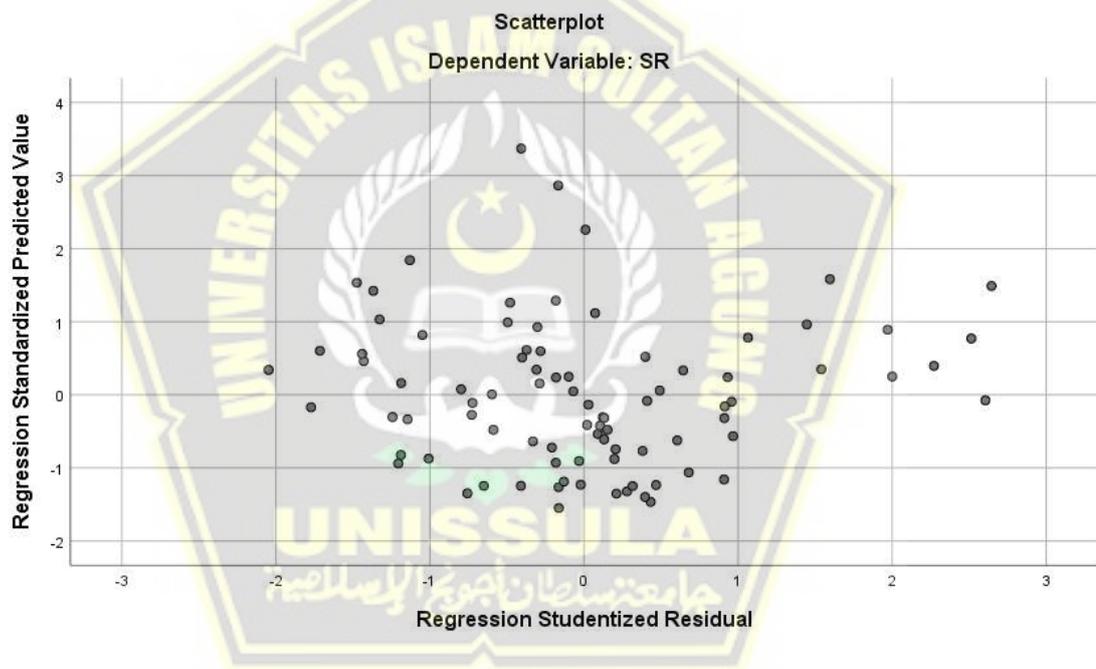
4.1.3.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian antar variabel satu pengamatan ke

pengamatan yang lain. Jika varian antar variabel yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat grafik scatterplots. Data dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas apabila titik-titik pada scatterplots menyebar secara acak serta tersebar di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y (Ghozali, 2013). Hasil pengujian sebagai berikut:

Gambar 4.2

Uji Heterokedastisitas



4.1.4 Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model regresi linear berganda yang baik adalah yang memenuhi kriteria asumsi klasik, yakni data harus normal, model bebas dari multikolinieritas, tidak terjadi heteroskedastisitas, dan terhindar dari autokorelasi. Dari analisis

sebelumnya terbukti bahwa model dalam penelitian ini memenuhi kriteria asumsi klasik, sehingga model dalam penelitian ini dianggap baik.

Tabel 4.8
Model Persamaan Regresi

Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.275	.381		.721	.473
	ROA	.002	.001	.185	1.604	.113
	DER	1,27E-02	.000	.040	.277	.783
	SIZE	.009	.013	.129	.638	.525
	TYPE	-.010	.030	-.050	-.327	.744
	KA	.002	.001	.327	3.151	.002
	DD	-.018	.008	-.401	-2.288	.025
	GC	-.029	.025	-.148	-1.162	.249

a. Dependent Variable: Pengungkapan *Sustainability R*

Pada tabel 4.8 hasil pengolahan data dengan menggunakan program IBM SPSS 26, sehingga didapat model persamaan regresi akhir sebagai berikut :

$$Y = 0,275 + 0,002 \text{ ROA} + 1,274 \text{ DER} + 0,009 \text{ SIZE} - 0,010 \text{ TYPE} + 0,002 \text{ KA} - 0,018 \text{ DD} - 0,029 \text{ GC}$$

Dari persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Nilai konstanta sebesar 0,275 menjelaskan bahwa profitabilitas (ROA), *leverage* (DER), ukuran perusahaan (SIZE), tipe industri (TYPE), komite audit (KA), dewan direksi (DD) dan *governance committee* (GC) nilainya 0 maka nilai pengungkapan *sustainability report* sebesar 0,275.

- 2) Nilai koefisien profitabilitas (ROA) sebesar +0,002 bernilai positif, artinya apabila profitabilitas (ROA) naik satu satuan maka akan menaikkan pengungkapan *sustainability report* (Y) sebesar +0,002 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.
- 3) Nilai koefisien *leverage* (DER) sebesar +1,274 bernilai positif, artinya apabila *leverage* (DER) naik satu satuan maka akan menaikkan pengungkapan *sustainability report* (Y) sebesar +1,274 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.
- 4) Nilai koefisien ukuran perusahaan (SIZE) sebesar +0,009 bernilai positif, artinya apabila ukuran perusahaan (SIZE) naik satu satuan maka akan menaikkan pengungkapan *sustainability report* (Y) sebesar +0,009 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.
- 5) Nilai koefisien tipe industri (TYPE) sebesar -0,010 bernilai negatif, artinya apabila tipe industri (TYPE) naik satu satuan maka akan menurunkan pengungkapan *sustainability report* (Y) sebesar -0,010 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.
- 6) Nilai koefisien komite audit (KA) sebesar +0,002 bernilai positif, artinya apabila komite audit (KA) naik satu satuan maka akan menaikkan pengungkapan *sustainability report* (Y) sebesar +0,002 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.
- 7) Nilai koefisien dewan direksi (DD) sebesar -0,018 bernilai negatif, artinya apabila dewan direksi (DD) naik satu satuan maka akan menurunkan

pengungkapan *sustainability report* (Y) sebesar -0,018 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.

- 8) Nilai koefisien *governance committee* (GC) sebesar -0,029 bernilai negatif, artinya apabila *governance committee* (GC) naik satu satuan maka akan menurunkan pengungkapan *sustainability report* (Y) sebesar -0,029 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.

4.1.5 Uji Goodness of Fit

Uji *goodness of fit* atau uji kelayakan model digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual. Secara statistik uji *goodness of fit* dapat dilakukan melalui pengukuran nilai koefisien determinasi dan nilai statistik F.

4.1.5.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji *Goodness of Fit* dilakukan dengan menggunakan uji F yaitu untuk menguji apakah laba bersih, perubahan hutang, piutang, persediaan, beban depresiasi dan arus kas dari aktivitas operasi berpengaruh terhadap arus kas operasi masa depan. Hasil uji F sebagai berikut :

Tabel 4.9
Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.188	7	.027	3.364	.003 ^b
	Residual	.632	79	.008		
	Total	.821	86			

a. Dependent Variable: SR

b. Predictors: (Constant), GC, KA, ROA, DD, DER, TYPE, SIZE

Hasil pengolahan data terlihat nilai F sebesar 3,364 dengan signifikansi sebesar 0,003. Hal ini berarti nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa profitabilitas (ROA), *leverage* (DER), ukuran perusahaan (SIZE), tipe industri (TYPE), komite audit (KA), dewan direksi (DD) dan *governance committee* (GC) secara keseluruhan berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

4.1.5.2 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, tipe industri, komite audit, dewan direksi dan *governance committee* terhadap pengungkapan *sustainability report*. Nilai koefisien determinasi ditunjukkan dengan nilai adjusted R-square.

Tabel 4.10
Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.479 ^a	.230	.161	.08945

a. Predictors: (Constant), GC, KA, ROA, DD, DER, TYPE, SIZE

b. Dependent Variable: SR

Pada tabel 4.10 dapat diketahui nilai adjusted R square adalah sebesar 0,161 atau 16,1%. Hal ini berarti bahwa variabel profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, tipe industri, komite audit, dewan direksi dan *governance committee* secara keseluruhan berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*

sebesar 16,1% sedangkan 83,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

4.1.6 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel laba bersih, perubahan hutang, piutang, persediaan, beban depresiasi, dan arus kas dari aktivitas operasi terhadap arus kas operasi masa depan. Secara statistik dapat diukur dengan uji F dan uji t. Perhitungan statistik dikatakan signifikan secara statistik apabila nilai uji berada dalam daerah H_0 ditolak, dan sebaliknya dikatakan tidak signifikan apabila berada di dalam daerah H_0 diterima.

4.1.6.1 Uji Parsial (Uji t)

Pengujian statistik t bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh individual antara variabel laba bersih, perubahan hutang, piutang, persediaan, beban depresiasi dan arus kas dari aktivitas operasi terhadap arus kas operasi masa depan. Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi dengan $\alpha = 0,05$. Hasil pengujian dan pembahasan disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.11
Uji t

Coefficients

Model		T	Sig.
1	(Constant)	.721	.473
	ROA	1.604	.113
	DER	.277	.783
	SIZE	.638	.525
	TYPE	-.327	.744
	KA	3.151	.002
	DD	-2.288	.025
	GC	-1.162	.249

a. Dependent Variable: Pengungkapan *Sustainability R*

1) Pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *sustainability report*

Pengujian hipotesis yang pertama adalah untuk menguji apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Hasil pengujian menunjukkan nilai t sebesar 1.604 dengan tingkat signifikan sebesar 0,473 lebih besar dibandingkan 0,05. Dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Sehingga hipotesis pertama yaitu profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report* diterima.

2) Pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan *sustainability report*

Pengujian hipotesis yang kedua adalah untuk menguji apakah *leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Hasil pengujian menunjukkan nilai t sebesar 0,277 dengan tingkat signifikan sebesar 0,113 lebih besar dibandingkan 0,05. Dapat disimpulkan bahwa

leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Sehingga hipotesis kedua *leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *sustainability report* **ditolak**.

- 3) Pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *sustainability report*
Pengujian hipotesis yang ketiga adalah untuk menguji apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Hasil pengujian menunjukkan nilai t sebesar 0,638 dengan tingkat signifikan sebesar 0,525 lebih besar dibandingkan 0,05. Dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Sehingga hipotesis ketiga ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report* **diterima**.
- 4) Pengaruh tipe industri terhadap pengungkapan *sustainability report*
Pengujian hipotesis yang keempat adalah untuk menguji apakah tipe industri berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Hasil pengujian menunjukkan nilai t sebesar -0,327 dengan tingkat signifikan sebesar 0,744 lebih besar dibandingkan 0,05. Dapat disimpulkan bahwa tipe industri berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Sehingga hipotesis ketiga tipe industri berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *sustainability report* **diterima**.
- 5) Pengaruh komite audit terhadap pengungkapan *sustainability report*
Pengujian hipotesis yang kelima adalah untuk menguji apakah komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Hasil

pengujian menunjukkan nilai t sebesar 3,151 dengan tingkat signifikan sebesar 0,002 lebih kecil dibandingkan 0,05. Dapat disimpulkan bahwa komite audit berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Sehingga hipotesis kelima komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report* diterima.

6) Pengaruh dewan direksi terhadap pengungkapan *sustainability report*

Pengujian hipotesis yang keenam adalah untuk menguji apakah dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Hasil pengujian menunjukkan nilai t sebesar -2,288 dengan tingkat signifikan sebesar 0,025 lebih kecil dibandingkan 0,05. Dapat disimpulkan bahwa dewan direksi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Sehingga hipotesis keenam dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report* ditolak.

7) Pengaruh *governance committee* terhadap pengungkapan *sustainability report*

Pengujian hipotesis yang kelima adalah untuk menguji apakah *governance committee* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Hasil pengujian menunjukkan nilai t sebesar -1,162 dengan tingkat signifikan sebesar 0,249 lebih besar dibandingkan 0,05. Dapat disimpulkan bahwa *governance committee* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Sehingga hipotesis ketujuh

governance committee berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report* ditolak.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, tipe industry, komite audit, dewan direksi, dan *governance committee* terhadap pengungkapan *sustainability report* tahun 2018 sampai 2020 dilakukan pembahasan sebagai berikut :

4.2.1 Pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *sustainability report*

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa profitabilitas menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report* sehingga hipotesis diterima. Hasil tersebut menunjukkan apabila nilai profitabilitas semakin tinggi ataupun semakin rendah maka akan berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Hasil pengujian hipotesis tersebut berarti mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wanda Adila dan Erizal Syofyan (2016) dan I Syakirli (2019) yang menemukan dan mendukung bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report* akan tetapi penelitian tersebut tidak sejalan dengan Doktoralina (2018) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori *stakeholder* karena pada hasil tersebut menunjukkan bahwa informasi mengenai rasio profitabilitas yang tinggi

mendapatkan kepercayaan dari para *stakeholder* sehingga perusahaan akan lebih banyak mengungkapkan informasi termasuk pengungkapan *sustainability report*.

4.2.2 Pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan *sustainability report*

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa *leverage* menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report* sehingga hipotesis diterima. Hasil tersebut menunjukkan apabila nilai *leverage* semakin tinggi maka akan berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Hasil pengujian hipotesis tersebut berarti mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ria Aniktia (2015) dan Azwir Nasir et al (2014) yang menyatakan bahwa perusahaan dengan rasio *leverage* tinggi berusaha untuk mendapatkan legitimasi dari *stakeholder* melalui pengungkapan *sustainability report*. Yi dan Yu (dalam Ria Aniktia, 2015) menyatakan bahwa semakin banyak investor yang menjadikan laporan keberlanjutan sebagai pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan, karena melalui pengungkapan *sustainability report* dapat mengalihkan perhatian terhadap rasio utang perusahaan yang tinggi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori *stakeholder* karena pada hasil tersebut menunjukkan bahwa informasi mengenai rasio *leverage* yang tinggi dapat menjadi bahan pertimbangan para *stakeholder* dalam mengambil keputusan untuk memberikan dukungan sehingga perusahaan juga termotivasi untuk mengungkapkan lebih banyak informasi salah satunya melalui pengungkapan *sustainability report*.

4.2.3 Pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *sustainability report*

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa ukuran perusahaan menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report* sehingga hipotesis diterima. Hasil tersebut menunjukkan apabila nilai ukuran perusahaan semakin tinggi maka akan berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Hasil pengujian hipotesis tersebut berarti mendukung penelitian yang dilakukan oleh Anggiyani dan Yanto (2016) serta Marwati dan Yulianti (2015) yang menyatakan bahwa semakin besar suatu perusahaan maka total asset yang dimiliki juga semakin besar sehingga kebijakan untuk mengungkapkan laporan keberlanjutan juga semakin besar. Jadi ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori legitimasi karena pada hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka cenderung untuk mengupayakan legitimasi dari masyarakat dengan mengungkapkan informasi yang berhubungan dengan organisasi sosial, komunitas masyarakat dan lingkungan. Salah satu caranya dengan mengungkapkan informasi tersebut ke dalam laporan keberlanjutan atau *sustainability report* sebagai perwujudan akuntabilitas perusahaan terhadap publik untuk menjelaskan dampak sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan baik dalam aspek positif maupun negatif.

4.2.4 Pengaruh tipe industri terhadap pengungkapan *sustainability report*

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa tipe industri menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report* sehingga hipotesis diterima. Hasil tersebut menunjukkan apapun tipe industri perusahaan baik tergolong *high industri* maupun *low industri* maka tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Hasil pengujian hipotesis tersebut berarti mendukung penelitian yang dilakukan oleh Syakirli (2019) yaitu berdasarkan Undang Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 Ayat 1, yang mengatur tentang kesadaran akan perlunya menjaga lingkungan, menyatakan bahwa “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab social dan lingkungan”. Hal ini menunjukkan bahwa baik perusahaan *high profile* maupun *low profile* maka akan tetap mengungkapkan *sustainability report* yang didasarkan atas peraturan tersebut dan kesadaran manajemen.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori legitimasi karena pada hasil tersebut menunjukkan bahwa untuk mengupayakan legitimasi dari masyarakat baik perusahaan *high profile* maupun *low profile* akan mengungkapkan informasi yang berhubungan dengan organisasi sosial, komunitas masyarakat dan lingkungan sebagai bentuk akuntabilitas perusahaan terhadap publik.

4.2.5 Pengaruh komite audit terhadap pengungkapan *sustainability report*

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa komite audit menunjukkan pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pengungkapan

sustainability report sehingga hipotesis diterima. Hasil tersebut menunjukkan semakin tinggi frekuensi rapat komite audit maka akan berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Hasil pengujian hipotesis tersebut mendukung penelitian yang dilakukan oleh Aniktia & Khafid (2015) yang menunjukkan bahwa komite audit mampu mendorong manajemen untuk mengungkapkan lebih banyak informasi terkait *sustainability report* melalui jumlah pertemuan/rapat yang dilakukan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori legitimasi karena pada hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagai upaya untuk memperoleh legitimasi dari para *stakeholder* sebagai media komunikasi perusahaan dengan melaksanakan *good corporate governance* melalui jumlah pertemuan yang dilakukan.

4.2.6 Pengaruh dewan direksi terhadap pengungkapan *sustainability report*

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dewan direksi menunjukkan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report* sehingga hipotesis ditolak. Hasil tersebut menunjukkan semakin banyak jumlah anggota dewan direksi maka tidak akan berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Hasil pengujian hipotesis tersebut mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hasanah et al (2015) dan Nasir et al (2014) yang menunjukkan bahwa dewan direksi lebih mengutamakan mengungkapkan informasi yang bersifat wajib yaitu

laporan tahunan dibandingkan pengungkapan *sustainability report* karena bersifat sukarela.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori *stakeholder* karena pada hasil tersebut menunjukkan perusahaan mengutamakan untuk mengungkapkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang bersifat wajib kepada *stakeholder* agar dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk terus mendukung keberlangsungan perusahaan.

4.2.7 Pengaruh *governance committee* terhadap pengungkapan *sustainability report*

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa *governance committee* menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report* sehingga hipotesis ditolak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pembentukan *governance committee* dalam suatu perusahaan tidak akan berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Hasil pengujian hipotesis tersebut mendukung penelitian yang dilakukan oleh Pratama dan Yulianto (2015) dan Suryono dan Prastiwi (2011) yang menunjukkan bahwa belum terdapat peraturan atau standar baku yang kompeten dalam pembentukan *governance committee* sehingga banyak perusahaan yang belum memiliki kesadaran tentang pentingnya pembentukan *governance committee*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori *stakeholder* untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* yaitu dengan

membentuk organ-organ utama perusahaan yaitu RUPS, dewan komisaris dan dewan direksi serta komite audit secara efektif sesuai pedoman dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sehingga dapat meyakinkan *stakeholder* bahwa pengelolaan perusahaan telah dilakukan dengan baik sesuai aturan yang berlaku. Sedangkan pembentukan *governance committee* bukan merupakan salah satu organ utama dalam pelaksanaan *good corporate governance*, jadi tidak semua perusahaan memilih untuk membentuk *governance committee*.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Profitabilitas terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Hasil penelitian ini menunjukkan apabila nilai profitabilitas semakin tinggi maka tingkat pengungkapan *sustainability report* oleh perusahaan akan semakin tinggi juga.
- 2) *Leverage* terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Hasil penelitian ini menunjukkan apabila *leverage* semakin tinggi maka akan berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* yang semakin tinggi.
- 3) Ukuran perusahaan terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Hasil penelitian ini menunjukkan apabila ukuran perusahaan semakin besar maka tingkat pengungkapan *sustainability report* juga akan semakin tinggi.
- 4) Tipe industri terbukti tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Hasil penelitian ini menunjukkan perusahaan baik tergolong tipe industri *high profile* maupun *low profile* maka tidak akan berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

- 5) Komite audit terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Hasil penelitian ini menunjukkan apabila frekuensi rapat komite audit semakin tinggi maka akan meningkatkan pengungkapan *sustainability report*.
- 6) Dewan direksi terbukti tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah anggota dewan direksi maka tidak akan berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.
- 7) *Governance Committee* terbukti tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang mendirikan *governance committee* tidak akan berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

5.2 Keterbatasan Penulisan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam penelitian selanjutnya. Keterbatasan tersebut antara lain sebagai berikut :

- 1) Data untuk perhitungan profitabilitas yaitu laba bersih yang digunakan merupakan data laba bersih semua perusahaan baik itu laba positif atau laba negatif (mengalami kerugian).
- 2) Penelitian ini hanya berfokus pada pengaruh variabel ROA, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Tipe Industri, Komite Audit, Dewan Direksi, dan *Governance Committee* terhadap pengaruh pengungkapan *sustainability report*. Namun, analisis penelitian ini hanya menghasilkan *Adjusted R Square*

sebesar 16,1%, sehingga masih banyak variabel lain yang belum dimasukkan ke dalam model.

- 3) Standar yang digunakan perusahaan untuk mengungkapkan komponen sustainability report adalah gabungan antara GRI dan POJK 51/POJK.03/2017 sehingga tidak semua komponen di GRI diungkapkan oleh perusahaan.

5.3 Saran

Mendasarkan pada keterbatasan-keterbatasan pada penelitian ini, maka saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

- 1) Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan data laba bersih dari perusahaan yang memiliki laba positif.
- 2) Berdasarkan hasil uji *Adjusted R Square* dapat diketahui bahwa masih terdapat 83,9% variabel yang belum dimasukkan ke dalam model penelitian ini, sehingga disarankan peneliti selanjutnya dapat menambahkan atau menguji beberapa variabel lain diluar variabel penelitian ini yang diduga memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* seperti struktur modal, kinerja keuangan perusahaan dan lain-lain.
- 3) Walaupun di Indonesia pengungkapan *sustainability report* masih bersifat sukarela, OJK sebagai regulator pasar saham sebaiknya membuat regulasi yang jelas terhadap komponen-komponen wajib yang harus diungkapkan dalam *sustainability report* sehingga terdapat keseragaman dalam pengungkapan informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adila, W., & Syofyan, E. (2016). Pengaruh Corporate Governance dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sustainability Report: Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI tahun 2010-2014. *Wahana Riset Akuntansi*, 4(2), 777-792.
- Anggiyani, S.W., & Yanto, H. (2017). Determinan Pengungkapan Sustainability Report Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 5(2), 1-10.
- Aniktia, R., & Khafid, M. (2015). Pengaruh mekanisme good corporate governance dan kinerja keuangan terhadap pengungkapan sustainability report. *Accounting Analysis Journal*, 4(3).
- Anindita, M. Y. K. P. (2014). Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas dan tipe industri terhadap pengungkapan sukarela pelaporan keberlanjutan. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 1-15.
- Bursa Efek Indonesia. 2019. Laporan Keuangan Tahunan 2018, 2019, dan 2020. Diakses melalui <<http://www.idx.co.id>> [04/09/2020]
- Ghozali, I dan Anis Chariri. 2007. *Teori Akuntansi edisi 3*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hasanah, N. M., Syam, D., & Jati, A. W. (2015). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Sustainability Report Pada Perusahaan Di Indonesia. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 5(1).
- Idah, I. (2013). Corporate Governance Dan Karakteristik Perusahaan Dalam Pengungkapan Sustainability Report. *Accounting Analysis Journal*, 2(3).
- Marwati, C. P., & Yulianti, Y. (2015). Analisis Pengungkapan Sustainability Report Pada Perusahaan Non-Keuangan Tahun 2009-2013. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 7(2), 167-181.
- Nasir, A, Elfi Ilham, Vadelia Irna Utara. 2014. Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Governance terhadap Pengungkapan Sustainability Report pada Perusahaan LQ45 yang Terdaftar. *Jurnal Ekonomi*. Volume 22, Nomor 1 Tahun 2014.

- Pratama, A., & Yulianto, A. (2015). Faktor Keuangan Dan Corporate Governance Sebagai Penentu Pengungkapan Sustainability Report. *Accounting Analysis Journal*, 4(2).
- Riza, W. Y. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Struktur Modal, Dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sustainability Reporting (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar di BEI selama periode 2013-2015). *Jurnal Akuntansi*, 5(2).
- Safitri, M., & Saifudin, S. (2019). Implikasi Karakteristik Perusahaan dan Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Sustainability Report. *JBE (Jurnal Bingkai Ekonomi)*, 4(1), 13-25.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryono, H., dan A. Prastiwi. 2011. Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Governance terhadap Praktik Pengungkapan Sustainability Report. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XIV*.
- Syakirli, I., Cheisviyanny, C., & Halmawati, H. (2019). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sustainability Reporting. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 277-289.



LAMPIRAN



Lampiran 1

Daftar Populasi dan Sampel Perusahaan Indeks Kompas100

No	Kode	Nama Perusahaan	Kriteria 1	Kriteria 2			Kriteria 3	Sampel
				2018	2019	2020		
1	AALI	Astra Agro Lestari Tbk	√	√	√	√	√	1
2	ACES	Ace Hardware Indonesia Tbk	√	X	√	X	√	-
3	ADHI	Adhi Karya (Persero) Tbk	√	√	√	√	√	2
4	ADRO	Adaro Energy Tbk	√	X	√	X	X	-
5	AKRA	AKR Corporindo Tbk	√	√	√	√	√	3
6	ANTM	Aneka Tambang Tbk	√	√	√	√	√	4
7	APLN	Agung Podomoro Land Tbk	√	X	X	X	√	-
8	ASII	Astra International Tbk	√	√	√	√	√	5
9	ASSA	Adi Sarana Armada Tbk	√	X	X	X	√	-
10	BBCA	Bank Central Asia Tbk	√	√	√	√	√	6
11	BBKP	Bank Bukopin Tbk	√	X	X	√	√	-
12	BBNI	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	√	√	√	√	√	7
13	BBRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	√	√	√	√	√	8
14	BBTN	Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	√	√	√	√	√	9
15	BDMN	Bank Danamon Indonesia Tbk	√	X	X	√	√	-
16	BEST	Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk	√	X	X	X	√	-

17	BJBR	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	√	√	√	√	√	10
18	BJTM	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	√	√	√	√	√	11
19	BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk	√	√	√	√	√	12
20	BMTR	Global Mediacom Tbk	√	X	X	X	√	-
21	BNLI	Bank Permata Tbk	√	√	√	√	√	13
22	BRIS	Bank BRI Syariah Tbk	√	X	X	X	√	-
23	BRPT	Barito Pacific Tbk	√	X	X	X	√	-
24	BSDE	Bumi Serpong Damai Tbk	√	X	X	X	√	-
25	BTPS	Bank BTPN Syariah Tbk	√	X	X	√	√	-
26	BULL	Buana Lintas Lautan Tbk	√	X	X	X	√	-
27	CLEO	Sariguna Primatirta Tbk	√	X	X	X	√	-
28	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk	√	X	X	X	√	-
29	CTRA	Ciputra Development Tbk	√	X	X	√	X	-
30	DMAS	Puradelta Lestari Tbk	√	X	X	√	√	-
31	ELSA	Elnusa Tbk	√	√	√	√	√	14
32	ERAA	Erajaya Swasembada Tbk	√	X	X	X	√	-
33	EXCL	XL Axiata Tbk	√	√	√	√	√	15
34	GGRM	Gudang Garam Tbk	√	X	X	X	√	-
35	GIAA	Garuda Indonesia (Persero) Tbk	√	X	√	X	√	-
36	HKMU	HK Metals Utama Tbk	√	X	X	X	√	-
37	HMSP	H.M. Sampoerna Tbk	√	X	X	X	√	-

38	HOKI	Buyung Poetra Sembada Tbk	√	X	X	X	√	-
39	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	√	X	X	X	√	-
40	INAF	Indofarma Tbk	√	X	X	X	√	-
41	INCO	Vale Indonesia Tbk	√	√	√	√	X	-
42	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk	√	X	X	X	√	-
43	INDY	Indika Energy Tbk	√	√	√	√	X	-
44	INKP	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	√	√	X	X	√	-
45	INTP	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	√	√	√	√	√	16
46	ISAT	Indosat Tbk	√	X	X	X	√	-
47	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk	√	√	√	√	X	-
48	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk	√	√	√	√	√	17
49	JRPT	Jaya Real Property Tbk	√	X	X	X	√	-
50	JSMR	Jasa Marga (Persero) Tbk	√	√	√	√	√	18
51	KAEF	Kimia Farma Tbk	√	X	X	√	√	-
52	KBLI	KMI Wire & Cable Tbk	√	X	X	X	√	-
53	KINO	Kino Indonesia Tbk	√	X	X	X	√	-
54	KLBF	Kalbe Farma Tbk	√	√	√	√	√	19
55	LINK	Link Net Tbk	√	X	X	X	√	-
56	LPKR	Lippo Karawaci Tbk	√	X	X	X	√	-
57	LPPF	Matahari Department Store Tbk	√	X	X	X	√	-
58	LSIP	PP London Sumatra Indonesia Tbk	√	√	√	√	√	20
59	MAIN	Malindo Feedmill Tbk	√	X	X	X	√	-
60	MAPI	Mitra Adiperkasa Tbk	√	X	X	X	√	-

61	MDKA	Merdeka Copper Gold Tbk	√	X	X	X	√	-
62	MEDC	Medco Energi Internasional Tbk	√	√	√	√	X	-
63	MIKA	Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	√	X	X	X	√	-
64	MNCN	Media Nusantara Citra Tbk	√	X	X	X	√	-
65	MTDL	Metrodata Electronics Tbk	√	X	X	X	√	-
66	MYOR	Mayora Indah Tbk	√	X	X	X	√	-
67	PGAS	Perusahaan Gas Negara Tbk	√	√	√	√	X	-
68	PNBN	Bank Pan Indonesia Tbk	√	X	√	X	√	-
69	PNLF	Panin Financial Tbk	√	X	X	X	√	-
70	PSAB	J Resources Asia Pasifik Tbk	√	X	X	X	X	-
71	PTBA	Bukit Asam Tbk	√	√	√	√	√	21
72	PTPP	PP (Persero) Tbk	√	√	√	√	√	22
73	PWON	Pakuwon Jati Tbk	√	X	X	√	√	-
74	RALS	Ramayana Lestari Sentosa Tbk	√	X	X	X	√	-
75	SCMA	Surya Citra Media Tbk	√	X	X	X	√	-
76	SIDO	Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk	√	X	X	√	√	-
77	SILO	Siloam International Hospitals Tbk	√	X	√	√	√	-
78	SIMP	Salim Ivomas Pratama Tbk	√	√	√	X	√	-
79	SMBR	Semen Baturaja (Persero) Tbk	√	X	X	X	√	-
80	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk	√	√	√	√	√	23
81	SMRA	Summarecon Agung Tbk	√	X	X	X	√	-
82	SMSM	Selamat Sempurna Tbk	√	X	X	X	√	-

83	SPTO	Surya Pertiwi Tbk	√	X	X	X	√	-
84	SRIL	Sri Rejeki Isman Tbk	√	X	X	X	√	-
85	SSIA	Surya Semesta Internusa Tbk	√	X	X	X	√	-
86	SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk	√	√	√	X	√	-
87	TBIG	Tower Bersama Infrastructure Tbk	√	X	√	√	√	-
88	TINS	Timah Tbk	√	√	√	√	√	24
89	TKIM	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	√	X	X	X	√	-
90	TLKM	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	√	X	X	√	√	-
91	TOWR	Sarana Menara Nusantara Tbk	√	X	X	X	√	-
92	TPIA	Chandra Asri Petrochemical Tbk	√	X	X	X	X	-
93	UNTR	United Tractors Tbk	√	√	√	√	√	25
94	UNVR	Unilever Indonesia Tbk	√	√	√	√	√	26
95	WEGE	Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	√	X	X	X	√	-
96	WIKA	Wijaya Karya (Persero) Tbk	√	√	√	√	√	27
97	WOOD	Integra Indocabinet Tbk	√	X	X	X	√	-
98	WSBP	Waskita Beton Precast Tbk	√	√	√	√	√	28
99	WSKT	Waskita Karya (Persero) Tbk	√	√	√	√	√	29
100	WTON	Wijaya Karya Beton Tbk	√	√	√	√	√	30

Ket:

√ : Memenuhi kriteria

X : Tidak memenuhi kriteria



Lampiran 2

Hasil Perhitungan Variabel *Return On Asset (ROA)*

No	Kode	Nama Perusahaan	Tahun	Laba Bersih (Rp)	Total Aset (Rp)	ROA (%)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (e/f*100%)
1	AALI	Astra Agro Lestari Tbk	2018	1.520.723.000.000	26.856.967.000.000	5,662
			2019	243.629.000.000	26.974.124.000.000	0,903
			2020	893.779.000.000	27.781.231.000.000	3,217
2	ADHI	Adhi Karya Persero	2018	645.029.449.105	30.091.600.973.297	2,144
			2019	665.048.421.529	36.515.833.214.549	1,821
			2020	237.026.524.477	38.093.888.626.552	0,622
3	AKRA	AKR Coorindo Tbk	2018	1.596.652.821.000	19.940.850.599.000	8,007
			2019	703.077.279.000	21.409.046.173.000	3,284
			2020	961.997.313.000	18.683.572.815.000	5,149
4	ANTM	Aneka Tambang (Persero) Tbk	2018	1.636.002.591.000	32.195.350.845.000	5,081
			2019	193.852.031.000	30.194.907.730.000	0,642
			2020	1.149.353.693.000	31.729.512.995.000	3,622
5	ASII	Astra International Tbk	2018	27.372.000.000.000	344.711.000.000.000	7,941
			2019	26.621.000.000.000	351.958.000.000.000	7,564
			2020	18.571.000.000.000	338.203.000.000.000	5,491
6	BBCA	Bank Central Asia Tbk	2018	25.851.660.000.000	824.787.944.000.000	3,134
			2019	28.569.974.000.000	918.989.312.000.000	3,109
			2020	27.147.109.000.000	1.075.570.256.000.000	2,524
7	BBNI	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2018	15.091.763.000.000	808.572.011.000.000	1,866
			2019	15.508.583.000.000	845.605.208.000.000	1,834
			2020	3.321.442.000.000	891.337.425.000.000	0,373
8	BBRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2018	32.418.486.000.000	1.296.898.292.000.000	2,500
			2019	34.413.825.000.000	1.416.758.840.000.000	2,429
			2020	18.660.393.000.000	1.511.804.628.000.000	1,234
9	BBTN	Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2018	2.807.923.000.000	306.436.194.000.000	0,916
			2019	209.263.000.000	311.776.828.000.000	0,067
			2020	1.602.358.000.000	361.208.406.000.000	0,444
10	BJBR	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	2018	1.552.396.000.000	120.191.387.000.000	1,292
			2019	1.564.492.000.000	123.536.474.000.000	1,266
			2020	1.689.996.000.000	140.934.002.000.000	1,199
11	BJTM	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	2018	1.260.308.000.000	62.689.118.000.000	2,010
			2019	1.376.505.000.000	76.715.290.000.000	1,794
			2020	1.488.962.000.000	83.619.452.000.000	1,781
12	BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk	2018	25.851.937.000.000	1.202.252.094.000.000	2,150
			2019	28.455.592.000.000	1.318.246.335.000.000	2,159
			2020	17.645.624.000.000	1.429.334.484.000.000	1,235
13	BNLI	Bank Permata Tbk	2018	901.252.000.000	152.892.866.000.000	0,589
			2019	1.500.420.000.000	161.451.259.000.000	0,929
			2020	721.587.000.000	197.726.097.000.000	0,365
14	ELSA	Elnusa Tbk	2018	276.316.000.000	5.657.327.000.000	4,884

			2019	356.477.000.000	6.805.037.000.000	5,238
			2020	249.085.000.000	7.562.822.000.000	3,294
15	EXCL	XL Axiata Tbk	2018	-3.296.890.000.000	57.613.954.000.000	-5,722
			2019	712.579.000.000	62.725.242.000.000	1,136
			2020	371.598.000.000	67.744.797.000.000	0,549
16	INTP	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	2018	1.145.937.000.000	27.788.562.000.000	4,124
			2019	1.835.305.000.000	27.707.749.000.000	6,624
			2020	1.806.337.000.000	27.344.672.000.000	6,606
17	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk	2018	2.253.201.000.000	23.038.028.000.000	9,780
			2019	1.793.914.000.000	26.650.895.000.000	6,731
			2020	1.221.904.000.000	25.951.760.000.000	4,708
18	JSMR	Jasa Marga (Persero) Tbk	2018	2.036.493.000.000	82.418.603.000.000	2,471
			2019	2.073.888.000.000	99.679.570.000.000	2,081
			2020	-41.629.000.000	104.086.646.000.000	-0,040
19	KLBF	Kalbe Farma Tbk	2018	2.497.261.964.757	18.146.206.145.369	13,762
			2019	2.537.601.823.645	20.264.726.862.584	12,522
			2020	2.799.622.515.814	22.564.300.317.374	12,407
20	LSIP	PP London Sumatra Indonesia Tbk	2018	329.426.000.000	10.037.294.000.000	3,282
			2019	252.630.000.000	10.225.322.000.000	2,471
			2020	695.490.000.000	10.922.788.000.000	6,367
21	PTBA	Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	2018	5.121.112.000.000	24.172.933.000.000	21,185
			2019	4.040.394.000.000	26.098.052.000.000	15,482
			2020	2.407.927.000.000	24.056.755.000.000	10,009
22	PTPP	PP Persero	2018	1.958.993.059.360	52.549.150.902.972	3,728
			2019	1.048.153.079.883	56.130.526.187.076	1,867
			2020	266.269.870.851	53.472.450.650.976	0,498
23	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk	2018	3.085.704.000.000	50.783.836.000.000	6,076
			2019	2.371.233.000.000	79.807.067.000.000	2,971
			2020	2.674.343.000.000	78.006.244.000.000	3,428
24	TINS	Timah Persero	2018	132.285.000.000	15.220.685.000.000	0,869
			2019	-611.284.000.000	20.361.278.000.000	-3,002
			2020	-340.602.000.000	14.517.700.000.000	-2,346
25	UNTR	United Tractors Tbk	2018	11.498.409.000.000	116.281.017.000.000	9,888
			2019	11.134.641.000.000	111.713.375.000.000	9,967
			2020	5.632.425.000.000	99.800.963.000.000	5,644
26	UNVR	Unilever Indonesia Tbk	2018	9.081.187.000.000	20.326.869.000.000	44,676
			2019	7.392.837.000.000	20.649.371.000.000	35,802
			2020	7.163.536.000.000	20.534.632.000.000	34,885
27	WIKA	Wijaya Karya (Persero) Tbk	2018	2.073.299.864.000	59.230.001.239.000	3,500
			2019	2.621.015.140.000	42.335.471.858.000	6,191
			2020	322.342.513.000	62.110.847.154.000	0,519
28	WSBP	Waskita Beton Precast Tbk	2018	1.103.472.788.182	15.222.388.589.814	7,249
			2019	806.148.752.926	16.149.121.684.330	4,992
			2020	-4.759.958.927.543	10.557.550.739.243	-45,086
29	WSKT	Waskita Karya (Persero) Tbk	2018	4.619.567.705.553	124.391.581.623.636	3,714
			2019	1.028.898.367.891	122.589.259.350.571	0,839
			2020	-9.495.726.146.546	105.588.960.060.005	-8,993
30	WTON	Wijaya Karya Beton Tbk	2018	486.640.174.453	8.881.778.299.672	5,479
			2019	510.711.733.403	10.337.895.087.207	4,940
			2020	123.147.079.420	8.509.017.299.594	1,447

Lampiran 3

Hasil Perhitungan Variabel *Debt to Equity* (DER)

No	Kode	Nama Perusahaan	Tahun	Total Hutang (Rp)	Total Ekuitas (Rp)	DER (%)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (e/f*100%)
1	AALI	Astra Agro Lestari Tbk	2018	7.382.445.000.000	19.474.522.000.000	37,908
			2019	7.995.597.000.000	18.978.527.000.000	42,130
			2020	8.533.437.000.000	19.247.794.000.000	44,335
2	ADHI	Adhi Karya Persero	2018	23.806.329.077.039	6.285.271.896.258	378,764
			2019	29.681.535.534.528	6.834.297.680.021	434,303
			2020	32.519.078.179.194	5.574.810.447.358	583,322
3	AKRA	AKR Coorindo Tbk	2018	10.014.019.260.000	9.926.831.339.000	100,878
			2019	11.342.184.833.000	10.066.861.340.000	112,669
			2020	8.127.216.543.000	10.556.356.272.000	76,989
4	ANTM	Aneka Tambang (Persero) Tbk	2018	13.746.984.554.000	18.448.366.291.000	74,516
			2019	12.061.488.555.000	18.133.419.175.000	66,515
			2020	12.690.063.970.000	19.039.449.025.000	66,651
5	ASII	Astra International Tbk	2018	170.348.000.000.000	174.363.000.000.000	97,697
			2019	165.195.000.000.000	186.763.000.000.000	88,452
			2020	142.749.000.000.000	195.454.000.000.000	73,035
6	BBCA	Bank Central Asia Tbk	2018	668.438.779.000.000	151.753.427.000.000	440,477
			2019	740.067.127.000.000	174.143.156.000.000	424,976
			2020	885.537.919.000.000	184.714.709.000.000	479,408
7	BBNI	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2018	671.237.546.000.000	110.373.789.000.000	608,149
			2019	688.489.442.000.000	125.003.948.000.000	550,774
			2020	746.235.663.000.000	112.872.199.000.000	661,133
8	BBRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2018	1.090.664.084.000.000	185.275.331.000.000	588,672
			2019	1.183.155.670.000.000	208.784.336.000.000	566,688
			2020	1.278.346.276.000.000	199.911.376.000.000	639,456
9	BBTN	Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2018	263.784.017.000.000	23.840.448.000.000	1106,456
			2019	269.451.682.000.000	23.836.195.000.000	1130,431
			2020	321.376.142.000.000	19.987.845.000.000	1607,858
10	BJBR	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	2018	104.035.920.000.000	11.285.315.000.000	921,870
			2019	105.920.991.000.000	12.042.629.000.000	879,550
			2020	122.676.884.000.000	12.005.800.000.000	1021,813
11	BJTM	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	2018	54.217.182.000.000	8.471.936.000.000	639,962
			2019	67.529.638.000.000	9.185.652.000.000	735,164
			2020	73.614.504.000.000	10.004.948.000.000	735,781
12	BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk	2018	941.953.100.000.000	184.960.305.000.000	509,273
			2019	1.025.749.580.000.000	209.034.525.000.000	490,708
			2020	1.151.267.847.000.000	193.796.083.000.000	594,061
13	BNLI	Bank Permata Tbk	2018	130.440.930.000.000	22.451.936.000.000	580,979
			2019	137.413.908.000.000	24.037.351.000.000	571,668
			2020	162.654.644.000.000	35.071.453.000.000	463,781
14	ELSA	Elnusa Tbk	2018	2.357.127.000.000	3.300.200.000.000	71,424

			2019	3.228.339.000.000	3.576.698.000.000	90,260
			2020	3.821.876.000.000	3.740.946.000.000	102,163
15	EXCL	XL Axiata Tbk	2018	39.270.856.000.000	18.343.098.000.000	214,091
			2019	43.603.276.000.000	19.121.966.000.000	228,027
			2020	48.607.431.000.000	19.137.366.000.000	253,992
16	INTP	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	2018	4.566.973.000.000	23.221.589.000.000	19,667
			2019	4.627.488.000.000	23.080.261.000.000	20,050
			2020	5.168.424.000.000	22.176.248.000.000	23,306
17	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk	2018	12.823.219.000.000	10.214.809.000.000	125,536
			2019	14.754.081.000.000	11.896.814.000.000	124,017
			2020	14.539.790.000.000	25.951.760.000.000	56,026
18	JSMR	Jasa Marga (Persero) Tbk	2018	62.219.614.000.000	20.198.989.000.000	308,033
			2019	76.493.833.000.000	23.185.737.000.000	329,918
			2020	79.311.031.000.000	24.775.615.000.000	320,117
19	KLBF	Kalbe Farma Tbk	2018	2.851.611.349.015	15.294.594.796.354	18,645
			2019	3.559.144.386.553	16.705.582.476.031	21,305
			2020	4.288.218.173.294	18.276.082.144.080	23,464
20	LSIP	PP London Sumatra Indonesia Tbk	2018	1.705.175.000.000	8.332.119.000.000	20,465
			2019	1.726.822.000.000	8.498.500.000.000	20,319
			2020	1.636.456.000.000	9.286.332.000.000	17,622
21	PTBA	Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	2018	7.903.237.000.000	16.269.696.000.000	48,576
			2019	7.675.226.000.000	18.422.826.000.000	41,662
			2020	7.117.559.000.000	16.939.196.000.000	42,018
22	PTPP	PP Persero	2018	36.233.538.927.553	16.315.611.975.419	222,079
			2019	41.118.567.863.618	15.011.958.323.458	273,905
			2020	39.465.460.560.026	14.006.990.090.950	281,755
23	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk	2018	18.168.521.000.000	32.615.315.000.000	55,705
			2019	43.915.143.000.000	33.891.924.000.000	129,574
			2020	40.571.674.000.000	35.653.335.000.000	113,795
24	TINS	Timah Persero	2018	9.072.333.000.000	6.148.352.000.000	147,557
			2019	15.102.873.000.000	5.258.405.000.000	287,214
			2020	9.577.564.000.000	4.940.136.000.000	193,872
25	UNTR	United Tractors Tbk	2018	59.230.338.000.000	57.050.679.000.000	103,821
			2019	50.603.301.000.000	61.110.074.000.000	82,807
			2020	36.653.823.000.000	63.147.140.000.000	58,045
26	UNVR	Unilever Indonesia Tbk	2018	12.943.202.000.000	7.383.667.000.000	175,295
			2019	15.367.509.000.000	5.281.862.000.000	290,949
			2020	15.597.264.000.000	4.937.368.000.000	315,902
27	WIKA	Wijaya Karya (Persero) Tbk	2018	42.014.686.674.000	17.215.314.565.000	244,054
			2019	42.895.114.167.000	19.215.732.987.000	223,229
			2020	51.451.760.142.000	16.657.425.071.000	308,882
28	WSBP	Waskita Beton Precast Tbk	2018	7.340.075.399.350	7.882.313.190.464	93,121
			2019	8.014.571.097.975	8.134.550.586.355	98,525
			2020	9.400.121.261.159	10.557.550.739.243	89,037
29	WSKT	Waskita Karya (Persero) Tbk	2018	95.504.462.872.769	28.887.118.750.867	330,613
			2019	93.470.790.161.572	29.118.469.188.999	321,002
			2020	89.011.405.294.715	16.577.554.765.290	536,939
30	WTON	Wijaya Karya Beton Tbk	2018	5.744.966.289.467	3.136.812.010.205	183,147
			2019	6.829.449.147.200	3.508.445.940.007	194,657
			2020	5.118.444.300.470	3.390.572.999.124	150,961

Lampiran 4

Hasil Perhitungan Variabel Ukuran Perusahaan (Log Total Aset)

No	Kode	Nama Perusahaan	Tahun	Total Aset (Rp)	Size
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = ln (e)
1	AALI	Astra Agro Lestari Tbk	2018	26.856.967.000.000	30,922
			2019	26.974.124.000.000	30,926
			2020	27.781.231.000.000	30,955
2	ADHI	Adhi Karya Persero	2018	30.091.600.973.297	31,035
			2019	36.515.833.214.549	31,229
			2020	38.093.888.626.552	31,271
3	AKRA	AKR Coorindo Tbk	2018	19.940.850.599.000	30,624
			2019	21.409.046.173.000	30,695
			2020	18.683.572.815.000	30,559
4	ANTM	Aneka Tambang (Persero) Tbk	2018	32.195.350.845.000	31,103
			2019	30.194.907.730.000	31,039
			2020	31.729.512.995.000	31,088
5	ASII	Astra International Tbk	2018	344.711.000.000.000	33,474
			2019	351.958.000.000.000	33,495
			2020	338.203.000.000.000	33,455
6	BBCA	Bank Central Asia Tbk	2018	824.787.944.000.000	34,346
			2019	918.989.312.000.000	34,454
			2020	1.075.570.256.000.000	34,612
7	BBNI	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2018	808.572.011.000.000	34,326
			2019	845.605.208.000.000	34,371
			2020	891.337.425.000.000	34,424
8	BBRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2018	1.296.898.292.000.000	34,799
			2019	1.416.758.840.000.000	34,887
			2020	1.511.804.628.000.000	34,952
9	BBTN	Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2018	306.436.194.000.000	33,356
			2019	311.776.828.000.000	33,373
			2020	361.208.406.000.000	33,520
10	BJBR	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	2018	120.191.387.000.000	32,420
			2019	123.536.474.000.000	32,448
			2020	140.934.002.000.000	32,579
11	BJTM	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	2018	62.689.118.000.000	31,769
			2019	76.715.290.000.000	31,971
			2020	83.619.452.000.000	32,057
12	BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk	2018	1.202.252.094.000.000	34,723
			2019	1.318.246.335.000.000	34,815
			2020	1.429.334.484.000.000	34,896

13	BNLI	Bank Permata Tbk	2018	152.892.866.000.000	32,661
			2019	161.451.259.000.000	32,715
			2020	197.726.097.000.000	32,918
14	ELSA	Elnusa Tbk	2018	5.657.327.000.000	29,364
			2019	6.805.037.000.000	29,549
			2020	7.562.822.000.000	29,654
15	EXCL	XL Axiata Tbk	2018	57.613.954.000.000	31,685
			2019	62.725.242.000.000	31,770
			2020	67.744.797.000.000	31,847
16	INTP	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	2018	27.788.562.000.000	30,956
			2019	27.707.749.000.000	30,953
			2020	27.344.672.000.000	30,940
17	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk	2018	23.038.028.000.000	30,768
			2019	26.650.895.000.000	30,914
			2020	25.951.760.000.000	30,887
18	JSMR	Jasa Marga (Persero) Tbk	2018	82.418.603.000.000	32,043
			2019	99.679.570.000.000	32,233
			2020	104.086.646.000.000	32,276
19	KLBF	Kalbe Farma Tbk	2018	18.146.206.145.369	30,529
			2019	20.264.726.862.584	30,640
			2020	22.564.300.317.374	30,747
20	LSIP	PP London Sumatra Indonesia Tbk	2018	10.037.294.000.000	29,937
			2019	10.225.322.000.000	29,956
			2020	10.922.788.000.000	30,022
21	PTBA	Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	2018	24.172.933.000.000	30,816
			2019	26.098.052.000.000	30,893
			2020	24.056.755.000.000	30,811
22	PTPP	PP Persero	2018	52.549.150.902.972	31,593
			2019	56.130.526.187.076	31,659
			2020	53.472.450.650.976	31,610
23	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk	2018	50.783.836.000.000	31,559
			2019	79.807.067.000.000	32,011
			2020	78.006.244.000.000	31,988
24	TINS	Timah Persero	2018	15.220.685.000.000	30,354
			2019	20.361.278.000.000	30,645
			2020	14.517.700.000.000	30,306
25	UNTR	United Tractors Tbk	2018	116.281.017.000.000	32,387
			2019	111.713.375.000.000	32,347
			2020	99.800.963.000.000	32,234
26	UNVR	Unilever Indonesia Tbk	2018	20.326.869.000.000	30,643
			2019	20.649.371.000.000	30,659

			2020	20.534.632.000.000	30,653
27	WIKA	Wijaya Karya (Persero) Tbk	2018	59.230.001.239.000	31,712
			2019	42.335.471.858.000	31,377
			2020	62.110.847.154.000	31,760
28	WSBP	Waskita Beton Precast Tbk	2018	15.222.388.589.814	30,354
			2019	16.149.121.684.330	30,413
			2020	10.557.550.739.243	29,988
29	WSKT	Waskita Karya (Persero) Tbk	2018	124.391.581.623.636	32,454
			2019	122.589.259.350.571	32,440
			2020	105.588.960.060.005	32,291
30	WTON	Wijaya Karya Beton Tbk	2018	8.881.778.299.672	29,815
			2019	10.337.895.087.207	29,967
			2020	8.509.017.299.594	29,772

Lampiran 5

Hasil Perhitungan Variabel Ukuran Perusahaan (Log Total Aset)

No	Kode	Nama Perusahaan	Sektor Usaha	High Profile	Low Profile
1	AALI	Astra Agro Lestari	Agrobisnis	1	0
2	ADHI	Adhi Karya (Persero)	Properti & Konstruksi Bangunan	0	1
3	AKRA	AKR Corporindo	Perdagangan, Jasa & Investasi	0	1
4	ANTM	Aneka Tambang (Persero)	Pertambangan	1	0
5	ASII	Astra International	Aneka Industri	1	0
6	BBCA	Bank Central Asia	Finansial	0	1
7	BBNI	Bank Negara Indonesia (Persero)	Finansial	0	1
8	BBRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero)	Finansial	0	1
9	BBTN	Bank Tabungan Negara (Persero)	Finansial	0	1
10	BJBR	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	Finansial	0	1
11	BJTM	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Finansial	0	1

12	BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk	Finansial	0	1
13	BNLI	Bank Permata Tbk	Finansial	0	1
14	ELSA	Elnusa Tbk	Pertambangan	1	0
15	EXCL	XL Axiata Tbk	Infrastruktur & Transportasi	1	0
16	INTP	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	Industri Kimia	1	0
17	JPFA	JAPFA Comfeed Indonesia Tbk	Industri Kimia	1	0
18	JSMR	Jasa Marga (Persero) Tbk	Infrastruktur & Transportasi	1	0
19	KLBF	Kalbe Farma Tbk	Barang Konsumsi	0	1
20	LSIP	PP London Sumatra Indonesia Tbk	Agrobisnis	1	0
21	PTBA	Tambang Batubara Bukit Asam (Persero)	Pertambangan	1	0
22	PTPP	PP (Persero) Tbk	Properti & Konstruksi Bangunan	0	1
23	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk	Industri Kimia	1	0
24	TINS	Timah (Persero) Tbk	Pertambangan	1	0
25	UNTR	United Tractors Tbk	Perdagangan, Jasa & Investasi	0	1
26	UNVR	Unilever Indonesia Tbk	Barang Konsumsi	0	1
27	WIKA	Wijaya Karya (Persero) Tbk	Properti & Konstruksi Bangunan	0	1
28	WSBP	Waskita Beton Precast Tbk	Industri Kimia	1	0
29	WSKT	Waskita Karya (Persero) Tbk	Properti & Konstruksi Bangunan	0	1
30	WTON	Wijaya Karya Beton Tbk	Industri Kimia	1	0
	Jumlah			14	16

Lampiran 6

Hasil Perhitungan Variabel Frekuensi Rapat Komite Audit

No	Kode	Nama Perusahaan	2018 (kali)	2019 (kali)	2020 (kali)
1	AALI	Astra Agro Lestari	8	7	4
2	ADHI	Adhi Karya (Persero)	12	34	30
3	AKRA	AKR Corporindo	6	8	10
4	ANTM	Aneka Tambang (Persero)	28	43	26
5	ASII	Astra International	7	7	5
6	BBCA	Bank Central Asia	22	21	23
7	BBNI	Bank Negara Indonesia (Persero)	23	21	17
8	BBRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero)	16	18	24
9	BBTN	Bank Tabungan Negara (Persero)	9	12	23
10	BJBR	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	17	23	13
11	BJTM	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	8	8	6
12	BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk	21	18	21
13	BNLI	Bank Permata Tbk	12	10	11
14	ELSA	Elnusa Tbk	12	9	16
15	EXCL	XL Axiata Tbk	8	9	8
16	INTP	Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	4	4	4
17	JPFA	JAPFA Comfeed Indonesia Tbk	8	5	8
18	JSMR	Jasa Marga (Persero) Tbk	31	28	40
19	KLBF	Kalbe Farma Tbk	4	4	4
20	LSIP	PP London Sumatra Indonesia Tbk	6	7	7
21	PTBA	Tambang Batubara Bukit Asam (Persero)	25	42	32
22	PTPP	PP (Persero) Tbk	12	12	12
23	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk	22	12	18
24	TINS	Timah (Persero) Tbk	59	77	19
25	UNTR	United Tractors Tbk	4	4	4
26	UNVR	Unilever Indonesia Tbk	4	4	5
27	WIKA	Wijaya Karya (Persero) Tbk	37	24	28

28	WSBP	Waskita Beton Precast Tbk	24	13	19
29	WSKT	Waskita Karya (Persero) Tbk	19	19	29
30	WTON	Wijaya Karya Beton Tbk	5	5	4
		Jumlah	473	508	470

Lampiran 7

Hasil Perhitungan Variabel Jumlah Anggota Dewan Direksi

No	Kode	Nama Perusahaan	2018 (orang)	2019 (orang)	2020 (orang)
1	AALI	Astra Agro Lestari	7	7	7
2	ADHI	Adhi Karya (Persero)	6	6	6
3	AKRA	AKR Corporindo	8	8	7
4	ANTM	Aneka Tambang (Persero)	6	6	6
5	ASII	Astra International	10	11	9
6	BBCA	Bank Central Asia	12	11	12
7	BBNI	Bank Negara Indonesia (Persero)	11	11	12
8	BBRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero)	12	12	12
9	BBTN	Bank Tabungan Negara (Persero)	9	8	8
10	BJBR	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	6	6	7
11	BJTM	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	7	5	5
12	BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk	11	12	12
13	BNLI	Bank Permata Tbk	8	8	9
14	ELSA	Elnusa Tbk	5	4	4
15	EXCL	XL Axiata Tbk	5	5	6
16	INTP	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	9	9	9
17	JPFA	JAPFA Comfeed Indonesia Tbk	5	5	5
18	JSMR	Jasa Marga (Persero) Tbk	6	6	6
19	KLBF	Kalbe Farma Tbk	6	6	5
20	LSIP	PP London Sumatra Indonesia Tbk	5	6	6
21	PTBA	Tambang Batubara Bukit Asam (Persero)	6	6	6

22	PTPP	PP (Persero) Tbk	7	6	6
23	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk	7	7	7
24	TINS	Timah (Persero) Tbk	5	6	6
25	UNTR	United Tractors Tbk	7	6	6
26	UNVR	Unilever Indonesia Tbk	10	11	9
27	WIKA	Wijaya Karya (Persero) Tbk	7	7	7
28	WSBP	Waskita Beton Precast Tbk	5	5	5
29	WSKT	Waskita Karya (Persero) Tbk	7	8	7
30	WTON	Wijaya Karya Beton Tbk	7	6	5
	Jumlah		222	220	217

Lampiran 8

Hasil Perhitungan Variabel Perusahaan Yang Membentuk *Governance* *Committee*

No	Kode	Nama Perusahaan	2018	2019	2020
1	AALI	Astra Agro Lestari	0	0	0
2	ADHI	Adhi Karya (Persero)	1	1	1
3	AKRA	AKR Corporindo	0	0	0
4	ANTM	Aneka Tambang (Persero)	1	1	1
5	ASII	Astra International	0	0	0
6	BBCA	Bank Central Asia	1	1	1
7	BBNI	Bank Negara Indonesia (Persero)	1	1	1
8	BBRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero)	1	1	1
9	BBTN	Bank Tabungan Negara (Persero)	0	0	0
10	BJBR	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	1	1	1
11	BJTM	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	1	1	1
12	BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk	1	1	1
13	BNLI	Bank Permata Tbk	1	1	1
14	ELSA	Elnusa Tbk	0	0	0
15	EXCL	XL Axiata Tbk	0	0	0
16	INTP	Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	0	0	0

17	JPFA	JAPFA Comfeed Indonesia Tbk	0	0	0
18	JSMR	Jasa Marga (Persero) Tbk	0	0	0
19	KLBF	Kalbe Farma Tbk	1	1	1
20	LSIP	PP London Sumatra Indonesia Tbk	0	0	0
21	PTBA	Tambang Batubara Bukit Asam (Persero)	0	0	0
22	PTPP	PP (Persero) Tbk	1	1	1
23	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk	0	0	0
24	TINS	Timah (Persero) Tbk	0	0	0
25	UNTR	United Tractors Tbk	1	1	1
26	UNVR	Unilever Indonesia Tbk	1	1	1
27	WIKA	Wijaya Karya (Persero) Tbk	0	0	0
28	WSBP	Waskita Beton Precast Tbk	0	0	0
29	WSKT	Waskita Karya (Persero) Tbk	0	0	0
30	WTON	Wijaya Karya Beton Tbk	1	1	1
		Jumlah	14	14	14



Lampiran 9

Hasil Perhitungan Variabel Indikator Pengungkapan Sustainability Report Berdasarkan Standar GRI 2016

NO	INDEKS	PENGUNGKAPAN	AALI			ADHI		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	101	Landasan	1	1	1	1	1	1
2	102-1	Nama organisasi	1	1	1	1	1	1
3	102-2	Kegiatan, merek, produk, dan jasa	1	1	1	1	1	1
4	102-3	Lokasi kantor pusat	1	1	1	1	1	1
5	102-4	Lokasi operasi	1	1	1	1	1	1
6	102-5	Kepemilikan dan bentuk hukum	1	1	1	1	1	1
7	102-6	Pasar yang dilayani	0	0	0	1	1	1
8	102-7	Skala organisasi	1	1	1	1	1	1
9	102-8	Informasi mengenai karyawan dan pekerja lainnya	1	1	1	1	1	1
10	102-9	Rantai pasokan	0	0	0	1	1	1
11	102-10	Perubahan signifikan pada organisasi dan rantai pasokannya	1	1	1	1	1	1
12	102-11	Pendekatan atau Prinsip Pencegahan	1	1	1	1	1	1
13	102-12	Inisiatif Eksternal	1	1	1	1	1	1
14	102-13	Keanggotaan asosiasi	1	1	1	1	1	1
15	102-14	Pernyataan dari pembuat keputusan senior	1	1	1	1	1	1
16	102-15	Dampak penting, risiko, dan peluang	1	1	1	1	1	0
17	102-16	Nilai, prinsip, standar, dan norma perilaku	1	1	1	1	1	1
18	102-17	Mekanisme untuk saran dan masalah etika	1	1	1	0	0	0

19	102-18	Struktur tata kelola	1	1	1	1	1	1
20	102-19	Mendelegasikan wewenang	1	1	1	0	0	0
21	102-20	Tanggung jawab tingkat eksekutif untuk topik ekonomi, lingkungan, dan sosial	1	1	1	0	0	0
22	102-21	Berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan mengenai topik-topik ekonomi, lingkungan, dan sosial	1	1	1	0	0	0
23	102-22	Komposisi badan tata kelola tertinggi dan komitennya	1	1	1	0	0	0
24	102-23	Ketua badan tata kelola tertinggi	1	1	1	0	0	0
25	102-24	Menominasikan dan memilih badan tata kelola tertinggi	1	1	1	0	0	0
26	102-25	Konflik kepentingan	1	1	1	0	0	0
27	102-26	Peran badan tata kelola tertinggi dalam menetapkan tujuan, nilai-nilai, dan strategi	1	1	1	0	0	0
28	102-27	Pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi	0	0	0	0	0	0
29	102-28	Mengevaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi	1	1	1	0	0	0
30	102-29	Mengidentifikasi dan mengelola dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial	1	1	1	0	0	0
31	102-30	Keefektifan proses manajemen risiko	1	1	1	0	0	0
32	102-31	Pengkajian topik ekonomi, lingkungan, dan sosial	1	1	1	0	0	0
33	102-32	Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan	0	0	0	0	0	0
34	102-33	Mengomunikasikan hal-hal kritis	0	0	0	0	0	0
35	102-34	Sifat dan jumlah total hal-hal kritis	0	0	0	0	0	0
36	102-35	Kebijakan remunerasi	1	1	1	0	0	0

37	102-36	Proses untuk menentukan remunerasi	0	0	0	0	0	0
38	102-37	Keterlibatan para pemangku kepentingan dalam remunerasi	0	0	0	0	0	0
39	102-38	Rasio kompensasi total tahunan	0	0	0	0	0	0
40	102-39	Persentase kenaikan pada total rasio kompensasi total tahunan	0	0	0	0	0	0
41	102-40	Daftar kelompok pemangku kepentingan	1	1	1	1	1	1
42	102-41	Perjanjian perundingan kolektif	0	0	0	1	1	1
43	102-42	Mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan	1	1	1	1	1	1
44	102-43	Pendekatan untuk keterlibatan pemangku kepentingan	1	1	1	1	1	1
45	102-44	Topik utama dan hal-hal yang diajukan	1	1	1	1	1	1
46	102-45	Entitas yang termasuk dalam laporan keuangan dikonsolidasi	0	0	0	1	1	1
47	102-46	Menetapkan isi laporan dan Batasan topik	1	1	1	1	1	1
48	102-47	Daftar topik material	1	1	1	1	1	1
49	102-48	Penyajian kembali informasi	0	0	0	1	1	1
50	102-49	Perubahan dalam pelaporan	0	0	0	1	1	1
51	102-50	Periode pelaporan	1	1	1	1	1	1
52	102-51	Tanggal laporan terbaru	0	0	0	1	1	1
53	102-52	Siklus pelaporan	1	1	1	1	1	1
54	102-53	Titik kontak untuk pertanyaan mengenai laporan	1	1	1	1	1	1
55	102-54	Mengklaim pelaporan sesuai dengan Standar GRI	1	1	1	1	1	1
56	102-55	Indeks isi GRI	1	1	1	1	1	1
57	102-56	Assurance oleh pihak eksternal	1	1	1	1	1	1

58	103-1	Penjelasan topik material dan Batasannya	1	1	1	1	1	1
59	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	1	1	1	1	1	1
60	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	1	1	1	1	1	1
STANDAR TOPIK SPESIFIK								
GRI 200: Ekonomi								
1	201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan	0	0	0	1	1	1
2	201-2	Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim	0	0	0	0	1	0
3	201-3	Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya	0	0	0	0	1	0
4	201-4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah	0	0	0	0	0	0
5	202-1	Rasio standar upah karyawan entry-level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional	0	0	0	0	0	1
6	202-2	Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal	0	0	0	0	0	0
7	203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan	0	0	0	0	0	1
8	203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan	0	0	0	0	0	1
9	204-1	Proporsi pengeluaran untuk pemasok local	1	1	1	1	1	1
10	205-1	Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi	0	0	0	0	1	0
11	205-2	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi	0	0	0	0	1	0

12	205-3	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil	0	0	0	0	1	0
13	206-1	Langkah-langkah hukum untuk perilaku anti-persaingan, praktik anti-trust dan monopoli	0	0	0	0	0	0
GRI 300: Lingkungan								
1	301-1	Material yang digunakan berdasarkan berat atau volume	0	0	0	0	0	0
2	301-2	Material input dari daur ulang yang digunakan	0	0	0	0	0	0
3	301-3	Produk reclaimed dan material kemasannya	0	0	0	0	0	0
4	302-1	Konsumsi energi dalam organisasi	0	0	1	0	1	1
5	302-2	Konsumsi energi di luar organisasi	0	0	0	0	0	0
6	302-3	Intensitas energi	0	0	0	0	0	0
7	302-4	Pengurangan konsumsi energi	0	0	0	0	0	1
8	302-5	Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa	0	0	0	0	0	0
9	303-1	Interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama	0	0	0	0	0	1
10	303-2	Manajemen dampak yang berkaitan dengan pembuangan air	0	0	0	0	0	0
11	303-3	Pengambilan air	0	0	1	0	0	0
12	303-4	Pembuangan air	0	0	0	0	0	0
13	303-5	Konsumsi air	0	0	0	0	0	0
14	304-1	Lokasi operasi yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung	1	1	1	0	0	0

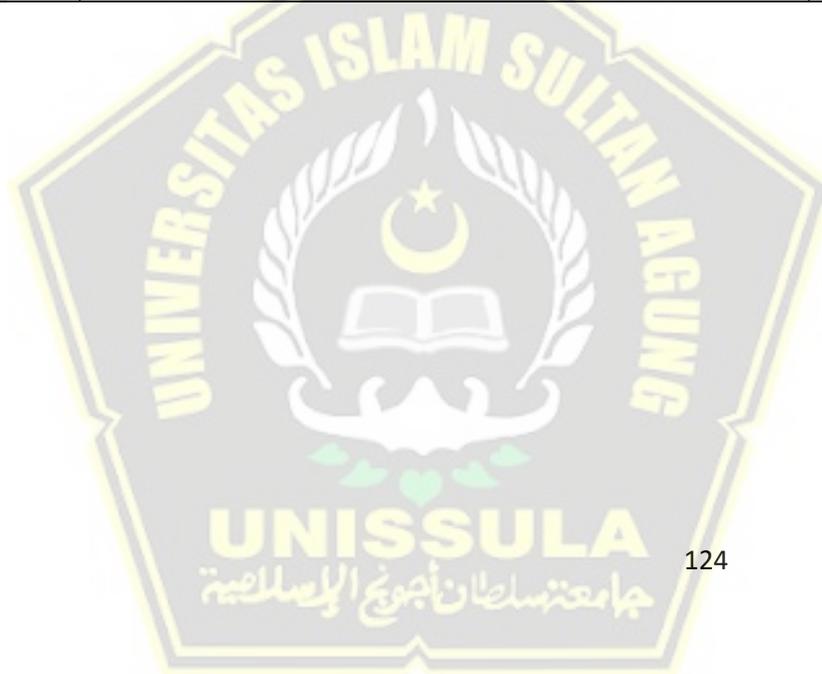
15	304-2	Dampak signifikan dari kegiatan, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati	1	1	1	0	0	0
16	304-3	Habitat yang dilindungi atau direstorasi	1	1	1	0	0	0
17	304-4	Spesies Daftar Merah IUCN dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi	1	1	1	0	0	0
18	305-1	Emisi GRK (Cakupan 1) langsung	1	1	1	0		1
19	305-2	Emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung	0	0	0	0	0	1
20	305-3	Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya	0	0	0	0	0	0
21	305-4	Intensitas emisi GRK	0	0	0	0	0	0
22	305-5	Pengurangan emisi GRK	1	1	1	0	0	1
23	305-6	Emisi zat perusak ozon (ODS	0	0	0	0	0	0
24	305-7	Nitrogen oksida (NOX), sulfur oksida (SOX), dan emisi udara signifikan lainnya	0	0	0	0	0	0
25	306-1	Pelepasan air berdasarkan kualitas dan tujuan	0	0	0	0	0	0
26	306-2	Limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan	1	1	1	0	0	0
27	306-3	Tumpahan yang signifikan	0	0	0	0	0	0
28	306-4	Pengangkutan limbah berbahaya	1	1	1	0	0	0
29	306-5	Badan air yang dipengaruhi oleh pelepasan dan/atau limpahan air	0	0	0	0	0	0
30	307-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup	0	0	0	1	1	0

31	308-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan	1	1	0	0	0	0
32	308-2	Dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil	1	1	0	0	0	0
GRI 400: Sosial								
1	401-1	Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan	0	0	0	0	0	1
2	401-2	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu	1	0	1	0	0	0
3	401-3	Cuti melahirkan	1	1	1	0	0	0
4	402-1	Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional	1	1	0	0	0	0
5	403-1	Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja	1	1	1	1	1	0
6	403-2	Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden	1	1	1	0	1	1
7	403-3	Layanan kesehatan kerja	1	1	1	0	1	0
8	403-4	Partisipasi, konsultasi, dan komunikasi pekerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja	1	1	1	0	0	0
9	403-5	Pelatihan bagi pekerja mengenai keselamatan dan kesehatan kerja	1	1	1	0	1	0
10	403-6	Peningkatan kualitas kesehatan pekerja	1	1	1	0	1	0

11	403-7	Pencegahan dan mitigasi dampak dari keselamatan dan kesehatan kerja yang secara langsung terkait hubungan bisnis	1	1	1	0	0	0
12	403-8	Pekerja yang tercakup dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja	0	0	0	0	1	0
13	403-9	Kecelakaan kerja	0	0	0	0	1	0
14	403-10	Penyakit akibat kerja	0	0	0	0	0	0
15	404-1	Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan	1	1	0	0	1	0
16	404-2	Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan	1	1	1	0	1	1
17	404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier	1	1	1	0	0	0
18	405-1	Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan	1	1	0	0	0	1
19	405-2	Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki	1	1	0	0	0	0
20	406-1	Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan	0	0	0	0	0	1
21	407-1	Operasi dan pemasok di mana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin berisiko	0	0	0	0	0	0
22	408-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak	0	0	0	0	0	1

23	409-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja	0	0	0	0	0	1
24	410-1	Petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia	0	0	0	0	0	0
25	411-1	Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat	0	0	0	0	0	0
26	412-1	Operasi-operasi yang telah melewati tinjauan hak asasi manusia atau penilaian dampak	0	0	0	0	0	0
27	412-2	Pelatihan karyawan mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia	1	1	1	0	0	0
28	412-3	Perjanjian dan kontrak investasi signifikan yang memasukkan klausul-klausul hak asasi manusia atau yang telah melalui penyaringan hak asasi manusia	0	0	0	0	0	0
29	413-1	Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan	1	1	1	0	0	1
30	413-2	Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal	0	0	0	0	0	1
31	414-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial	1	1	0	0	0	0
32	414-2	Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil	1	1	0	0	0	0
33	415-1	Kontribusi Politik	0	0	0	0	0	0
34	416-1	Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa	0	0	0	0	0	0

35	416-2	Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa	0	0	0	0	0	0
36	417-1	Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa	0	0	0	0	0	0
37	417-2	Insiden ketidakpatuhan terkait informasi dan pelabelan produk dan jasa	0	0	0	0	0	0
38	417-3	Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran	0	0	0	0	0	0
39	418-1	Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan	0	0	0	0	0	1
40	419-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan di bidang sosial dan ekonomi	0	0	0	0	0	0
		Parameter Dipenuhi	75	74	69	42	56	58
		Total Parameter Standar GRI	145	145	145	145	145	145



NO	INDEKS	PENGUNGKAPAN	AKRA			ANTM		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	101	Landasan	1	1	1	1	1	1
2	102-1	Nama organisasi	1	1	1	1	1	1
3	102-2	Kegiatan, merek, produk, dan jasa	1	1	1	1	1	1
4	102-3	Lokasi kantor pusat	1	1	1	1	1	1
5	102-4	Lokasi operasi	1	1	1	1	1	1
6	102-5	Kepemilikan dan bentuk hukum	1	1	1	1	1	1
7	102-6	Pasar yang dilayani	1	1	1	1	1	1
8	102-7	Skala organisasi	1	1	1	1	1	1
9	102-8	Informasi mengenai karyawan dan pekerja lainnya	1	1	1	1	1	1
10	102-9	Rantai pasokan	1	1	1	1	1	1
11	102-10	Perubahan signifikan pada organisasi dan rantai pasokannya	1	1	1	1	1	1
12	102-11	Pendekatan atau Prinsip Pencegahan	1	1	1	1	1	1
13	102-12	Inisiatif Eksternal	1	1	1	1	1	1
14	102-13	Keanggotaan asosiasi	1	1	1	1	1	1
15	102-14	Pernyataan dari pembuat keputusan senior	1	1	1	1	1	1
16	102-15	Dampak penting, risiko, dan peluang	0	0	1	0	0	0
17	102-16	Nilai, prinsip, standar, dan norma perilaku	1	1	1	1	1	1
18	102-17	Mekanisme untuk saran dan masalah etika	0	0	0	1	1	1
19	102-18	Struktur tata kelola	1	1	1	1	1	1
20	102-19	Mendelegasikan wewenang	0	0	1	0	0	0

21	102-20	Tanggung jawab tingkat eksekutif untuk topik ekonomi, lingkungan, dan sosial	0	0	0	1	1	1
22	102-21	Berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan mengenai topik-topik ekonomi, lingkungan, dan sosial	0	0	0	0	0	0
23	102-22	Komposisi badan tata kelola tertinggi dan komitenya	0	0	1	0	0	0
24	102-23	Ketua badan tata kelola tertinggi	0	0	0	0	0	0
25	102-24	Menominasikan dan memilih badan tata kelola tertinggi	0	0	0	0	0	0
26	102-25	Konflik kepentingan	0	0	0	0	0	0
27	102-26	Peran badan tata kelola tertinggi dalam menetapkan tujuan, nilai-nilai, dan strategi	0	0	0	0	0	0
28	102-27	Pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi	0	0	0	0	0	0
29	102-28	Mengevaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi	0	0	0	1	1	0
30	102-29	Mengidentifikasi dan mengelola dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial	0	0	0	0	0	0
31	102-30	Keefektifan proses manajemen risiko	0	0	1	0	0	0
32	102-31	Pengkajian topik ekonomi, lingkungan, dan sosial	0	0	0	0	0	0
33	102-32	Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan	0	0	0	0	0	0
34	102-33	Mengomunikasikan hal-hal kritis	0	0	0	0	0	0
35	102-34	Sifat dan jumlah total hal-hal kritis	0	0	0	0	0	0
36	102-35	Kebijakan remunerasi	0	0	1	0	0	0
37	102-36	Proses untuk menentukan remunerasi	0	0	1	0	0	0

38	102-37	Keterlibatan para pemangku kepentingan dalam remunerasi	0	0	0	0	0	0
39	102-38	Rasio kompensasi total tahunan	0	0	0	0	0	0
40	102-39	Persentase kenaikan pada total rasio kompensasi total tahunan	0	0	0	0	0	0
41	102-40	Daftar kelompok pemangku kepentingan	1	1	1	1	1	1
42	102-41	Perjanjian perundingan kolektif	1	1	1	1	1	1
43	102-42	Mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan	1	1	1	1	1	1
44	102-43	Pendekatan untuk keterlibatan pemangku kepentingan	1	1	1	1	1	1
45	102-44	Topik utama dan hal-hal yang diajukan	1	1	1	1	1	1
46	102-45	Entitas yang termasuk dalam laporan keuangan dikonsolidasi	1	1	1	1	1	1
47	102-46	Menetapkan isi laporan dan Batasan topik	1	1	1	1	1	1
48	102-47	Daftar topik material	1	1	1	1	1	1
49	102-48	Penyajian kembali informasi	1	1	1	1	1	1
50	102-49	Perubahan dalam pelaporan	1	1	1	1	1	1
51	102-50	Periode pelaporan	1	1	1	1	1	1
52	102-51	Tanggal laporan terbaru	1	1	1	1	1	1
53	102-52	Siklus pelaporan	1	1	1	1	1	1
54	102-53	Titik kontak untuk pertanyaan mengenai laporan	1	1	1	1	1	1
55	102-54	Mengklaim pelaporan sesuai dengan Standar GRI	1	1	1	1	1	1
56	102-55	Indeks isi GRI	1	1	1	1	1	1
57	102-56	Assurance oleh pihak eksternal	1	1	1	1	1	1
58	103-1	Penjelasan topik material dan Batasannya	1	1	1	1	1	1

59	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	1	1	1	1	1	1
60	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	1	1	1	1	1	1
STANDAR TOPIK SPESIFIK								
GRI 200: Ekonomi								
1	201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan	1	1	1	1	1	1
2	201-2	Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim	0	0	0	0	0	0
3	201-3	Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya	1	1	1	0	0	0
4	201-4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah	1	1	1	0	0	0
5	202-1	Rasio standar upah karyawan entry-level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional	0	0	0	1	0	0
6	202-2	Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal	0	0	0	0	0	0
7	203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan	1	1	1	1	1	1
8	203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan	1	1	1	0	0	0
9	204-1	Proporsi pengeluaran untuk pemasok local	0	0	0	0	0	1
10	205-1	Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi	1	1	1	0	0	0
11	205-2	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi	0	0	1	1	1	1

12	205-3	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil	1	1	1	0	0	0
13	206-1	Langkah-langkah hukum untuk perilaku anti-persaingan, praktik anti-trust dan monopoli	0	0	0	0	0	0
GRI 300: Lingkungan								
1	301-1	Material yang digunakan berdasarkan berat atau volume	0	0	0	0	0	0
2	301-2	Material input dari daur ulang yang digunakan	0	0	0	0	0	0
3	301-3	Produk reclaimed dan material kemasannya	0	0	0	0	0	0
4	302-1	Konsumsi energi dalam organisasi	1	1	1	1	1	1
5	302-2	Konsumsi energi di luar organisasi	0	0	0	0	0	0
6	302-3	Intensitas energi	0	0	1	1	1	1
7	302-4	Pengurangan konsumsi energi	1	1	1	0	0	0
8	302-5	Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa	0	0	0	0	0	0
9	303-1	Interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama	0	0	0	1	1	1
10	303-2	Manajemen dampak yang berkaitan dengan pembuangan air	0	0	0	0	0	1
11	303-3	Pengambilan air	0	0	0	1	1	1
12	303-4	Pembuangan air	0	0	0	0	0	1
13	303-5	Konsumsi air	0	0	0	0	0	1
14	304-1	Lokasi operasi yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung	0	0	0	1	1	1

15	304-2	Dampak signifikan dari kegiatan, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati	0	0	0	0	0	0
16	304-3	Habitat yang dilindungi atau direstorasi	0	0	0	1	1	1
17	304-4	Spesies Daftar Merah IUCN dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi	0	0	0	0	0	0
18	305-1	Emisi GRK (Cakupan 1) langsung	0	0	1	1	1	1
19	305-2	Emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung	0	0	1	0	0	1
20	305-3	Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya	0	0	0	0	0	0
21	305-4	Intensitas emisi GRK	0	0	1	1	1	1
22	305-5	Pengurangan emisi GRK	0	0	1	1	1	1
23	305-6	Emisi zat perusak ozon (ODS	0	0	0	0	0	0
24	305-7	Nitrogen oksida (NOX), sulfur oksida (SOX), dan emisi udara signifikan lainnya	1	1	0	1	1	1
25	306-1	Pelepasan air berdasarkan kualitas dan tujuan	0	0	0	1	1	1
26	306-2	Limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan	0	0	1	1	1	1
27	306-3	Tumpahan yang signifikan	1	1	0	1	1	1
28	306-4	Pengangkutan limbah berbahaya	0	0	0	0	0	0
29	306-5	Badan air yang dipengaruhi oleh pelepasan dan/atau limbah air	0	0	0	0	0	0
30	307-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup	1	1	0	1	1	1

31	308-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan	0	0	0	1	1	0
32	308-2	Dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil	0	0	0	0	0	0
GRI 400: Sosial								
1	401-1	Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan	1	1	1	1	1	1
2	401-2	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu	1	1	1	1	1	1
3	401-3	Cuti melahirkan	1	1	1	0	0	1
4	402-1	Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional	0	0	0	0	0	0
5	403-1	Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja	0	0	1	1	1	1
6	403-2	Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden	1	1	1	1	1	1
7	403-3	Layanan kesehatan kerja	0	0	0	1	1	1
8	403-4	Partisipasi, konsultasi, dan komunikasi pekerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja	0	0	0	1	1	1
9	403-5	Pelatihan bagi pekerja mengenai keselamatan dan kesehatan kerja	0	0	0	0	0	1
10	403-6	Peningkatan kualitas kesehatan pekerja	0	0	0	0	1	1
11	403-7	Pencegahan dan mitigasi dampak dari keselamatan dan kesehatan kerja yang secara langsung terkait hubungan bisnis	0	0	0	0	1	1

12	403-8	Pekerja yang tercakup dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja	0	0	0	0	0	1
13	403-9	Kecelakaan kerja	0	0	0	0	0	1
14	403-10	Penyakit akibat kerja	0	0	0	0	0	1
15	404-1	Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan	1	1	1	1	1	1
16	404-2	Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan	0	0	0	1	1	1
17	404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier	1	1	1	1	1	1
18	405-1	Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan	1	1	1	1	1	1
19	405-2	Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki	1	1	1	1	1	0
20	406-1	Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan	1	1	0	1	1	1
21	407-1	Operasi dan pemasok di mana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin berisiko	0	0	0	0	0	0
22	408-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak	0	0	0	0	0	1
23	409-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja	1	1	0	0	0	1
24	410-1	Petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia	0	0	0	0	0	0

25	411-1	Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat	0	0	0	0	0	1
26	412-1	Operasi-operasi yang telah melewati tinjauan hak asasi manusia atau penilaian dampak	0	0	0	0	0	0
27	412-2	Pelatihan karyawan mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia	0	0	0	0	0	0
28	412-3	Perjanjian dan kontrak investasi signifikan yang memasukkan klausul-klausul hak asasi manusia atau yang telah melalui penyaringan hak asasi manusia	0	0	0	0	0	0
29	413-1	Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan	1	1	1	1	1	1
30	413-2	Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal	0	0	0	1	0	0
31	414-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial	0	0	0	1	1	0
32	414-2	Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil	0	0	0	0	0	0
33	415-1	Kontribusi Politik	0	0	0	0	0	0
34	416-1	Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa	0	0	0	0	0	0
35	416-2	Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa	0	0	0	0	0	0
36	417-1	Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa	1	1	0	0	0	1

37	417-2	Insiden ketidakpatuhan terkait informasi dan pelabelan produk dan jasa	0	0	0	0	0	1
38	417-3	Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran	1	1	0	0	0	1
39	418-1	Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan	0	0	0	0	0	0
40	419-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan di bidang sosial dan ekonomi	1	1	1	0	0	1
		Parameter Dipenuhi	63	63	70	74	74	87
		Total Parameter Standar GRI	145	145	145	145	145	145



NO	INDEKS	PENGUNGKAPAN	ASII			BBCA		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	101	Landasan	1	1	1	1	1	1
2	102-1	Nama organisasi	1	1	1	1	1	1
3	102-2	Kegiatan, merek, produk, dan jasa	1	1	1	1	1	1
4	102-3	Lokasi kantor pusat	1	1	1	1	1	1
5	102-4	Lokasi operasi	1	1	1	1	1	1
6	102-5	Kepemilikan dan bentuk hukum	1	1	1	1	1	1
7	102-6	Pasar yang dilayani	1	1	1	1	1	1
8	102-7	Skala organisasi	1	1	1	1	1	1
9	102-8	Informasi mengenai karyawan dan pekerja lainnya	1	1	1	1	1	1
10	102-9	Rantai pasokan	1	1	0	1	1	1
11	102-10	Perubahan signifikan pada organisasi dan rantai pasokannya	1	1	1	1	1	1
12	102-11	Pendekatan atau Prinsip Pencegahan	1	1	1	1	1	1
13	102-12	Inisiatif Eksternal	1	1	1	1	1	1
14	102-13	Keanggotaan asosiasi	1	1	1	1	1	1
15	102-14	Pernyataan dari pembuat keputusan senior	1	1	1	1	1	1
16	102-15	Dampak penting, risiko, dan peluang	0	0	0	1	1	1
17	102-16	Nilai, prinsip, standar, dan norma perilaku	1	1	1	1	1	1
18	102-17	Mekanisme untuk saran dan masalah etika	1	1	0	1	0	1
19	102-18	Struktur tata kelola	1	1	1	1	1	1
20	102-19	Mendelegasikan wewenang	0	0	0	0	1	0

21	102-20	Tanggung jawab tingkat eksekutif untuk topik ekonomi, lingkungan, dan sosial	0	0	0	0	1	0
22	102-21	Berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan mengenai topik-topik ekonomi, lingkungan, dan sosial	0	0	0	0	0	0
23	102-22	Komposisi badan tata kelola tertinggi dan komitennya	0	0	0	0	0	0
24	102-23	Ketua badan tata kelola tertinggi	0	0	0	0	0	0
25	102-24	Menominasikan dan memilih badan tata kelola tertinggi	0	0	0	0	0	0
26	102-25	Konflik kepentingan	0	0	0	0	0	0
27	102-26	Peran badan tata kelola tertinggi dalam menetapkan tujuan, nilai-nilai, dan strategi	0	0	0	0	0	0
28	102-27	Pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi	0	0	0	0	0	0
29	102-28	Mengevaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi	0	0	0	0	0	0
30	102-29	Mengidentifikasi dan mengelola dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial	0	0	0	0	0	0
31	102-30	Keefektifan proses manajemen risiko	0	0	0	0	1	0
32	102-31	Pengkajian topik ekonomi, lingkungan, dan sosial	0	0	0	0	0	0
33	102-32	Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan	0	0	0	0	0	1
34	102-33	Mengomunikasikan hal-hal kritis	0	0	0	0	0	0
35	102-34	Sifat dan jumlah total hal-hal kritis	0	0	0	0	0	0
36	102-35	Kebijakan remunerasi	0	0	0	0	1	0
37	102-36	Proses untuk menentukan remunerasi	0	0	0	0	0	0

38	102-37	Keterlibatan para pemangku kepentingan dalam remunerasi	0	0	0	0	0	0
39	102-38	Rasio kompensasi total tahunan	0	0	0	0	0	0
40	102-39	Persentase kenaikan pada total rasio kompensasi total tahunan	0	0	0	0	0	0
41	102-40	Daftar kelompok pemangku kepentingan	1	1	1	1	1	1
42	102-41	Perjanjian perundingan kolektif	1	1	1	1	1	1
43	102-42	Mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan	1	1	1	1	1	1
44	102-43	Pendekatan untuk keterlibatan pemangku kepentingan	1	1	1	1	1	1
45	102-44	Topik utama dan hal-hal yang diajukan	1	1	1	1	1	1
46	102-45	Entitas yang termasuk dalam laporan keuangan dikonsolidasi	1	1	1	1	1	1
47	102-46	Menetapkan isi laporan dan Batasan topik	1	1	1	1	1	1
48	102-47	Daftar topik material	1	1	1	1	1	1
49	102-48	Penyajian kembali informasi	1	1	1	1	1	1
50	102-49	Perubahan dalam pelaporan	1	1	1	1	1	1
51	102-50	Periode pelaporan	1	1	1	1	1	1
52	102-51	Tanggal laporan terbaru	1	1	1	1	1	1
53	102-52	Siklus pelaporan	1	1	1	1	1	1
54	102-53	Titik kontak untuk pertanyaan mengenai laporan	1	1	1	1	1	1
55	102-54	Mengklaim pelaporan sesuai dengan Standar GRI	1	1	1	1	1	1
56	102-55	Indeks isi GRI	1	1	1	1	1	1
57	102-56	Assurance oleh pihak eksternal	1	1	1	1	1	1
58	103-1	Penjelasan topik material dan Batasannya	1	1	1	1	1	1

59	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	1	1	1	1	1	1
60	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	1	1	1	1	1	1
STANDAR TOPIK SPESIFIK								
GRI 200: Ekonomi								
1	201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan	0	1	1	1	0	1
2	201-2	Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim	0	0	0	0	1	1
3	201-3	Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya	0	0	0	0	0	1
4	201-4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah	0	0	0	0	0	1
5	202-1	Rasio standar upah karyawan entry-level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional	0	0	0	0	0	0
6	202-2	Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal	0	0	0	0	0	0
7	203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan	1	1	1	1	0	1
8	203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan	1	1	1	0	0	1
9	204-1	Proporsi pengeluaran untuk pemasok local	0	0	0	0	0	0
10	205-1	Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi	0	0	0	0	1	1
11	205-2	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi	0	0	0	1	1	1

12	205-3	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil	0	0	0	0	1	1
13	206-1	Langkah-langkah hukum untuk perilaku anti-persaingan, praktik anti-trust dan monopoli	0	0	0	0	0	0
GRI 300: Lingkungan								
1	301-1	Material yang digunakan berdasarkan berat atau volume	1	1	0	1	0	0
2	301-2	Material input dari daur ulang yang digunakan	0	0	0	0	0	0
3	301-3	Produk reclaimed dan material kemasannya	0	0	0	0	0	0
4	302-1	Konsumsi energi dalam organisasi	1	1	1	1	0	1
5	302-2	Konsumsi energi di luar organisasi	0	0	0	0	0	0
6	302-3	Intensitas energi	1	1	1	0	1	1
7	302-4	Pengurangan konsumsi energi	0	1	1	0	0	0
8	302-5	Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa	0	1	0	0	0	0
9	303-1	Interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama	1	1	1	1	0	0
10	303-2	Manajemen dampak yang berkaitan dengan pembuangan air	0	0	0	0	0	0
11	303-3	Pengambilan air	0	0	0	0	0	0
12	303-4	Pembuangan air	0	0	0	0	0	0
13	303-5	Konsumsi air	0	0	0	0	0	0
14	304-1	Lokasi operasi yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung	0	0	0	0	0	0

15	304-2	Dampak signifikan dari kegiatan, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati	0	0	0	0	1	0
16	304-3	Habitat yang dilindungi atau direstorasi	1	1	1	0	0	0
17	304-4	Spesies Daftar Merah IUCN dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi	0	0	0	0	0	0
18	305-1	Emisi GRK (Cakupan 1) langsung	0	0	0	0	0	1
19	305-2	Emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung	0	0	0	0	0	1
20	305-3	Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya	0	0	0	0	0	1
21	305-4	Intensitas emisi GRK	0	0	1	0	0	0
22	305-5	Pengurangan emisi GRK	1	1	1	0	0	0
23	305-6	Emisi zat perusak ozon (ODS)	0	0	0	0	0	0
24	305-7	Nitrogen oksida (NOX), sulfur oksida (SOX), dan emisi udara signifikan lainnya	0	0	0	0	0	0
25	306-1	Pelepasan air berdasarkan kualitas dan tujuan	0	0	0	0	0	0
26	306-2	Limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan	1	1	1	0	0	0
27	306-3	Tumpahan yang signifikan	0	0	0	0	0	0
28	306-4	Pengangkutan limbah berbahaya	0	0	0	0	0	0
29	306-5	Badan air yang dipengaruhi oleh pelepasan dan/atau limbah air	0	0	0	0	0	0
30	307-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup	1	1	1	0	0	0

31	308-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan	1	1	1	0	0	0
32	308-2	Dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil	0	0	0	0	0	0
GRI 400: Sosial								
1	401-1	Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan	0	0	0	0	1	1
2	401-2	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu	1	1	1	1	1	1
3	401-3	Cuti melahirkan	0	0	0	0	1	1
4	402-1	Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional	0	0	0	0	0	0
5	403-1	Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja	0	0	1	0	0	0
6	403-2	Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden	1	1	1	1	0	0
7	403-3	Layanan kesehatan kerja	0	0	1	0	0	1
8	403-4	Partisipasi, konsultasi, dan komunikasi pekerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja	0	0	1	0	0	1
9	403-5	Pelatihan bagi pekerja mengenai keselamatan dan kesehatan kerja	0	0	1	0	0	1
10	403-6	Peningkatan kualitas kesehatan pekerja	0	0	1	0	0	1
11	403-7	Pencegahan dan mitigasi dampak dari keselamatan dan kesehatan kerja yang secara langsung terkait hubungan bisnis	0	0	1	0	0	1

12	403-8	Pekerja yang tercakup dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja	0	0	0	0	0	0
13	403-9	Kecelakaan kerja	0	0	1	0	0	0
14	403-10	Penyakit akibat kerja	0	0	0	0	0	0
15	404-1	Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan	0	0	1	0	1	1
16	404-2	Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan	1	1	1	1	1	1
17	404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier	1	1	0	0	1	1
18	405-1	Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan	0	0	0	1	0	0
19	405-2	Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki	0	0	0	0	0	0
20	406-1	Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan	0	0	0	0	0	0
21	407-1	Operasi dan pemasok di mana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin berisiko	0	0	0	0	0	0
22	408-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak	0	0	0	0	0	0
23	409-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja	0	0	0	0	0	0
24	410-1	Petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia	0	0	0	0	0	0

25	411-1	Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat	0	0	0	0	0	0
26	412-1	Operasi-operasi yang telah melewati tinjauan hak asasi manusia atau penilaian dampak	0	0	0	0	0	0
27	412-2	Pelatihan karyawan mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia	0	0	0	0	0	0
28	412-3	Perjanjian dan kontrak investasi signifikan yang memasukkan klausul-klausul hak asasi manusia atau yang telah melalui penyaringan hak asasi manusia	0	0	0	0	0	0
29	413-1	Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan	1	1	1	1	1	0
30	413-2	Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal	0	0	0	0	0	0
31	414-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial	1	1	1	0	0	0
32	414-2	Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil	0	0	0	0	0	0
33	415-1	Kontribusi Politik	0	0	0	0	0	0
34	416-1	Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa	0	0	0	0	0	0
35	416-2	Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa	0	0	0	0	0	0
36	417-1	Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa	0	0	0	1	1	1

37	417-2	Insiden ketidakpatuhan terkait informasi dan pelabelan produk dan jasa	1	1	1	0	1	1
38	417-3	Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran	0	0	1	0	1	1
39	418-1	Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan	0	0	0	1	1	1
40	419-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan di bidang sosial dan ekonomi	1	1	1	0	0	0
		Parameter Dipenuhi	57	60	65	52	59	69
		Total Parameter Standar GRI	145	145	145	145	145	145

NO	INDEKS	PENGUNGKAPAN	BBNI			BBRI		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	101	Landasan	1	1	1	1	1	1
2	102-1	Nama organisasi	1	1	1	1	1	1
3	102-2	Kegiatan, merek, produk, dan jasa	1	1	1	1	1	1
4	102-3	Lokasi kantor pusat	1	1	1	1	1	1
5	102-4	Lokasi operasi	1	1	1	1	1	1
6	102-5	Kepemilikan dan bentuk hukum	1	1	1	1	1	1
7	102-6	Pasar yang dilayani	1	1	1	1	1	1
8	102-7	Skala organisasi	1	1	1	1	1	1
9	102-8	Informasi mengenai karyawan dan pekerja lainnya	1	1	1	1	1	1
10	102-9	Rantai pasokan	1	1	1	1	1	1

11	102-10	Perubahan signifikan pada organisasi dan rantai pasokannya	1	1	1	1	1	1
12	102-11	Pendekatan atau Prinsip Pencegahan	1	1	1	1	1	1
13	102-12	Inisiatif Eksternal	1	1	1	1	1	1
14	102-13	Keanggotaan asosiasi	1	1	1	1	1	1
15	102-14	Pernyataan dari pembuat keputusan senior	1	1	1	1	1	1
16	102-15	Dampak penting, risiko, dan peluang	0	0	0	0	0	1
17	102-16	Nilai, prinsip, standar, dan norma perilaku	1	1	1	1	1	1
18	102-17	Mekanisme untuk saran dan masalah etika	0	0	0	0	0	1
19	102-18	Struktur tata kelola	1	1	1	1	1	1
20	102-19	Mendelegasikan wewenang	0	0	0	0	0	1
21	102-20	Tanggung jawab tingkat eksekutif untuk topik ekonomi, lingkungan, dan sosial	0	0	0	0	0	1
22	102-21	Berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan mengenai topik-topik ekonomi, lingkungan, dan sosial	0	0	0	0	0	1
23	102-22	Komposisi badan tata kelola tertinggi dan komitennya	0	0	0	0	0	1
24	102-23	Ketua badan tata kelola tertinggi	0	0	0	0	0	1
25	102-24	Menominasikan dan memilih badan tata kelola tertinggi	0	0	0	0	0	1
26	102-25	Konflik kepentingan	0	0	0	0	0	1
27	102-26	Peran badan tata kelola tertinggi dalam menetapkan tujuan, nilai-nilai, dan strategi	0	0	0	0	0	1
28	102-27	Pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi	0	0	0	0	0	1
29	102-28	Mengevaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi	0	0	0	0	0	1

30	102-29	Mengidentifikasi dan mengelola dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial	0	0	0	0	0	1
31	102-30	Keefektifan proses manajemen risiko	0	0	0	0	0	1
32	102-31	Pengkajian topik ekonomi, lingkungan, dan sosial	0	0	0	0	0	1
33	102-32	Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan	0	0	0	0	0	1
34	102-33	Mengomunikasikan hal-hal kritis	0	0	0	0	0	1
35	102-34	Sifat dan jumlah total hal-hal kritis	0	0	0	0	0	1
36	102-35	Kebijakan remunerasi	0	0	0	0	0	1
37	102-36	Proses untuk menentukan remunerasi	0	0	0	0	0	1
38	102-37	Keterlibatan para pemangku kepentingan dalam remunerasi	0	0	0	0	0	1
39	102-38	Rasio kompensasi total tahunan	0	0	0	0	0	1
40	102-39	Persentase kenaikan pada total rasio kompensasi total tahunan	0	0	0	0	0	1
41	102-40	Daftar kelompok pemangku kepentingan	1	1	1	1	1	1
42	102-41	Perjanjian perundingan kolektif	1	1	1	1	1	1
43	102-42	Mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan	1	1	1	1	1	1
44	102-43	Pendekatan untuk keterlibatan pemangku kepentingan	1	1	1	1	1	1
45	102-44	Topik utama dan hal-hal yang diajukan	1	1	1	1	1	1
46	102-45	Entitas yang termasuk dalam laporan keuangan dikonsolidasi	1	1	1	1	1	1
47	102-46	Menetapkan isi laporan dan Batasan topik	1	1	1	1	1	1
48	102-47	Daftar topik material	1	1	1	1	1	1

49	102-48	Penyajian kembali informasi	1	1	1	1	1	1
50	102-49	Perubahan dalam pelaporan	1	1	1	1	1	1
51	102-50	Periode pelaporan	1	1	1	1	1	1
52	102-51	Tanggal laporan terbaru	1	1	1	1	1	1
53	102-52	Siklus pelaporan	1	1	1	1	1	1
54	102-53	Titik kontak untuk pertanyaan mengenai laporan	1	1	1	1	1	1
55	102-54	Mengklaim pelaporan sesuai dengan Standar GRI	1	1	1	1	1	1
56	102-55	Indeks isi GRI	1	1	1	1	1	1
57	102-56	Assurance oleh pihak eksternal	1	1	1	1	1	1
58	103-1	Penjelasan topik material dan Batasannya	1	1	1	1	1	1
59	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	1	1	1	1	1	1
60	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	1	1	1	1	1	1
STANDAR TOPIK SPESIFIK								
GRI 200: Ekonomi								
1	201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan	1	1	1	1	1	1
2	201-2	Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim	0	0	1	1	1	1
3	201-3	Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya	0	0	0	0	0	1
4	201-4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah	0	0	0	1	1	1
5	202-1	Rasio standar upah karyawan entry-level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional	0	0	0	0	0	0

6	202-2	Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal	0	0	0	0	0	0
7	203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan	0	1	1	1	1	1
8	203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan	0	0	1	1	1	1
9	204-1	Proporsi pengeluaran untuk pemasok local	0	0	0	0	0	1
10	205-1	Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi	0	0	0	0	0	1
11	205-2	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi	0	0	1	1	1	1
12	205-3	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil	1	1	1	1	1	1
13	206-1	Langkah-langkah hukum untuk perilaku anti-persaingan, praktik anti-trust dan monopoli	0	0	0	0	0	0
GRI 300: Lingkungan								
1	301-1	Material yang digunakan berdasarkan berat atau volume	0	0	0	0	0	0
2	301-2	Material input dari daur ulang yang digunakan	0	0	0	0	0	0
3	301-3	Produk reclaimed dan material kemasannya	0	0	0	0	0	0
4	302-1	Konsumsi energi dalam organisasi	1	1	1	1	1	1
5	302-2	Konsumsi energi di luar organisasi	0	0	1	0	1	1
6	302-3	Intensitas energi	0	0	0	0	1	1
7	302-4	Pengurangan konsumsi energi	0	0	0	1	1	1
8	302-5	Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa	0	0	0	0	0	1

9	303-1	Interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama	0	0	0	0	0	0
10	303-2	Manajemen dampak yang berkaitan dengan pembuangan air	0	0	0	0	0	0
11	303-3	Pengambilan air	0	0	0	0	0	0
12	303-4	Pembuangan air	0	0	0	0	0	0
13	303-5	Konsumsi air	0	0	0	0	0	0
14	304-1	Lokasi operasi yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung	0	0	0	0	0	0
15	304-2	Dampak signifikan dari kegiatan, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati	0	0	0	0	0	0
16	304-3	Habitat yang dilindungi atau direstorasi	0	0	0	0	0	0
17	304-4	Spesies Daftar Merah IUCN dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi	0	0	0	0	0	0
18	305-1	Emisi GRK (Cakupan 1) langsung	0	0	0	1	1	1
19	305-2	Emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung	0	0	0	0	1	1
20	305-3	Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya	0	0	0	1	1	1
21	305-4	Intensitas emisi GRK	0	0	0	0	1	1
22	305-5	Pengurangan emisi GRK	0	0	0	0	0	1
23	305-6	Emisi zat perusak ozon (ODS)	0	0	0	0	0	1
24	305-7	Nitrogen oksida (NOX), sulfur oksida (SOX), dan emisi udara signifikan lainnya	0	0	0	0	0	1

25	306-1	Pelepasan air berdasarkan kualitas dan tujuan	0	0	0	0	0	0
26	306-2	Limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan	0	0	0	1	0	0
27	306-3	Tumpahan yang signifikan	0	0	0	0	0	0
28	306-4	Pengangkutan limbah berbahaya	0	0	0	0	0	0
29	306-5	Badan air yang dipengaruhi oleh pelepasan dan/atau limbah air	0	0	0	0	0	0
30	307-1	Ketidapatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup	0	0	0	0	0	0
31	308-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan	0	0	0	0	0	0
32	308-2	Dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil	0	0	0	0	0	0
GRI 400: Sosial								
1	401-1	Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan	1	1	1	1	1	1
2	401-2	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu	0	0	0	1	1	1
3	401-3	Cuti melahirkan	0	0	0	1	0	1
4	402-1	Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional	0	0	0	0	0	0
5	403-1	Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja	0	0	0	0	0	0

6	403-2	Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden	0	0	0	0	0	0
7	403-3	Layanan kesehatan kerja	0	0	0	0	0	0
8	403-4	Partisipasi, konsultasi, dan komunikasi pekerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja	0	0	0	0	0	0
9	403-5	Pelatihan bagi pekerja mengenai keselamatan dan kesehatan kerja	0	0	0	0	0	0
10	403-6	Peningkatan kualitas kesehatan pekerja	0	0	0	0	0	0
11	403-7	Pencegahan dan mitigasi dampak dari keselamatan dan kesehatan kerja yang secara langsung terkait hubungan bisnis	0	0	0	0	0	0
12	403-8	Pekerja yang tercakup dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja	0	0	0	0	0	0
13	403-9	Kecelakaan kerja	0	0	0	0	0	0
14	403-10	Penyakit akibat kerja	0	0	0	0	0	0
15	404-1	Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan	1	1	1	1	1	1
16	404-2	Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan	0	0	1	0	0	1
17	404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier	0	0	0	1	0	1
18	405-1	Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan	0	0	1	0	0	0
19	405-2	Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki	0	0	1	1	0	0

20	406-1	Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan	0	0	1	1	1	1
21	407-1	Operasi dan pemasok di mana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin berisiko	0	0	0	0	0	0
22	408-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak	0	0	0	0	0	1
23	409-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja	0	0	0	0	0	1
24	410-1	Petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia	0	0	0	0	0	0
25	411-1	Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat	0	0	0	0	0	0
26	412-1	Operasi-operasi yang telah melewati tinjauan hak asasi manusia atau penilaian dampak	0	0	0	0	0	0
27	412-2	Pelatihan karyawan mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia	0	0	0	0	0	0
28	412-3	Perjanjian dan kontrak investasi signifikan yang memasukkan klausul-klausul hak asasi manusia atau yang telah melalui penyaringan hak asasi manusia	0	0	0	0	0	0
29	413-1	Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan	1	0	1	1	1	1
30	413-2	Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal	1	0	0	0	0	1

31	414-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial	0	0	0	0	0	0
32	414-2	Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil	0	0	0	0	0	0
33	415-1	Kontribusi Politik	0	0	0	0	0	0
34	416-1	Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa	0	0	0	0	0	0
35	416-2	Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa	0	0	0	0	0	0
36	417-1	Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa	0	0	0	1	0	0
37	417-2	Insiden ketidakpatuhan terkait informasi dan pelabelan produk dan jasa	0	0	0	1	0	0
38	417-3	Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran	0	0	0	1	1	0
39	418-1	Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan	1	1	1	1	1	1
40	419-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan di bidang sosial dan ekonomi	0	0	0	0	0	0
		Parameter Dipenuhi	45	44	53	61	59	94
		Total Parameter Standar GRI	145	145	145	145	145	145

NO	INDEKS	PENGUNGKAPAN	BBTN			BJBR		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020

1	101	Landasan	1	1	1	1	1	1
2	102-1	Nama organisasi	1	1	1	1	1	1
3	102-2	Kegiatan, merek, produk, dan jasa	1	1	1	1	1	1
4	102-3	Lokasi kantor pusat	1	1	1	1	1	1
5	102-4	Lokasi operasi	1	1	1	1	1	1
6	102-5	Kepemilikan dan bentuk hukum	1	1	1	1	1	1
7	102-6	Pasar yang dilayani	1	1	1	1	1	1
8	102-7	Skala organisasi	1	1	1	1	1	1
9	102-8	Informasi mengenai karyawan dan pekerja lainnya	1	1	1	1	1	1
10	102-9	Rantai pasokan	1	1	1	1	1	1
11	102-10	Perubahan signifikan pada organisasi dan rantai pasokannya	1	1	1	1	1	1
12	102-11	Pendekatan atau Prinsip Pencegahan	1	1	1	1	1	1
13	102-12	Inisiatif Eksternal	1	1	1	1	1	1
14	102-13	Keanggotaan asosiasi	1	1	1	1	1	1
15	102-14	Pernyataan dari pembuat keputusan senior	1	1	1	1	1	1
16	102-15	Dampak penting, risiko, dan peluang	1	0	0	0	1	1
17	102-16	Nilai, prinsip, standar, dan norma perilaku	1	1	1	1	1	1
18	102-17	Mekanisme untuk saran dan masalah etika	1	0	0	1	1	1
19	102-18	Struktur tata kelola	1	1	1	1	1	1
20	102-19	Mendelegasikan wewenang	0	0	0	1	1	1
21	102-20	Tanggung jawab tingkat eksekutif untuk topik ekonomi, lingkungan, dan sosial	0	0	0	1	1	1

22	102-21	Berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan mengenai topik-topik ekonomi, lingkungan, dan sosial	0	0	0	0	1	1
23	102-22	Komposisi badan tata kelola tertinggi dan komitennya	0	0	0	0	1	1
24	102-23	Ketua badan tata kelola tertinggi	0	0	0	0	1	1
25	102-24	Menominasikan dan memilih badan tata kelola tertinggi	0	0	0	0	1	1
26	102-25	Konflik kepentingan	0	0	0	0	1	1
27	102-26	Peran badan tata kelola tertinggi dalam menetapkan tujuan, nilai-nilai, dan strategi	0	0	0	0	1	1
28	102-27	Pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi	0	0	0	0	1	1
29	102-28	Mengevaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi	0	0	0	0	1	1
30	102-29	Mengidentifikasi dan mengelola dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial	0	0	0	0	1	1
31	102-30	Keefektifan proses manajemen risiko	0	0	0	0	1	1
32	102-31	Pengkajian topik ekonomi, lingkungan, dan sosial	0	0	0	0	1	1
33	102-32	Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan	0	0	0	0	1	1
34	102-33	Mengomunikasikan hal-hal kritis	0	0	0	0	1	1
35	102-34	Sifat dan jumlah total hal-hal kritis	0	0	0	0	1	1
36	102-35	Kebijakan remunerasi	0	0	0	0	1	1
37	102-36	Proses untuk menentukan remunerasi	0	0	0	0	1	1
38	102-37	Keterlibatan para pemangku kepentingan dalam remunerasi	0	0	0	0	1	1
39	102-38	Rasio kompensasi total tahunan	0	0	0	0	1	1

40	102-39	Persentase kenaikan pada total rasio kompensasi total tahunan	0	0	0	0	1	1
41	102-40	Daftar kelompok pemangku kepentingan	1	1	1	1	1	1
42	102-41	Perjanjian perundingan kolektif	1	1	1	1	1	1
43	102-42	Mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan	1	1	1	1	1	1
44	102-43	Pendekatan untuk keterlibatan pemangku kepentingan	1	1	1	1	1	1
45	102-44	Topik utama dan hal-hal yang diajukan	1	1	1	1	1	1
46	102-45	Entitas yang termasuk dalam laporan keuangan dikonsolidasi	1	1	1	1	1	1
47	102-46	Menetapkan isi laporan dan Batasan topik	1	1	1	1	1	1
48	102-47	Daftar topik material	1	1	1	1	1	1
49	102-48	Penyajian kembali informasi	1	1	1	1	1	1
50	102-49	Perubahan dalam pelaporan	1	1	1	1	1	1
51	102-50	Periode pelaporan	1	1	1	1	1	1
52	102-51	Tanggal laporan terbaru	1	1	1	1	1	1
53	102-52	Siklus pelaporan	1	1	1	1	1	1
54	102-53	Titik kontak untuk pertanyaan mengenai laporan	1	1	1	1	1	1
55	102-54	Mengklaim pelaporan sesuai dengan Standar GRI	1	1	1	1	1	1
56	102-55	Indeks isi GRI	1	1	1	1	1	1
57	102-56	Assurance oleh pihak eksternal	1	1	1	1	1	1
58	103-1	Penjelasan topik material dan Batasannya	1	1	1	1	1	1
59	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	1	1	1	1	1	1
60	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	1	1	1	1	1	1
		STANDAR TOPIK SPESIFIK						

GRI 200: Ekonomi							
1	201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan	1	1	1	1	1
2	201-2	Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim	0	0	0	0	1
3	201-3	Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya	0	1	1	0	1
4	201-4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah	0	0	0	0	1
5	202-1	Rasio standar upah karyawan entry-level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional	0	1	1	1	0
6	202-2	Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal	0	0	0	0	0
7	203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan	0	1	1	1	1
8	203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan	1	1	1	0	1
9	204-1	Proporsi pengeluaran untuk pemasok local	0	1	1	0	0
10	205-1	Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi	0	0	0	0	1
11	205-2	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi	1	0	1	1	1
12	205-3	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil	0	0	0	0	1
13	206-1	Langkah-langkah hukum untuk perilaku anti-persaingan, praktik anti-trust dan monopoli	0	0	0	0	0

GRI 300: Lingkungan								
1	301-1	Material yang digunakan berdasarkan berat atau volume	1	1	1	0	1	1
2	301-2	Material input dari daur ulang yang digunakan	0	0	0	0	1	1
3	301-3	Produk reclaimed dan material kemasannya	0	0	0	0	1	1
4	302-1	Konsumsi energi dalam organisasi	0	1	1	1	1	1
5	302-2	Konsumsi energi di luar organisasi	1	0	0	0	1	1
6	302-3	Intensitas energi	1	0	0	0	1	1
7	302-4	Pengurangan konsumsi energi	1	1	1	0	1	1
8	302-5	Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa	0	0	0	0	0	1
9	303-1	Interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama	1	1	1	1	0	0
10	303-2	Manajemen dampak yang berkaitan dengan pembuangan air	0	0	0	0	0	0
11	303-3	Pengambilan air	0	0	0	0	0	0
12	303-4	Pembuangan air	0	0	0	0	0	0
13	303-5	Konsumsi air	0	0	0	0	0	0
14	304-1	Lokasi operasi yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung	0	0	0	0	0	0
15	304-2	Dampak signifikan dari kegiatan, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati	0	0	0	0	0	0
16	304-3	Habitat yang dilindungi atau direstorasi	0	0	0	0	0	0

17	304-4	Spesies Daftar Merah IUCN dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi	0	0	0	0	0	0
18	305-1	Emisi GRK (Cakupan 1) langsung	0	0	0	1	1	1
19	305-2	Emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung	1	0	0	0	1	1
20	305-3	Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya	0	0	0	0	1	1
21	305-4	Intensitas emisi GRK	0	0	0	0	1	1
22	305-5	Pengurangan emisi GRK	0	0	0	0	1	1
23	305-6	Emisi zat perusak ozon (ODS	0	0	0	0	1	1
24	305-7	Nitrogen oksida (NOX), sulfur oksida (SOX), dan emisi udara signifikan lainnya	0	0	0	0	1	1
25	306-1	Pelepasan air berdasarkan kualitas dan tujuan	0	0	0	0	0	0
26	306-2	Limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan	0	1	1	0	0	0
27	306-3	Tumpahan yang signifikan	0	0	0	0	0	0
28	306-4	Pengangkutan limbah berbahaya	0	0	0	0	0	0
29	306-5	Badan air yang dipengaruhi oleh pelepasan dan/atau limbah air	0	0	0	0	0	0
30	307-1	Ketidapatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup	0	1	1	0	0	0
31	308-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan	0	0	0	0	0	0
32	308-2	Dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil	0	0	0	0	0	0

GRI 400: Sosial							
1	401-1	Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan	1	1	1	1	1
2	401-2	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu	0	1	1	0	1
3	401-3	Cuti melahirkan	0	1	1	0	1
4	402-1	Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional	0	0	0	0	0
5	403-1	Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja	0	0	0	0	1
6	403-2	Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden	1	1	1	0	1
7	403-3	Layanan kesehatan kerja	0	1	1	0	1
8	403-4	Partisipasi, konsultasi, dan komunikasi pekerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja	0	0	0	0	1
9	403-5	Pelatihan bagi pekerja mengenai keselamatan dan kesehatan kerja	0	0	0	0	0
10	403-6	Peningkatan kualitas kesehatan pekerja	0	0	0	0	0
11	403-7	Pencegahan dan mitigasi dampak dari keselamatan dan kesehatan kerja yang secara langsung terkait hubungan bisnis	0	0	0	0	0
12	403-8	Pekerja yang tercakup dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja	0	0	0	0	0
13	403-9	Kecelakaan kerja	0	0	0	0	0

14	403-10	Penyakit akibat kerja	0	0	0	0	0	0
15	404-1	Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan	1	1	1	1	1	1
16	404-2	Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan	0	0	0	0	1	1
17	404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier	0	1	1	0	1	1
18	405-1	Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan	1	1	1	0	1	1
19	405-2	Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki	1	1	1	0	1	1
20	406-1	Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan	0	1	1	1	1	1
21	407-1	Operasi dan pemasok di mana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin berisiko	0	1	1	0	1	1
22	408-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak	0	1	1	0	1	1
23	409-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja	0	1	1	0	1	1
24	410-1	Petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia	0	0	0	0	0	0
25	411-1	Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat	0	0	0	0	0	0

26	412-1	Operasi-operasi yang telah melewati tinjauan hak asasi manusia atau penilaian dampak	0	0	0	0	0	0
27	412-2	Pelatihan karyawan mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia	0	0	0	0	0	0
28	412-3	Perjanjian dan kontrak investasi signifikan yang memasukkan klausul-klausul hak asasi manusia atau yang telah melalui penyaringan hak asasi manusia	0	0	0	0	0	0
29	413-1	Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan	1	1	1	1	1	0
30	413-2	Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal	0	0	0	0	1	0
31	414-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial	0	0	0	0	0	0
32	414-2	Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil	0	0	0	0	0	0
33	415-1	Kontribusi Politik	0	0	0	0	0	0
34	416-1	Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa	0	0	0	0	0	0
35	416-2	Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa	0	0	0	0	0	0
36	417-1	Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa	0	0	0	0	0	0
37	417-2	Insiden ketidakpatuhan terkait informasi dan pelabelan produk dan jasa	1	0	0	0	0	0

38	417-3	Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran	0	0	1	0	0	0
39	418-1	Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan	0	1	1	0	1	1
40	419-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan di bidang sosial dan ekonomi	0	1	1	0	0	0
		Parameter Dipenuhi	55	65	67	51	102	97
		Total Parameter Standar GRI	145	145	145	145	145	145

NO	INDEKS	PENGUNGKAPAN	BJTM			BMRI		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	101	Landasan	1	1	1	1	1	1
2	102-1	Nama organisasi	1	1	1	1	1	1
3	102-2	Kegiatan, merek, produk, dan jasa	1	1	1	1	1	1
4	102-3	Lokasi kantor pusat	1	1	1	1	1	1
5	102-4	Lokasi operasi	1	1	1	1	1	1
6	102-5	Kepemilikan dan bentuk hukum	1	1	1	1	1	1
7	102-6	Pasar yang dilayani	1	1	1	1	1	1
8	102-7	Skala organisasi	1	1	1	1	1	1
9	102-8	Informasi mengenai karyawan dan pekerja lainnya	1	1	1	1	1	1
10	102-9	Rantai pasokan	1	1	1	1	1	1
11	102-10	Perubahan signifikan pada organisasi dan rantai pasokannya	1	1	1	1	1	1
12	102-11	Pendekatan atau Prinsip Pencegahan	1	1	1	1	1	1

13	102-12	Inisiatif Eksternal	1	1	1	1	1	1
14	102-13	Keanggotaan asosiasi	1	1	1	1	1	1
15	102-14	Pernyataan dari pembuat keputusan senior	1	1	1	1	1	1
16	102-15	Dampak penting, risiko, dan peluang	1	1	0	0	0	0
17	102-16	Nilai, prinsip, standar, dan norma perilaku	1	1	1	1	1	1
18	102-17	Mekanisme untuk saran dan masalah etika	1	1	0	0	0	0
19	102-18	Struktur tata kelola	1	1	1	1	1	1
20	102-19	Mendelegasikan wewenang	1	1	0	0	0	0
21	102-20	Tanggung jawab tingkat eksekutif untuk topik ekonomi, lingkungan, dan sosial	1	1	0	0	0	0
22	102-21	Berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan mengenai topik-topik ekonomi, lingkungan, dan sosial	1	1	0	0	0	0
23	102-22	Komposisi badan tata kelola tertinggi dan komitennya	1	1	0	0	0	0
24	102-23	Ketua badan tata kelola tertinggi	1	1	0	0	0	0
25	102-24	Menominasikan dan memilih badan tata kelola tertinggi	1	1	0	0	0	0
26	102-25	Konflik kepentingan	1	1	0	0	0	0
27	102-26	Peran badan tata kelola tertinggi dalam menetapkan tujuan, nilai-nilai, dan strategi	1	1	0	0	0	0
28	102-27	Pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi	1	1	0	0	0	0
29	102-28	Mengevaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi	1	1	0	0	0	0
30	102-29	Mengidentifikasi dan mengelola dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial	1	1	0	0	0	0
31	102-30	Keefektifan proses manajemen risiko	1	1	0	0	0	0

32	102-31	Pengkajian topik ekonomi, lingkungan, dan sosial	1	1	0	0	0	0
33	102-32	Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan	1	1	0	0	0	0
34	102-33	Mengomunikasikan hal-hal kritis	1	1	0	0	0	0
35	102-34	Sifat dan jumlah total hal-hal kritis	1	1	0	0	0	0
36	102-35	Kebijakan remunerasi	1	1	0	0	0	0
37	102-36	Proses untuk menentukan remunerasi	1	1	0	0	0	0
38	102-37	Keterlibatan para pemangku kepentingan dalam remunerasi	1	1	0	0	0	0
39	102-38	Rasio kompensasi total tahunan	1	1	0	0	0	0
40	102-39	Persentase kenaikan pada total rasio kompensasi total tahunan	1	1	0	0	0	0
41	102-40	Daftar kelompok pemangku kepentingan	1	1	1	1	1	1
42	102-41	Perjanjian perundingan kolektif	1	1	1	1	1	1
43	102-42	Mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan	1	1	1	1	1	1
44	102-43	Pendekatan untuk keterlibatan pemangku kepentingan	1	1	1	1	1	1
45	102-44	Topik utama dan hal-hal yang diajukan	1	1	1	1	1	1
46	102-45	Entitas yang termasuk dalam laporan keuangan dikonsolidasi	1	1	1	1	1	1
47	102-46	Menetapkan isi laporan dan Batasan topik	1	1	1	1	1	1
48	102-47	Daftar topik material	1	1	1	1	1	1
49	102-48	Penyajian kembali informasi	1	1	1	1	1	1
50	102-49	Perubahan dalam pelaporan	1	1	1	1	1	1
51	102-50	Periode pelaporan	1	1	1	1	1	1

52	102-51	Tanggal laporan terbaru	1	1	1	1	1	1
53	102-52	Siklus pelaporan	1	1	1	1	1	1
54	102-53	Titik kontak untuk pertanyaan mengenai laporan	1	1	1	1	1	1
55	102-54	Mengklaim pelaporan sesuai dengan Standar GRI	1	1	1	1	1	1
56	102-55	Indeks isi GRI	1	1	1	1	1	1
57	102-56	Assurance oleh pihak eksternal	1	1	1	1	1	1
58	103-1	Penjelasan topik material dan Batasannya	1	1	1	1	1	1
59	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	1	1	1	1	1	1
60	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	1	1	1	1	1	1
STANDAR TOPIK SPESIFIK								
GRI 200: Ekonomi								
1	201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan	1	0	1	1	1	1
2	201-2	Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim	1	0	0	0	0	0
3	201-3	Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya	1	0	0	0	1	1
4	201-4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah	1	0	0	0	0	0
5	202-1	Rasio standar upah karyawan entry-level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional	1	0	1	0	0	0
6	202-2	Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal	1	1	0	0	0	0
7	203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan	1	1	1	0	1	1

8	203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan	1	1	1	0	1	1
9	204-1	Proporsi pengeluaran untuk pemasok local	1	0	0	0	0	0
10	205-1	Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi	1	0	0	0	1	1
11	205-2	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi	1	1	0	0	1	1
12	205-3	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil	1	1	0	0	1	1
13	206-1	Langkah-langkah hukum untuk perilaku anti-persaingan, praktik anti-trust dan monopoli	1	1	0	0	0	0
GRI 300: Lingkungan								
1	301-1	Material yang digunakan berdasarkan berat atau volume	0	0	1	0	0	0
2	301-2	Material input dari daur ulang yang digunakan	0	0	0	0	0	0
3	301-3	Produk reclaimed dan material kemasannya	0	0	0	0	0	0
4	302-1	Konsumsi energi dalam organisasi	1	1	1	0	1	1
5	302-2	Konsumsi energi di luar organisasi	1	1	0	0	0	0
6	302-3	Intensitas energi	1	1	0	0	0	0
7	302-4	Pengurangan konsumsi energi	1	1	1	0	1	1
8	302-5	Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa	1	0	0	0	0	0
9	303-1	Interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama	1	1	1	0	1	1
10	303-2	Manajemen dampak yang berkaitan dengan pembuangan air	1	0	0	0	0	0
11	303-3	Pengambilan air	1	0	0	0	1	1

12	303-4	Pembuangan air	0	0	0	0	0	0
13	303-5	Konsumsi air	1	0	0	0	0	0
14	304-1	Lokasi operasi yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung	0	0	0	0	0	0
15	304-2	Dampak signifikan dari kegiatan, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati	0	0	0	0	0	0
16	304-3	Habitat yang dilindungi atau direstorasi	0	0	0	0	0	0
17	304-4	Spesies Daftar Merah IUCN dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi	0	0	0	0	0	0
18	305-1	Emisi GRK (Cakupan 1) langsung	0	1	0	0	1	1
19	305-2	Emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung	0	0	0	0	0	0
20	305-3	Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya	0	1	0	0	0	0
21	305-4	Intensitas emisi GRK	0	0	0	0	0	0
22	305-5	Pengurangan emisi GRK	1	0	0	0	0	0
23	305-6	Emisi zat perusak ozon (ODS)	0	0	0	0	0	1
24	305-7	Nitrogen oksida (NOX), sulfur oksida (SOX), dan emisi udara signifikan lainnya	0	0	0	0	0	0
25	306-1	Pelepasan air berdasarkan kualitas dan tujuan	0	0	0	0	1	1
26	306-2	Limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan	0	0	0	0	0	0
27	306-3	Tumpahan yang signifikan	0	0	0	0	0	0

28	306-4	Pengangkutan limbah berbahaya	0	0	0	0	0	0
29	306-5	Badan air yang dipengaruhi oleh pelepasan dan/atau limbah air	0	0	0	0	0	0
30	307-1	Ketidapatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup	1	0	0	0	1	1
31	308-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan	0	0	0	0	0	0
32	308-2	Dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil	0	0	0	0	0	0
GRI 400: Sosial								
1	401-1	Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan	1	1	1	1	1	1
2	401-2	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu	1	1	0	1	1	1
3	401-3	Cuti melahirkan	1	1	0	1	1	1
4	402-1	Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional	1	1	0	0	0	0
5	403-1	Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja	1	1	1	0	0	0
6	403-2	Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden	1	1	1	0	0	0
7	403-3	Layanan kesehatan kerja	1	0	0	0	0	0
8	403-4	Partisipasi, konsultasi, dan komunikasi pekerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja	1	0	0	0	1	1

9	403-5	Pelatihan bagi pekerja mengenai keselamatan dan kesehatan kerja	0	0	0	0	0	0
10	403-6	Peningkatan kualitas kesehatan pekerja	0	0	0	0	0	0
11	403-7	Pencegahan dan mitigasi dampak dari keselamatan dan kesehatan kerja yang secara langsung terkait hubungan bisnis	0	0	0	0	0	0
12	403-8	Pekerja yang tercakup dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja	0	0	0	0	0	0
13	403-9	Kecelakaan kerja	0	0	0	0	0	0
14	403-10	Penyakit akibat kerja	0	0	0	0	0	0
15	404-1	Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan	1	1	0	1	1	1
16	404-2	Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan	1	1	1	1	1	1
17	404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier	1	1	0	1	1	1
18	405-1	Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan	1	1	0	1	1	1
19	405-2	Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki	1	1	0	1	0	1
20	406-1	Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan	1	1	0	0	0	0
21	407-1	Operasi dan pemasok di mana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin berisiko	1	1	0	0	0	0

22	408-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak	1	1	0	0	0	0
23	409-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja	0	0	0	0	0	0
24	410-1	Petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia	0	0	0	0	0	0
25	411-1	Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat	0	0	0	0	0	0
26	412-1	Operasi-operasi yang telah melewati tinjauan hak asasi manusia atau penilaian dampak	0	0	0	0	0	0
27	412-2	Pelatihan karyawan mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia	0	0	0	0	0	0
28	412-3	Perjanjian dan kontrak investasi signifikan yang memasukkan klausul-klausul hak asasi manusia atau yang telah melalui penyaringan hak asasi manusia	0	0	0	0	0	0
29	413-1	Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan	1	1	1	0	0	0
30	413-2	Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal	1	0	1	0	0	0
31	414-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial	1	0	0	0	0	0
32	414-2	Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil	1	0	0	0	0	0

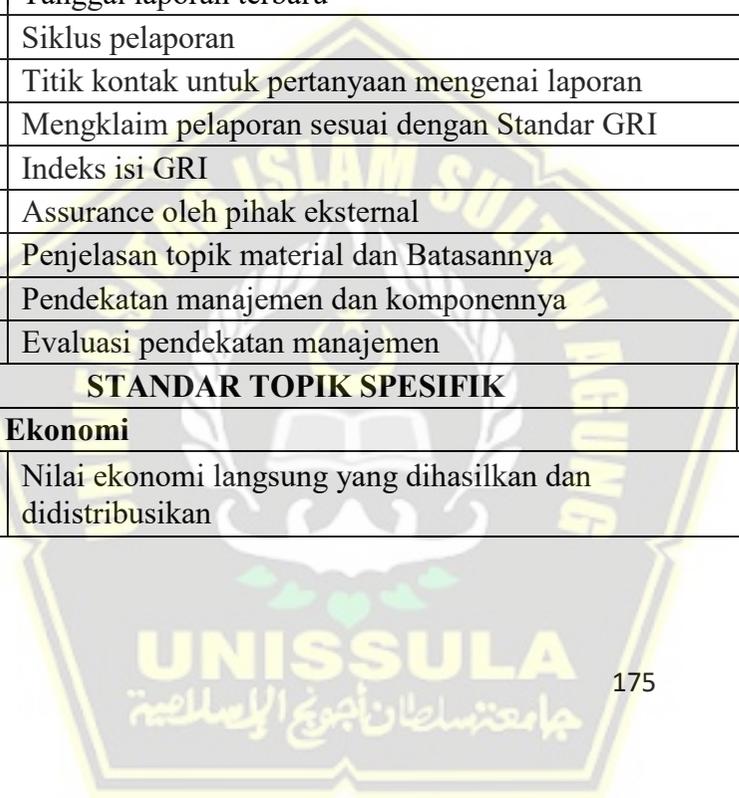
33	415-1	Kontribusi Politik	1	1	0	0	0	0
34	416-1	Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa	0	0	0	0	0	0
35	416-2	Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa	0	0	0	0	0	0
36	417-1	Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa	0	1	0	0	0	0
37	417-2	Insiden ketidakpatuhan terkait informasi dan pelabelan produk dan jasa	0	1	0	0	0	0
38	417-3	Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran	0	1	0	0	0	0
39	418-1	Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan	1	0	1	1	1	1
40	419-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan di bidang sosial dan ekonomi	1	0	0	0	1	1
		Parameter Dipenuhi	107	92	52	47	61	63
		Total Parameter Standar GRI	145	145	145	145	145	145

NO	INDEKS	PENGUNGKAPAN	BNLI			ELSA		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	101	Landasan	1	1	1	1	1	1
2	102-1	Nama organisasi	1	1	1	1	1	1
3	102-2	Kegiatan, merek, produk, dan jasa	1	1	1	1	1	1
4	102-3	Lokasi kantor pusat	1	1	1	1	1	1

5	102-4	Lokasi operasi	1	1	1	1	1	1
6	102-5	Kepemilikan dan bentuk hukum	1	1	1	1	1	1
7	102-6	Pasar yang dilayani	1	1	1	1	1	1
8	102-7	Skala organisasi	1	1	1	1	1	1
9	102-8	Informasi mengenai karyawan dan pekerja lainnya	1	1	1	1	1	1
10	102-9	Rantai pasokan	1	1	1	1	1	1
11	102-10	Perubahan signifikan pada organisasi dan rantai pasokannya	1	1	1	1	1	1
12	102-11	Pendekatan atau Prinsip Pencegahan	1	1	1	1	1	1
13	102-12	Inisiatif Eksternal	1	1	1	1	1	1
14	102-13	Keanggotaan asosiasi	1	1	1	1	1	1
15	102-14	Pernyataan dari pembuat keputusan senior	1	1	1	1	1	1
16	102-15	Dampak penting, risiko, dan peluang	1	1	0	0	1	1
17	102-16	Nilai, prinsip, standar, dan norma perilaku	1	1	1	1	1	1
18	102-17	Mekanisme untuk saran dan masalah etika	1	1	1	0	1	1
19	102-18	Struktur tata kelola	1	1	1	1	1	1
20	102-19	Mendelegasikan wewenang	0	0	0	0	1	1
21	102-20	Tanggung jawab tingkat eksekutif untuk topik ekonomi, lingkungan, dan sosial	0	0	0	0	1	1
22	102-21	Berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan mengenai topik-topik ekonomi, lingkungan, dan sosial	0	0	0	0	1	1
23	102-22	Komposisi badan tata kelola tertinggi dan komitennya	0	0	1	0	1	1
24	102-23	Ketua badan tata kelola tertinggi	0	0	0	0	1	1

25	102-24	Menominasikan dan memilih badan tata kelola tertinggi	0	0	0	0	1	1
26	102-25	Konflik kepentingan	0	0	0	0	1	1
27	102-26	Peran badan tata kelola tertinggi dalam menetapkan tujuan, nilai-nilai, dan strategi	0	0	0	0	1	1
28	102-27	Pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi	0	0	0	0	1	1
29	102-28	Mengevaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi	0	0	0	0	1	1
30	102-29	Mengidentifikasi dan mengelola dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial	0	0	0	0	1	1
31	102-30	Keefektifan proses manajemen risiko	0	0	0	0	1	1
32	102-31	Pengkajian topik ekonomi, lingkungan, dan sosial	0	0	0	0	1	1
33	102-32	Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan	0	0	0	0	1	1
34	102-33	Mengomunikasikan hal-hal kritis	0	0	0	0	1	1
35	102-34	Sifat dan jumlah total hal-hal kritis	0	0	0	0	1	1
36	102-35	Kebijakan remunerasi	0	0	0	0	1	1
37	102-36	Proses untuk menentukan remunerasi	0	0	0	0	1	1
38	102-37	Keterlibatan para pemangku kepentingan dalam remunerasi	0	0	0	0	1	1
39	102-38	Rasio kompensasi total tahunan	0	0	0	0	1	1
40	102-39	Persentase kenaikan pada total rasio kompensasi total tahunan	0	0	0	0	1	1
41	102-40	Daftar kelompok pemangku kepentingan	1	1	1	1	1	1
42	102-41	Perjanjian perundingan kolektif	1	1	1	1	1	1

43	102-42	Mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan	1	1	1	1	1	1
44	102-43	Pendekatan untuk keterlibatan pemangku kepentingan	1	1	1	1	1	1
45	102-44	Topik utama dan hal-hal yang diajukan	1	1	1	1	1	1
46	102-45	Entitas yang termasuk dalam laporan keuangan dikonsolidasi	1	1	1	1	1	1
47	102-46	Menetapkan isi laporan dan Batasan topik	1	1	1	1	1	1
48	102-47	Daftar topik material	1	1	1	1	1	1
49	102-48	Penyajian kembali informasi	1	1	1	1	1	1
50	102-49	Perubahan dalam pelaporan	1	1	1	1	1	1
51	102-50	Periode pelaporan	1	1	1	1	1	1
52	102-51	Tanggal laporan terbaru	1	1	1	1	1	1
53	102-52	Siklus pelaporan	1	1	1	1	1	1
54	102-53	Titik kontak untuk pertanyaan mengenai laporan	1	1	1	1	1	1
55	102-54	Mengklaim pelaporan sesuai dengan Standar GRI	1	1	1	1	1	1
56	102-55	Indeks isi GRI	1	1	1	1	1	1
57	102-56	Assurance oleh pihak eksternal	1	1	1	1	1	1
58	103-1	Penjelasan topik material dan Batasannya	1	1	1	1	1	1
59	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	1	1	1	1	1	1
60	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	1	1	1	1	1	1
STANDAR TOPIK SPESIFIK								
GRI 200: Ekonomi								
1	201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan	1	1	1	1	1	1



2	201-2	Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim	0	0	0	0	0	0
3	201-3	Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya	0	0	0	0	0	0
4	201-4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah	0	0	0	0	0	0
5	202-1	Rasio standar upah karyawan entry-level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional	0	0	0	0	0	0
6	202-2	Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal	0	0	0	0	0	0
7	203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan	0	0	0	0	0	0
8	203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan	1	1	1	0	0	0
9	204-1	Proporsi pengeluaran untuk pemasok local	0	0	0	0	0	0
10	205-1	Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi	0	0	0	0	0	0
11	205-2	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi	1	1	1	1	1	1
12	205-3	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil	0	0	1	0	0	0
13	206-1	Langkah-langkah hukum untuk perilaku anti-persaingan, praktik anti-trust dan monopoli	0	0	0	0	0	0
GRI 300: Lingkungan								
1	301-1	Material yang digunakan berdasarkan berat atau volume	1	0	0	0	0	1
2	301-2	Material input dari daur ulang yang digunakan	0	0	0	0	0	0

3	301-3	Produk reclaimed dan material kemasannya	0	0	0	0	0	0
4	302-1	Konsumsi energi dalam organisasi	0	0	1	0	0	1
5	302-2	Konsumsi energi di luar organisasi	1	1	0	0	0	0
6	302-3	Intensitas energi	1	1	1	0	0	0
7	302-4	Pengurangan konsumsi energi	1	1	1	0	0	0
8	302-5	Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa	0	0	0	0	0	0
9	303-1	Interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama	1	1	1	0	0	0
10	303-2	Manajemen dampak yang berkaitan dengan pembuangan air	0	0	0	0	0	0
11	303-3	Pengambilan air	0	0	0	0	0	0
12	303-4	Pembuangan air	0	0	0	0	0	0
13	303-5	Konsumsi air	0	0	0	0	0	0
14	304-1	Lokasi operasi yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung	0	0	0	0	0	0
15	304-2	Dampak signifikan dari kegiatan, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati	0	0	0	0	0	0
16	304-3	Habitat yang dilindungi atau direstorasi	0	0	0	0	0	0
17	304-4	Spesies Daftar Merah IUCN dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi	0	0	0	0	0	0
18	305-1	Emisi GRK (Cakupan 1) langsung	0	0	0	0	0	0

19	305-2	Emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung	1	0	0	0	0	0
20	305-3	Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya	0	0	0	0	0	0
21	305-4	Intensitas emisi GRK	0	1	1	0	0	0
22	305-5	Pengurangan emisi GRK	0	1	1	0	0	0
23	305-6	Emisi zat perusak ozon (ODS	0	0	0	0	0	0
24	305-7	Nitrogen oksida (NOX), sulfur oksida (SOX), dan emisi udara signifikan lainnya	0	0	0	0	0	0
25	306-1	Pelepasan air berdasarkan kualitas dan tujuan	0	0	0	0	0	0
26	306-2	Limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan	0	0	0	0	0	0
27	306-3	Tumpahan yang signifikan	0	0	0	0	0	0
28	306-4	Pengangkutan limbah berbahaya	0	0	0	0	0	1
29	306-5	Badan air yang dipengaruhi oleh pelepasan dan/atau limbah air	0	0	0	0	0	0
30	307-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup	0	0	0	0	0	0
31	308-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan	0	0	0	0	0	0
32	308-2	Dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil	0	0	0	0	0	0
GRI 400: Sosial								
1	401-1	Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan	1	1	1	1	1	1

2	401-2	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu	0	0	0	0	0	0
3	401-3	Cuti melahirkan	0	0	1	0	0	0
4	402-1	Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional	0	0	0	0	0	0
5	403-1	Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja	0	0	1	0	0	0
6	403-2	Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden	1	1	1	1	1	1
7	403-3	Layanan kesehatan kerja	0	0	1	0	0	0
8	403-4	Partisipasi, konsultasi, dan komunikasi pekerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja	0	0	0	0	0	0
9	403-5	Pelatihan bagi pekerja mengenai keselamatan dan kesehatan kerja	0	0	1	0	0	0
10	403-6	Peningkatan kualitas kesehatan pekerja	0	0	1	0	0	0
11	403-7	Pencegahan dan mitigasi dampak dari keselamatan dan kesehatan kerja yang secara langsung terkait hubungan bisnis	0	0	0	0	0	0
12	403-8	Pekerja yang tercakup dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja	0	0	1	0	0	0
13	403-9	Kecelakaan kerja	0	0	1	0	0	0
14	403-10	Penyakit akibat kerja	0	0	0	0	0	0
15	404-1	Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan	1	1	1	1	1	1

16	404-2	Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan	1	1	1	0	0	0
17	404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier	0	1	1	0	0	0
18	405-1	Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan	1	1	1	0	0	0
19	405-2	Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki	1	1	1	0	0	0
20	406-1	Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan	0	0	0	0	0	0
21	407-1	Operasi dan pemasok di mana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin berisiko	0	0	0	0	0	0
22	408-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak	0	0	0	0	0	0
23	409-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja	0	0	0	0	0	0
24	410-1	Petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia	0	0	0	0	0	0
25	411-1	Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat	0	0	0	0	0	0
26	412-1	Operasi-operasi yang telah melewati tinjauan hak asasi manusia atau penilaian dampak	0	0	0	0	0	0
27	412-2	Pelatihan karyawan mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia	0	0	0	0	0	0

28	412-3	Perjanjian dan kontrak investasi signifikan yang memasukkan klausul-klausul hak asasi manusia atau yang telah melalui penyaringan hak asasi manusia	0	0	0	0	0	0
29	413-1	Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan	1	1	1	0	0	0
30	413-2	Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal	0	0	1	0	0	0
31	414-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial	0	0	0	0	0	0
32	414-2	Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil	0	0	0	0	0	0
33	415-1	Kontribusi Politik	0	0	0	0	0	0
34	416-1	Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa	0	0	0	0	0	0
35	416-2	Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa	0	0	0	0	0	0
36	417-1	Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa	0	0	0	0	0	0
37	417-2	Insiden ketidakpatuhan terkait informasi dan pelabelan produk dan jasa	1	1	1	0	0	0
38	417-3	Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran	0	0	0	0	0	0
39	418-1	Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan	1	1	1	0	0	0

40	419-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan di bidang sosial dan ekonomi	0	0	0	0	0	0
		Parameter Dipenuhi	57	58	67	42	65	68
		Total Parameter Standar GRI	145	145	145	145	145	145

NO	INDEKS	PENGUNGKAPAN	EXCL			INTP		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	101	Landasan	1	1	1	1	1	1
2	102-1	Nama organisasi	1	1	1	1	1	1
3	102-2	Kegiatan, merek, produk, dan jasa	1	1	1	1	1	1
4	102-3	Lokasi kantor pusat	1	1	1	1	1	1
5	102-4	Lokasi operasi	1	1	1	1	1	1
6	102-5	Kepemilikan dan bentuk hukum	1	1	1	1	1	1
7	102-6	Pasar yang dilayani	1	1	1	1	1	1
8	102-7	Skala organisasi	1	1	1	1	1	1
9	102-8	Informasi mengenai karyawan dan pekerja lainnya	1	1	1	1	1	1
10	102-9	Rantai pasokan	1	1	1	1	1	1
11	102-10	Perubahan signifikan pada organisasi dan rantai pasokannya	1	1	0	1	1	1
12	102-11	Pendekatan atau Prinsip Pencegahan	1	1	0	1	1	1
13	102-12	Inisiatif Eksternal	1	1	0	1	1	1
14	102-13	Keanggotaan asosiasi	1	1	1	1	1	1
15	102-14	Pernyataan dari pembuat keputusan senior	1	1	1	1	1	1

16	102-15	Dampak penting, risiko, dan peluang	0	1	0	1	0	0
17	102-16	Nilai, prinsip, standar, dan norma perilaku	1	0	1	1	1	1
18	102-17	Mekanisme untuk saran dan masalah etika	1	1	0	0	0	0
19	102-18	Struktur tata kelola	1	1	1	1	1	1
20	102-19	Mendelegasikan wewenang	0	0	0	0	0	0
21	102-20	Tanggung jawab tingkat eksekutif untuk topik ekonomi, lingkungan, dan sosial	0	0	0	0	0	0
22	102-21	Berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan mengenai topik-topik ekonomi, lingkungan, dan sosial	0	0	0	0	0	0
23	102-22	Komposisi badan tata kelola tertinggi dan komitennya	1	0	0	0	0	0
24	102-23	Ketua badan tata kelola tertinggi	1	0	0	0	0	0
25	102-24	Menominasikan dan memilih badan tata kelola tertinggi	0	0	0	0	0	0
26	102-25	Konflik kepentingan	0	0	0	0	0	0
27	102-26	Peran badan tata kelola tertinggi dalam menetapkan tujuan, nilai-nilai, dan strategi	0	0	0	0	0	0
28	102-27	Pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi	1	0	0	0	0	0
29	102-28	Mengevaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi	1	0	0	0	0	0
30	102-29	Mengidentifikasi dan mengelola dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial	0	0	0	0	0	0
31	102-30	Keefektifan proses manajemen risiko	0	0	0	0	0	0
32	102-31	Pengkajian topik ekonomi, lingkungan, dan sosial	0	0	0	0	0	0
33	102-32	Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan	0	0	0	0	0	0

34	102-33	Mengomunikasikan hal-hal kritis	0	0	0	0	0	0
35	102-34	Sifat dan jumlah total hal-hal kritis	0	0	0	0	0	0
36	102-35	Kebijakan remunerasi	0	0	0	0	0	0
37	102-36	Proses untuk menentukan remunerasi	0	0	0	0	0	0
38	102-37	Keterlibatan para pemangku kepentingan dalam remunerasi	0	0	0	0	0	0
39	102-38	Rasio kompensasi total tahunan	0	0	0	0	0	0
40	102-39	Persentase kenaikan pada total rasio kompensasi total tahunan	0	0	0	0	0	0
41	102-40	Daftar kelompok pemangku kepentingan	1	1	0	1	1	1
42	102-41	Perjanjian perundingan kolektif	1	1	1	1	1	1
43	102-42	Mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan	1	1	0	1	1	1
44	102-43	Pendekatan untuk keterlibatan pemangku kepentingan	1	1	0	1	1	1
45	102-44	Topik utama dan hal-hal yang diajukan	1	1	1	1	1	1
46	102-45	Entitas yang termasuk dalam laporan keuangan dikonsolidasi	1	1	1	1	1	1
47	102-46	Menetapkan isi laporan dan Batasan topik	1	1	1	1	1	1
48	102-47	Daftar topik material	1	1	1	1	1	1
49	102-48	Penyajian kembali informasi	1	1	1	1	1	1
50	102-49	Perubahan dalam pelaporan	1	1	1	1	1	1
51	102-50	Periode pelaporan	1	1	1	1	1	1
52	102-51	Tanggal laporan terbaru	1	1	1	1	1	1
53	102-52	Siklus pelaporan	1	1	1	1	1	1
54	102-53	Titik kontak untuk pertanyaan mengenai laporan	1	1	1	1	1	1

55	102-54	Mengklaim pelaporan sesuai dengan Standar GRI	1	1	1	1	1	1
56	102-55	Indeks isi GRI	1	1	1	1	1	1
57	102-56	Assurance oleh pihak eksternal	1	1	1	1	1	1
58	103-1	Penjelasan topik material dan Batasannya	1	1	1	1	1	1
59	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	1	1	1	1	1	1
60	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	1	1	1	1	1	1
	STANDAR TOPIK SPESIFIK							
	GRI 200: Ekonomi							
1	201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan	1	1	1	1	1	1
2	201-2	Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim	0	0	0	0	0	0
3	201-3	Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya	1	1	1	0	0	0
4	201-4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah	0	0	0	0	0	0
5	202-1	Rasio standar upah karyawan entry-level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional	0	0	1	0	0	0
6	202-2	Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal	0	0	0	0	0	0
7	203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan	1	1	1	0	0	0
8	203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan	1	1	1	0	0	0
9	204-1	Proporsi pengeluaran untuk pemasok local	0	1	1	0	0	0

10	205-1	Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi	1	0	0	0	0	0
11	205-2	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi	0	1	1	0	0	0
12	205-3	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil	1	1	1	0	0	0
13	206-1	Langkah-langkah hukum untuk perilaku anti-persaingan, praktik anti-trust dan monopoli	0	0	0	0	0	0
GRI 300: Lingkungan								
1	301-1	Material yang digunakan berdasarkan berat atau volume	0	0	0	0	0	0
2	301-2	Material input dari daur ulang yang digunakan	0	0	0	0	0	0
3	301-3	Produk reclaimed dan material kemasannya	0	0	0	0	0	0
4	302-1	Konsumsi energi dalam organisasi	1	1	1	1	1	1
5	302-2	Konsumsi energi di luar organisasi	0	0	0	1	1	1
6	302-3	Intensitas energi	1	1	1	1	1	1
7	302-4	Pengurangan konsumsi energi	1	1	1	0	0	1
8	302-5	Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa	0	0	0	0	0	0
9	303-1	Interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama	1	0	0	0	0	0
10	303-2	Manajemen dampak yang berkaitan dengan pembuangan air	0	0	0	0	0	0
11	303-3	Pengambilan air	0	0	0	0	0	0
12	303-4	Pembuangan air	0	0	0	0	0	0
13	303-5	Konsumsi air	0	0	0	0	0	0

14	304-1	Lokasi operasi yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung	0	0	0	0	0	0
15	304-2	Dampak signifikan dari kegiatan, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati	0	0	0	0	0	1
16	304-3	Habitat yang dilindungi atau direstorasi	0	0	0	0	0	1
17	304-4	Spesies Daftar Merah IUCN dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi	0	0	0	1	1	1
18	305-1	Emisi GRK (Cakupan 1) langsung	1	1	1	0	0	0
19	305-2	Emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung	0	1	1	0	0	0
20	305-3	Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya	0	0	0	0	0	0
21	305-4	Intensitas emisi GRK	0	1	0	0	1	1
22	305-5	Pengurangan emisi GRK	0	1	1	0	1	1
23	305-6	Emisi zat perusak ozon (ODS	0	0	0	0	0	0
24	305-7	Nitrogen oksida (NOX), sulfur oksida (SOX), dan emisi udara signifikan lainnya	0	0	0	0	1	1
25	306-1	Pelepasan air berdasarkan kualitas dan tujuan	0	0	0	0	0	1
26	306-2	Limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan	0	0	0	1	1	1
27	306-3	Tumpahan yang signifikan	0	0	0	0	0	0
28	306-4	Pengangkutan limbah berbahaya	0	0	0	0	0	1

29	306-5	Badan air yang dipengaruhi oleh pelepasan dan/atau limbah air	0	0	0	0	0	0
30	307-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup	0	0	0	0	0	0
31	308-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan	0	0	0	0	0	0
32	308-2	Dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil	0	0	0	0	0	0
GRI 400: Sosial								
1	401-1	Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan	1	1	1	0	0	0
2	401-2	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu	0	1	1	0	0	0
3	401-3	Cuti melahirkan	0	0	0	0	0	0
4	402-1	Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional	0	0	0	0	0	0
5	403-1	Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja	1	1	1	1	1	1
6	403-2	Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden	1	0	0	1	0	1
7	403-3	Layanan kesehatan kerja	0	0	0	1	0	1
8	403-4	Partisipasi, konsultasi, dan komunikasi pekerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja	0	0	0	0	0	1

9	403-5	Pelatihan bagi pekerja mengenai keselamatan dan kesehatan kerja	0	0	0	0	0	1
10	403-6	Peningkatan kualitas kesehatan pekerja	0	0	0	0	0	1
11	403-7	Pencegahan dan mitigasi dampak dari keselamatan dan kesehatan kerja yang secara langsung terkait hubungan bisnis	0	0	0	0	0	1
12	403-8	Pekerja yang tercakup dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja	0	0	0	0	0	1
13	403-9	Kecelakaan kerja	0	0	0	0	1	1
14	403-10	Penyakit akibat kerja	0	0	0	0	0	0
15	404-1	Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan	1	1	1	0	0	0
16	404-2	Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan	0	1	1	0	0	0
17	404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier	1	1	1	0	0	0
18	405-1	Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan	0	1	0	0	0	0
19	405-2	Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki	0	1	1	0	0	0
20	406-1	Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan	0	1	1	0	0	0
21	407-1	Operasi dan pemasok di mana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin berisiko	0	0	0	0	0	0

22	408-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak	0	0	0	0	0	0
23	409-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja	0	0	0	0	0	0
24	410-1	Petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia	0	0	0	0	0	0
25	411-1	Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat	0	0	0	0	0	0
26	412-1	Operasi-operasi yang telah melewati tinjauan hak asasi manusia atau penilaian dampak	0	0	0	0	0	0
27	412-2	Pelatihan karyawan mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia	0	0	0	0	0	0
28	412-3	Perjanjian dan kontrak investasi signifikan yang memasukkan klausul-klausul hak asasi manusia atau yang telah melalui penyaringan hak asasi manusia	0	0	0	0	0	0
29	413-1	Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan	1	1	1	0	1	1
30	413-2	Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal	0	0	0	0	0	0
31	414-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial	1	0	0	0	0	0
32	414-2	Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil	0	0	0	0	0	0

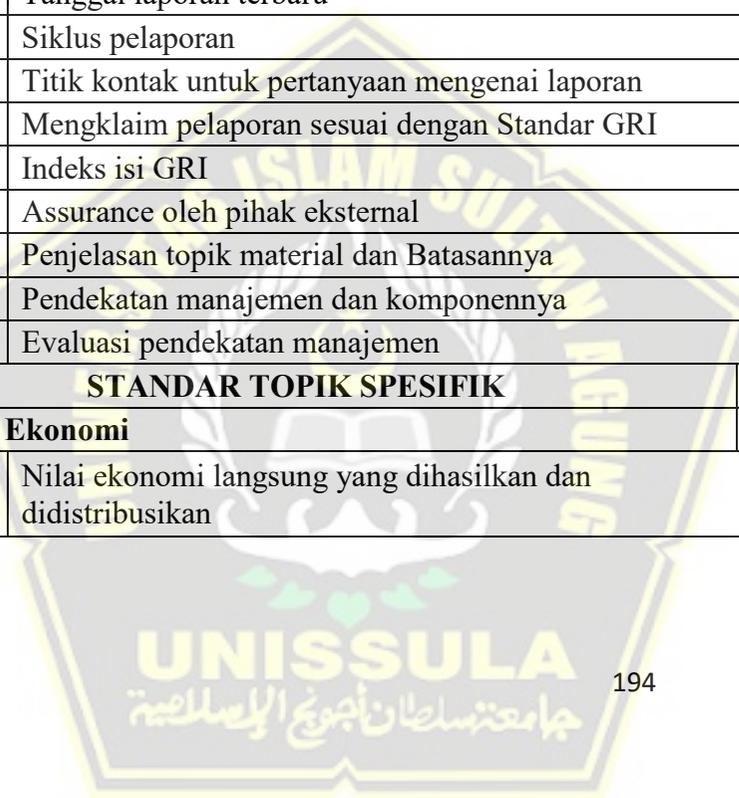
33	415-1	Kontribusi Politik	0	0	0	0	0	0
34	416-1	Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa	0	0	0	0	0	0
35	416-2	Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa	0	0	0	0	0	0
36	417-1	Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa	1	0	0	0	0	0
37	417-2	Insiden ketidakpatuhan terkait informasi dan pelabelan produk dan jasa	0	0	0	0	0	0
38	417-3	Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran	0	1	1	0	0	0
39	418-1	Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan	1	1	1	0	0	0
40	419-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan di bidang sosial dan ekonomi	1	0	0	0	0	0
		Parameter Dipenuhi	63	64	56	47	49	61
		Total Parameter Standar GRI	145	145	145	145	145	145

NO	INDEKS	PENGUNGKAPAN	JPFA			JSMR		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	101	Landasan	1	1	1	1	1	1
2	102-1	Nama organisasi	1	1	1	1	1	1
3	102-2	Kegiatan, merek, produk, dan jasa	1	1	1	1	1	1
4	102-3	Lokasi kantor pusat	1	1	1	1	1	1

5	102-4	Lokasi operasi	1	1	1	1	1	1
6	102-5	Kepemilikan dan bentuk hokum	1	1	1	1	1	1
7	102-6	Pasar yang dilayani	1	1	1	1	1	1
8	102-7	Skala organisasi	1	1	1	1	1	1
9	102-8	Informasi mengenai karyawan dan pekerja lainnya	1	1	1	1	1	1
10	102-9	Rantai pasokan	1	1	1	1	1	1
11	102-10	Perubahan signifikan pada organisasi dan rantai pasokannya	1	1	1	1	1	1
12	102-11	Pendekatan atau Prinsip Pencegahan	1	1	1	1	1	1
13	102-12	Inisiatif Eksternal	1	1	1	1	1	1
14	102-13	Keanggotaan asosiasi	1	1	1	1	1	1
15	102-14	Pernyataan dari pembuat keputusan senior	1	1	1	1	1	1
16	102-15	Dampak penting, risiko, dan peluang	0	1	1	0	0	0
17	102-16	Nilai, prinsip, standar, dan norma perilaku	1	1	1	1	1	1
18	102-17	Mekanisme untuk saran dan masalah etika	0	1	1	0	0	0
19	102-18	Struktur tata kelola	1	1	1	1	1	1
20	102-19	Mendelegasikan wewenang	0	0	0	0	0	0
21	102-20	Tanggung jawab tingkat eksekutif untuk topik ekonomi, lingkungan, dan sosial	0	0	0	0	0	0
22	102-21	Berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan mengenai topik-topik ekonomi, lingkungan, dan sosial	0	0	0	0	0	0
23	102-22	Komposisi badan tata kelola tertinggi dan komitennya	0	0	0	0	0	0
24	102-23	Ketua badan tata kelola tertinggi	0	0	0	0	0	0

25	102-24	Menominasikan dan memilih badan tata kelola tertinggi	0	0	0	0	0	0
26	102-25	Konflik kepentingan	0	0	0	0	0	0
27	102-26	Peran badan tata kelola tertinggi dalam menetapkan tujuan, nilai-nilai, dan strategi	0	0	0	0	0	0
28	102-27	Pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi	0	0	1	0	0	0
29	102-28	Mengevaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi	0	0	0	0	0	0
30	102-29	Mengidentifikasi dan mengelola dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial	0	0	1	0	0	0
31	102-30	Keefektifan proses manajemen risiko	0	0	1	0	0	0
32	102-31	Pengkajian topik ekonomi, lingkungan, dan sosial	0	0	1	0	0	0
33	102-32	Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan	0	0	1	0	0	0
34	102-33	Mengomunikasikan hal-hal kritis	0	0	0	0	0	0
35	102-34	Sifat dan jumlah total hal-hal kritis	0	0	0	0	0	0
36	102-35	Kebijakan remunerasi	0	0	0	0	0	0
37	102-36	Proses untuk menentukan remunerasi	0	0	0	0	0	0
38	102-37	Keterlibatan para pemangku kepentingan dalam remunerasi	0	0	0	0	0	0
39	102-38	Rasio kompensasi total tahunan	0	0	0	0	0	0
40	102-39	Persentase kenaikan pada total rasio kompensasi total tahunan	0	0	0	0	0	0
41	102-40	Daftar kelompok pemangku kepentingan	1	1	1	1	1	1
42	102-41	Perjanjian perundingan kolektif	1	1	1	1	1	1

43	102-42	Mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan	1	1	1	1	1	1
44	102-43	Pendekatan untuk keterlibatan pemangku kepentingan	1	1	1	1	1	1
45	102-44	Topik utama dan hal-hal yang diajukan	1	1	1	1	1	1
46	102-45	Entitas yang termasuk dalam laporan keuangan dikonsolidasi	1	1	1	1	1	1
47	102-46	Menetapkan isi laporan dan Batasan topik	1	1	1	1	1	1
48	102-47	Daftar topik material	0	1	1	1	1	1
49	102-48	Penyajian kembali informasi	0	1	1	1	1	1
50	102-49	Perubahan dalam pelaporan	0	1	1	1	1	1
51	102-50	Periode pelaporan	0	1	1	1	1	1
52	102-51	Tanggal laporan terbaru	0	1	1	1	1	1
53	102-52	Siklus pelaporan	0	1	1	1	1	1
54	102-53	Titik kontak untuk pertanyaan mengenai laporan	0	1	1	1	1	1
55	102-54	Mengklaim pelaporan sesuai dengan Standar GRI	0	1	1	1	1	1
56	102-55	Indeks isi GRI	0	1	1	1	1	1
57	102-56	Assurance oleh pihak eksternal	0	1	1	1	1	1
58	103-1	Penjelasan topik material dan Batasannya	1	1	1	1	1	1
59	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	1	1	1	1	1	1
60	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	1	1	1	1	1	1
STANDAR TOPIK SPESIFIK								
GRI 200: Ekonomi								
1	201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan	0	1	1	1	1	1



2	201-2	Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim	0	0	0	0	0	1
3	201-3	Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya	0	0	0	1	1	1
4	201-4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah	0	0	0	0	0	1
5	202-1	Rasio standar upah karyawan entry-level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional	0	0	1	0	0	0
6	202-2	Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal	0	0	0	0	1	0
7	203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan	0	1	1	1	0	0
8	203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan	0	1	1	1	1	1
9	204-1	Proporsi pengeluaran untuk pemasok local	0	1	1	0	1	0
10	205-1	Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi	1	0	1	0	0	0
11	205-2	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi	1	0	1	0	0	0
12	205-3	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil	0	0	0	0	0	0
13	206-1	Langkah-langkah hukum untuk perilaku anti-persaingan, praktik anti-trust dan monopoli	1	0	0	1	0	0
GRI 300: Lingkungan								
1	301-1	Material yang digunakan berdasarkan berat atau volume	0	0	1	0	0	0
2	301-2	Material input dari daur ulang yang digunakan	0	0	0	0	0	0

3	301-3	Produk reclaimed dan material kemasannya	1	0	0	0	0	0
4	302-1	Konsumsi energi dalam organisasi	0	1	1	1	1	1
5	302-2	Konsumsi energi di luar organisasi	0	0	0	0	1	0
6	302-3	Intensitas energi	0	0	1	1	1	1
7	302-4	Pengurangan konsumsi energi	0	0	1	1	0	0
8	302-5	Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa	0	0	1	0	0	0
9	303-1	Interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama	0	1	1	0	1	1
10	303-2	Manajemen dampak yang berkaitan dengan pembuangan air	0	0	1	0	1	1
11	303-3	Pengambilan air	0	0	1	0	1	1
12	303-4	Pembuangan air	0	0	1	0	1	1
13	303-5	Konsumsi air	0	0	1	0	1	1
14	304-1	Lokasi operasi yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung	0	0	1	0	1	1
15	304-2	Dampak signifikan dari kegiatan, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati	0	0	0	0	0	0
16	304-3	Habitat yang dilindungi atau direstorasi	0	0	1	0	0	0
17	304-4	Spesies Daftar Merah IUCN dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi	0	0	0	0	0	0
18	305-1	Emisi GRK (Cakupan 1) langsung	0	1	1	0	1	1

19	305-2	Emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung	0	1	1	0	1	1
20	305-3	Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya	0	0	0	0	0	0
21	305-4	Intensitas emisi GRK	0	0	1	0	0	0
22	305-5	Pengurangan emisi GRK	0	0	1	0	0	0
23	305-6	Emisi zat perusak ozon (ODS	0	0	0	0	0	0
24	305-7	Nitrogen oksida (NOX), sulfur oksida (SOX), dan emisi udara signifikan lainnya	0	1	1	0	0	0
25	306-1	Pelepasan air berdasarkan kualitas dan tujuan	1	1	0	0	0	0
26	306-2	Limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan	1	1	1	0	1	1
27	306-3	Tumpahan yang signifikan	0	0	0	0	0	0
28	306-4	Pengangkutan limbah berbahaya	1	1	1	0	0	0
29	306-5	Badan air yang dipengaruhi oleh pelepasan dan/atau limpahan air	0	0	0	0	0	0
30	307-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup	1	1	1	0	1	1
31	308-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan	0	0	0	0	1	0
32	308-2	Dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil	0	0	1	0	0	0
GRI 400: Sosial								
1	401-1	Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan	1	1	1	1	1	1

2	401-2	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu	1	1	1	1	1	1
3	401-3	Cuti melahirkan	0	0	1	1	1	1
4	402-1	Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional	0	0	1	0	0	0
5	403-1	Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja	1	1	0	0	1	1
6	403-2	Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden	1	1	1	1	1	1
7	403-3	Layanan kesehatan kerja	0	0	1	0	1	1
8	403-4	Partisipasi, konsultasi, dan komunikasi pekerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja	0	0	1	1	1	0
9	403-5	Pelatihan bagi pekerja mengenai keselamatan dan kesehatan kerja	0	0	1	0	0	0
10	403-6	Peningkatan kualitas kesehatan pekerja	0	0	1	0	0	0
11	403-7	Pencegahan dan mitigasi dampak dari keselamatan dan kesehatan kerja yang secara langsung terkait hubungan bisnis	0	0	1	0	0	0
12	403-8	Pekerja yang tercakup dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja	0	0	1	0	0	0
13	403-9	Kecelakaan kerja	0	0	1	0	0	0
14	403-10	Penyakit akibat kerja	0	0	0	0	0	0
15	404-1	Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan	1	1	1	1	1	0

16	404-2	Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan	1	1	1	1	1	0
17	404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier	0	0	0	1	1	0
18	405-1	Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan	1	1	1	1	1	0
19	405-2	Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki	1	0	1	1	1	0
20	406-1	Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan	0	0	0	0	0	0
21	407-1	Operasi dan pemasok di mana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin berisiko	0	0	0	0	0	0
22	408-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak	0	0	1	0	1	0
23	409-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja	0	0	1	0	0	0
24	410-1	Petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia	1	0	0	0	0	0
25	411-1	Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat	0	0	0	0	0	0
26	412-1	Operasi-operasi yang telah melewati tinjauan hak asasi manusia atau penilaian dampak	0	0	0	0	0	0
27	412-2	Pelatihan karyawan mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia	0	0	0	0	0	0

28	412-3	Perjanjian dan kontrak investasi signifikan yang memasukkan klausul-klausul hak asasi manusia atau yang telah melalui penyaringan hak asasi manusia	0	0	0	0	0	0
29	413-1	Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan	1	1	1	0	0	1
30	413-2	Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal	0	0	0	0	0	1
31	414-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial	0	0	0	0	0	0
32	414-2	Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil	0	0	0	0	0	0
33	415-1	Kontribusi Politik	0	0	0	0	0	0
34	416-1	Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa	1	1	1	1	1	1
35	416-2	Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa	0	0	1	1	1	1
36	417-1	Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa	0	0	1	0	0	0
37	417-2	Insiden ketidakpatuhan terkait informasi dan pelabelan produk dan jasa	0	1	1	0	0	0
38	417-3	Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran	1	1	1	0	0	0
39	418-1	Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan	0	0	0	1	0	0

40	419-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan di bidang sosial dan ekonomi	1	1	1	0	1	0
		Parameter Dipenuhi	48	64	97	58	72	64
		Total Parameter Standar GRI	145	145	145	145	145	145

NO	INDEKS	PENGUNGKAPAN	KLBF			LSIP		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	101	Landasan	1	1	1	1	1	1
2	102-1	Nama organisasi	1	1	1	1	1	1
3	102-2	Kegiatan, merek, produk, dan jasa	1	1	1	1	1	1
4	102-3	Lokasi kantor pusat	1	1	1	1	1	1
5	102-4	Lokasi operasi	1	1	1	1	1	1
6	102-5	Kepemilikan dan bentuk hukum	1	1	1	1	1	1
7	102-6	Pasar yang dilayani	1	1	1	1	1	1
8	102-7	Skala organisasi	1	1	1	1	1	1
9	102-8	Informasi mengenai karyawan dan pekerja lainnya	1	1	1	1	1	1
10	102-9	Rantai pasokan	1	1	1	1	1	1
11	102-10	Perubahan signifikan pada organisasi dan rantai pasokannya	0	1	1	1	1	1
12	102-11	Pendekatan atau Prinsip Pencegahan	1	1	1	1	1	1
13	102-12	Inisiatif Eksternal	1	1	1	1	1	1
14	102-13	Keanggotaan asosiasi	1	1	1	1	1	1
15	102-14	Pernyataan dari pembuat keputusan senior	1	1	1	1	1	1

16	102-15	Dampak penting, risiko, dan peluang	0	0	1	0	0	0
17	102-16	Nilai, prinsip, standar, dan norma perilaku	1	1	1	1	1	1
18	102-17	Mekanisme untuk saran dan masalah etika	0	0	0	1	1	1
19	102-18	Struktur tata kelola	1	1	1	1	1	1
20	102-19	Mendelegasikan wewenang	0	0	0	0	0	0
21	102-20	Tanggung jawab tingkat eksekutif untuk topik ekonomi, lingkungan, dan sosial	0	0	0	0	0	0
22	102-21	Berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan mengenai topik-topik ekonomi, lingkungan, dan sosial	0	0	0	0	0	0
23	102-22	Komposisi badan tata kelola tertinggi dan komitennya	0	0	0	0	0	0
24	102-23	Ketua badan tata kelola tertinggi	0	0	0	0	0	0
25	102-24	Menominasikan dan memilih badan tata kelola tertinggi	0	0	0	0	0	0
26	102-25	Konflik kepentingan	0	0	0	0	0	0
27	102-26	Peran badan tata kelola tertinggi dalam menetapkan tujuan, nilai-nilai, dan strategi	0	0	0	0	0	0
28	102-27	Pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi	0	0	0	0	0	0
29	102-28	Mengevaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi	0	0	0	0	0	0
30	102-29	Mengidentifikasi dan mengelola dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial	0	0	0	0	0	0
31	102-30	Keefektifan proses manajemen risiko	0	0	0	0	0	0
32	102-31	Pengkajian topik ekonomi, lingkungan, dan sosial	0	0	0	0	0	0
33	102-32	Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan	0	0	0	0	0	0

34	102-33	Mengomunikasikan hal-hal kritis	0	0	0	0	0	0
35	102-34	Sifat dan jumlah total hal-hal kritis	0	0	0	0	0	0
36	102-35	Kebijakan remunerasi	0	0	0	0	0	0
37	102-36	Proses untuk menentukan remunerasi	0	0	0	0	0	0
38	102-37	Keterlibatan para pemangku kepentingan dalam remunerasi	0	0	0	0	0	0
39	102-38	Rasio kompensasi total tahunan	0	0	0	0	0	0
40	102-39	Persentase kenaikan pada total rasio kompensasi total tahunan	0	0	0	0	0	0
41	102-40	Daftar kelompok pemangku kepentingan	1	1	1	1	1	1
42	102-41	Perjanjian perundingan kolektif	1	1	1	1	1	1
43	102-42	Mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan	1	1	1	1	1	1
44	102-43	Pendekatan untuk keterlibatan pemangku kepentingan	1	1	1	1	1	1
45	102-44	Topik utama dan hal-hal yang diajukan	1	1	1	1	1	1
46	102-45	Entitas yang termasuk dalam laporan keuangan dikonsolidasi	1	1	1	1	1	1
47	102-46	Menetapkan isi laporan dan Batasan topik	0	1	1	1	1	1
48	102-47	Daftar topik material	1	1	1	1	1	1
49	102-48	Penyajian kembali informasi	1	1	1	1	1	1
50	102-49	Perubahan dalam pelaporan	1	1	1	1	1	1
51	102-50	Periode pelaporan	1	1	1	1	1	1
52	102-51	Tanggal laporan terbaru	1	1	1	1	1	1
53	102-52	Siklus pelaporan	1	1	1	1	1	1
54	102-53	Titik kontak untuk pertanyaan mengenai laporan	1	1	1	1	1	1

55	102-54	Mengklaim pelaporan sesuai dengan Standar GRI	1	1	1	1	1	1
56	102-55	Indeks isi GRI	1	1	1	1	1	1
57	102-56	Assurance oleh pihak eksternal	1	1	1	1	1	1
58	103-1	Penjelasan topik material dan Batasannya	1	1	1	1	1	1
59	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	1	1	1	1	1	1
60	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	1	1	1	1	1	1
STANDAR TOPIK SPESIFIK								
GRI 200: Ekonomi								
1	201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan	1	1	1	0	0	0
2	201-2	Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim	0	0	1	0	0	0
3	201-3	Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya	0	0	1	0	0	0
4	201-4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah	0	0	1	0	0	0
5	202-1	Rasio standar upah karyawan entry-level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional	0	0	0	0	0	0
6	202-2	Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal	0	0	0	0	0	0
7	203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan	0	0	0	0	0	0
8	203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan	0	0	0	0	0	0
9	204-1	Proporsi pengeluaran untuk pemasok local	1	1	1	1	1	1

10	205-1	Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi	0	0	0	0	0	0
11	205-2	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi	0	0	0	0	0	0
12	205-3	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil	0	0	0	0	0	0
13	206-1	Langkah-langkah hukum untuk perilaku anti-persaingan, praktik anti-trust dan monopoli	0	0	1	0	0	0
GRI 300: Lingkungan								
1	301-1	Material yang digunakan berdasarkan berat atau volume	0	0	0	1	0	0
2	301-2	Material input dari daur ulang yang digunakan	0	0	0	0	0	0
3	301-3	Produk reclaimed dan material kemasannya	0	0	0	0	0	0
4	302-1	Konsumsi energi dalam organisasi	1	1	1	1	1	1
5	302-2	Konsumsi energi di luar organisasi	0	0	1	0	0	0
6	302-3	Intensitas energi	0	0	0	1	1	1
7	302-4	Pengurangan konsumsi energi	1	0	1	1	1	1
8	302-5	Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa	0	0	1	0	0	0
9	303-1	Interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama	0	0	0	1	1	1
10	303-2	Manajemen dampak yang berkaitan dengan pembuangan air	0	0	0	0	0	0
11	303-3	Pengambilan air	0	0	0	0	0	0
12	303-4	Pembuangan air	0	0	0	0	0	0
13	303-5	Konsumsi air	0	0	0	0	0	0

14	304-1	Lokasi operasi yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung	0	0	0	0	0	0
15	304-2	Dampak signifikan dari kegiatan, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati	0	0	0	0	0	0
16	304-3	Habitat yang dilindungi atau direstorasi	0	0	0	0	0	0
17	304-4	Spesies Daftar Merah IUCN dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi	0	0	1	1	1	1
18	305-1	Emisi GRK (Cakupan 1) langsung	1	1	1	0	0	0
19	305-2	Emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung	1	1	1	0	0	0
20	305-3	Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya	0	0	0	0	0	0
21	305-4	Intensitas emisi GRK	0	1	1	1	1	1
22	305-5	Pengurangan emisi GRK	0	0	0	0	0	0
23	305-6	Emisi zat perusak ozon (ODS	0	0	0	0	0	0
24	305-7	Nitrogen oksida (NOX), sulfur oksida (SOX), dan emisi udara signifikan lainnya	0	0	0	0	0	0
25	306-1	Pelepasan air berdasarkan kualitas dan tujuan	0	0	1	1	1	1
26	306-2	Limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan	1	1	1	1	1	1
27	306-3	Tumpahan yang signifikan	0	0	0	1	1	1
28	306-4	Pengangkutan limbah berbahaya	0	0	0	0	0	0

29	306-5	Badan air yang dipengaruhi oleh pelepasan dan/atau limbah air	0	0	0	0	0	0
30	307-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup	0	1	1	1	1	1
31	308-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan	0	0	0	1	1	1
32	308-2	Dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil	0	0	0	0	0	0
GRI 400: Sosial								
1	401-1	Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan	0	0	0	1	1	1
2	401-2	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu	0	0	0	0	0	0
3	401-3	Cuti melahirkan	0	0	0	0	0	0
4	402-1	Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional	0	0	0	1	1	1
5	403-1	Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja	0	0	1	0	0	0
6	403-2	Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden	0	0	1	1	1	1
7	403-3	Layanan kesehatan kerja	0	0	1	1	1	1
8	403-4	Partisipasi, konsultasi, dan komunikasi pekerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja	0	0	1	0	1	1

9	403-5	Pelatihan bagi pekerja mengenai keselamatan dan kesehatan kerja	0	0	1	0	0	0
10	403-6	Peningkatan kualitas kesehatan pekerja	0	0	1	0	0	0
11	403-7	Pencegahan dan mitigasi dampak dari keselamatan dan kesehatan kerja yang secara langsung terkait hubungan bisnis	0	0	1	0	0	0
12	403-8	Pekerja yang tercakup dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja	0	0	1	0	0	0
13	403-9	Kecelakaan kerja	0	0	1	0	0	0
14	403-10	Penyakit akibat kerja	0	0	1	0	0	0
15	404-1	Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan	1	1	0	1	1	1
16	404-2	Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan	0	0	1	0	0	0
17	404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier	0	0	1	0	0	0
18	405-1	Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan	0	0	0	1	1	1
19	405-2	Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki	0	0	0	0	0	0
20	406-1	Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan	0	0	0	1	1	1
21	407-1	Operasi dan pemasok di mana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin berisiko	0	0	0	1	1	1

22	408-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak	0	0	0	1	1	1
23	409-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja	0	0	0	1	1	1
24	410-1	Petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia	0	0	0	1	1	1
25	411-1	Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat	0	0	0	0	0	0
26	412-1	Operasi-operasi yang telah melewati tinjauan hak asasi manusia atau penilaian dampak	0	0	0	1	1	1
27	412-2	Pelatihan karyawan mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia	0	0	0	0	0	0
28	412-3	Perjanjian dan kontrak investasi signifikan yang memasukkan klausul-klausul hak asasi manusia atau yang telah melalui penyaringan hak asasi manusia	0	0	0	0	0	0
29	413-1	Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan	0	0	0	1	1	1
30	413-2	Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal	0	0	0	0	0	0
31	414-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial	0	0	0	1	1	1
32	414-2	Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil	0	0	0	0	0	0

33	415-1	Kontribusi Politik	0	0	0	0	0	0
34	416-1	Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa	1	1	1	0	0	0
35	416-2	Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa	1	1	1	0	0	0
36	417-1	Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa	1	1	1	0	0	0
37	417-2	Insiden ketidakpatuhan terkait informasi dan pelabelan produk dan jasa	1	0	1	0	0	0
38	417-3	Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran	1	0	1	0	0	0
39	418-1	Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan	0	0	0	0	0	0
40	419-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan di bidang sosial dan ekonomi	0	0	0	0	0	0
		Parameter Dipenuhi	48	49	72	65	65	65
		Total Parameter Standar GRI	145	145	145	145	145	145

NO	INDEKS	PENGUNGKAPAN	PTBA			PTPP		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	101	Landasan	1	1	1	1	1	1
2	102-1	Nama organisasi	1	1	1	1	1	1
3	102-2	Kegiatan, merek, produk, dan jasa	1	1	1	1	1	1
4	102-3	Lokasi kantor pusat	1	1	1	1	1	1

5	102-4	Lokasi operasi	1	1	1	1	1	1
6	102-5	Kepemilikan dan bentuk hukum	1	1	1	1	1	1
7	102-6	Pasar yang dilayani	1	1	1	1	1	1
8	102-7	Skala organisasi	1	1	1	1	1	1
9	102-8	Informasi mengenai karyawan dan pekerja lainnya	1	1	1	1	1	1
10	102-9	Rantai pasokan	1	1	1	1	1	1
11	102-10	Perubahan signifikan pada organisasi dan rantai pasokannya	1	1	1	1	1	1
12	102-11	Pendekatan atau Prinsip Pencegahan	1	1	1	1	1	1
13	102-12	Inisiatif Eksternal	1	1	1	1	1	1
14	102-13	Keanggotaan asosiasi	0	1	1	1	1	1
15	102-14	Pernyataan dari pembuat keputusan senior	1	1	1	1	1	1
16	102-15	Dampak penting, risiko, dan peluang	1	0	1	0	0	0
17	102-16	Nilai, prinsip, standar, dan norma perilaku	1	1	1	1	1	1
18	102-17	Mekanisme untuk saran dan masalah etika	1	0	1	1	1	1
19	102-18	Struktur tata kelola	1	1	1	1	1	1
20	102-19	Mendelegasikan wewenang	0	0	0	0	0	0
21	102-20	Tanggung jawab tingkat eksekutif untuk topik ekonomi, lingkungan, dan sosial	1	0	0	0	0	0
22	102-21	Berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan mengenai topik-topik ekonomi, lingkungan, dan sosial	0	0	0	0	0	0
23	102-22	Komposisi badan tata kelola tertinggi dan komitennya	0	0	1	1	0	0
24	102-23	Ketua badan tata kelola tertinggi	0	0	0	1	0	0

25	102-24	Menominasikan dan memilih badan tata kelola tertinggi	0	0	0	0	0	0
26	102-25	Konflik kepentingan	1	0	1	0	0	0
27	102-26	Peran badan tata kelola tertinggi dalam menetapkan tujuan, nilai-nilai, dan strategi	0	0	0	0	0	0
28	102-27	Pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi	0	0	0	1	0	0
29	102-28	Mengevaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi	1	0	0	1	0	0
30	102-29	Mengidentifikasi dan mengelola dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial	0	0	0	0	0	0
31	102-30	Keefektifan proses manajemen risiko	1	0	1	0	0	0
32	102-31	Pengkajian topik ekonomi, lingkungan, dan sosial	0	0	0	0	0	0
33	102-32	Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan	1	0	0	0	0	0
34	102-33	Mengomunikasikan hal-hal kritis	0	0	0	0	0	0
35	102-34	Sifat dan jumlah total hal-hal kritis	0	0	0	0	0	0
36	102-35	Kebijakan remunerasi	1	0	0	0	0	0
37	102-36	Proses untuk menentukan remunerasi	1	0	0	0	0	0
38	102-37	Keterlibatan para pemangku kepentingan dalam remunerasi	0	0	0	0	0	0
39	102-38	Rasio kompensasi total tahunan	0	0	0	0	0	0
40	102-39	Persentase kenaikan pada total rasio kompensasi total tahunan	1	0	0	0	0	0
41	102-40	Daftar kelompok pemangku kepentingan	1	1	1	1	1	1
42	102-41	Perjanjian perundingan kolektif	1	1	1	1	1	1

43	102-42	Mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan	1	1	1	1	1	1
44	102-43	Pendekatan untuk keterlibatan pemangku kepentingan	1	1	1	1	1	1
45	102-44	Topik utama dan hal-hal yang diajukan	1	1	1	1	1	1
46	102-45	Entitas yang termasuk dalam laporan keuangan dikonsolidasi	1	1	1	1	1	1
47	102-46	Menetapkan isi laporan dan Batasan topik	0	1	1	1	1	1
48	102-47	Daftar topik material	0	1	1	1	1	1
49	102-48	Penyajian kembali informasi	1	1	1	1	1	1
50	102-49	Perubahan dalam pelaporan	1	1	1	1	1	1
51	102-50	Periode pelaporan	1	1	1	1	1	1
52	102-51	Tanggal laporan terbaru	1	1	1	1	1	1
53	102-52	Siklus pelaporan	1	1	1	1	1	1
54	102-53	Titik kontak untuk pertanyaan mengenai laporan	1	1	1	1	1	1
55	102-54	Mengklaim pelaporan sesuai dengan Standar GRI	1	1	1	1	1	1
56	102-55	Indeks isi GRI	1	1	1	1	1	1
57	102-56	Assurance oleh pihak eksternal	1	1	1	1	1	1
58	103-1	Penjelasan topik material dan Batasannya	1	1	1	1	1	1
59	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	1	1	1	1	1	1
60	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	0	1	1	1	1	1
STANDAR TOPIK SPESIFIK								
GRI 200: Ekonomi								
1	201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan	1	1	1	1	1	1

2	201-2	Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim	0	0	0	0	1	1
3	201-3	Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya	1	1	1	1	1	1
4	201-4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah	1	1	1	0	1	1
5	202-1	Rasio standar upah karyawan entry-level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional	1	0	1	0	1	1
6	202-2	Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal	1	0	1	0	0	0
7	203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan	1	1	1	1	1	1
8	203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan	1	1	1	1	0	0
9	204-1	Proporsi pengeluaran untuk pemasok local	1	1	1	0	1	1
10	205-1	Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi	1	0	0	1	0	0
11	205-2	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi	1	0	0	0	1	1
12	205-3	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil	1	1	1	1	1	1
13	206-1	Langkah-langkah hukum untuk perilaku anti-persaingan, praktik anti-trust dan monopoli	1	1	1	0	0	0
GRI 300: Lingkungan								
1	301-1	Material yang digunakan berdasarkan berat atau volume	1	0	0	1	1	1
2	301-2	Material input dari daur ulang yang digunakan	1	0	0	0	0	0

3	301-3	Produk reclaimed dan material kemasannya	0	0	0	0	0	0
4	302-1	Konsumsi energi dalam organisasi	1	1	1	1	1	1
5	302-2	Konsumsi energi di luar organisasi	0	0	0	0	0	0
6	302-3	Intensitas energi	1	1	1	1	0	0
7	302-4	Pengurangan konsumsi energi	0	1	1	1	0	0
8	302-5	Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa	0	1	1	0	0	0
9	303-1	Interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama	1	1	1	1	1	1
10	303-2	Manajemen dampak yang berkaitan dengan pembuangan air	1	0	1	0	0	0
11	303-3	Pengambilan air	0	1	1	0	0	0
12	303-4	Pembuangan air	0	0	1	0	0	0
13	303-5	Konsumsi air	0	0	1	0	0	0
14	304-1	Lokasi operasi yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung	1	1	1	0	0	0
15	304-2	Dampak signifikan dari kegiatan, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati	1	0	0	0	0	0
16	304-3	Habitat yang dilindungi atau direstorasi	1	1	1	0	0	0
17	304-4	Spesies Daftar Merah IUCN dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi	1	1	1	0	0	0
18	305-1	Emisi GRK (Cakupan 1) langsung	1	1	1	1	1	1

19	305-2	Emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung	0	1	1	0	0	0
20	305-3	Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya	0	0	0	0	0	0
21	305-4	Intensitas emisi GRK	0	1	1	1	0	0
22	305-5	Pengurangan emisi GRK	1	1	1	0	1	0
23	305-6	Emisi zat perusak ozon (ODS	0	1	1	0	0	0
24	305-7	Nitrogen oksida (NOX), sulfur oksida (SOX), dan emisi udara signifikan lainnya	0	0	0	0	0	0
25	306-1	Pelepasan air berdasarkan kualitas dan tujuan	0	1	1	0	0	0
26	306-2	Limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan	1	1	1	0	1	1
27	306-3	Tumpahan yang signifikan	0	0	1	0	0	0
28	306-4	Pengangkutan limbah berbahaya	0	1	1	0	1	1
29	306-5	Badan air yang dipengaruhi oleh pelepasan dan/atau limbah air	0	1	1	0	0	0
30	307-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup	1	1	1	0	1	1
31	308-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan	0	0	1	0	0	0
32	308-2	Dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil	0	0	1	0	0	0
GRI 400: Sosial								
1	401-1	Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan	1	1	1	1	1	1

2	401-2	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu	1	1	1	0	1	1
3	401-3	Cuti melahirkan	1	1	1	0	1	1
4	402-1	Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional	1	0	1	0	1	1
5	403-1	Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja	1	1	1	1	1	1
6	403-2	Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden	1	1	1	1	1	1
7	403-3	Layanan kesehatan kerja	0	1	1	0	1	1
8	403-4	Partisipasi, konsultasi, dan komunikasi pekerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja	0	1	1	0	1	1
9	403-5	Pelatihan bagi pekerja mengenai keselamatan dan kesehatan kerja	0	0	1	0	0	0
10	403-6	Peningkatan kualitas kesehatan pekerja	0	0	1	0	0	0
11	403-7	Pencegahan dan mitigasi dampak dari keselamatan dan kesehatan kerja yang secara langsung terkait hubungan bisnis	0	0	1	0	0	0
12	403-8	Pekerja yang tercakup dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja	0	0	1	0	0	0
13	403-9	Kecelakaan kerja	0	0	1	0	0	0
14	403-10	Penyakit akibat kerja	0	0	1	0	0	0
15	404-1	Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan	0	0	0	1	1	1

16	404-2	Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan	1	1	1	0	1	1
17	404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier	1	1	1	1	1	1
18	405-1	Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan	1	0	1	0	1	1
19	405-2	Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki	1	0	1	0	1	1
20	406-1	Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan	1	1	1	0	1	1
21	407-1	Operasi dan pemasok di mana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin berisiko	0	0	1	0	1	1
22	408-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak	1	1	1	0	1	1
23	409-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja	1	0	1	0	1	1
24	410-1	Petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia	1	0	0	0	0	0
25	411-1	Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat	1	0	1	0	0	0
26	412-1	Operasi-operasi yang telah melewati tinjauan hak asasi manusia atau penilaian dampak	1	0	0	0	0	0
27	412-2	Pelatihan karyawan mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia	0	0	0	0	0	0

28	412-3	Perjanjian dan kontrak investasi signifikan yang memasukkan klausul-klausul hak asasi manusia atau yang telah melalui penyaringan hak asasi manusia	0	0	0	0	0	0
29	413-1	Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan	1	1	1	1	1	1
30	413-2	Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal	1	1	1	0	0	0
31	414-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial	1	0	1	1	0	0
32	414-2	Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil	1	0	1	0	0	0
33	415-1	Kontribusi Politik	1	0	0	0	0	0
34	416-1	Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa	1	0	0	0	0	0
35	416-2	Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa	1	0	0	0	1	1
36	417-1	Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa	1	1	1	1	0	0
37	417-2	Insiden ketidakpatuhan terkait informasi dan pelabelan produk dan jasa	0	0	1	0	1	1
38	417-3	Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran	1	1	1	0	1	1
39	418-1	Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan	1	1	1	1	0	0

40	419-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan di bidang sosial dan ekonomi	1	1	1	0	1	1
		Parameter Dipenuhi	96	81	109	64	77	76
		Total Parameter Standar GRI	145	145	145	145	145	145

NO	INDEKS	PENGUNGKAPAN	SMGR			TINS		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	101	Landasan	1	1	1	1	1	1
2	102-1	Nama organisasi	1	1	1	1	1	1
3	102-2	Kegiatan, merek, produk, dan jasa	1	1	1	1	1	1
4	102-3	Lokasi kantor pusat	1	1	1	1	1	1
5	102-4	Lokasi operasi	1	1	1	1	1	1
6	102-5	Kepemilikan dan bentuk hukum	1	1	1	1	1	1
7	102-6	Pasar yang dilayani	1	1	1	1	1	1
8	102-7	Skala organisasi	1	1	1	1	1	1
9	102-8	Informasi mengenai karyawan dan pekerja lainnya	1	1	1	1	1	1
10	102-9	Rantai pasokan	1	1	1	1	1	1
11	102-10	Perubahan signifikan pada organisasi dan rantai pasokannya	1	1	1	1	1	1
12	102-11	Pendekatan atau Prinsip Pencegahan	1	1	1	1	1	1
13	102-12	Inisiatif Eksternal	1	1	1	1	1	1
14	102-13	Keanggotaan asosiasi	1	1	1	1	1	1
15	102-14	Pernyataan dari pembuat keputusan senior	1	1	1	1	1	1

16	102-15	Dampak penting, risiko, dan peluang	0	0	0	0	0	0
17	102-16	Nilai, prinsip, standar, dan norma perilaku	1	1	1	1	1	1
18	102-17	Mekanisme untuk saran dan masalah etika	1	1	1	1	1	1
19	102-18	Struktur tata kelola	1	1	1	1	1	1
20	102-19	Mendelegasikan wewenang	0	0	0	0	0	0
21	102-20	Tanggung jawab tingkat eksekutif untuk topik ekonomi, lingkungan, dan sosial	0	0	0	0	0	0
22	102-21	Berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan mengenai topik-topik ekonomi, lingkungan, dan sosial	0	0	0	0	0	0
23	102-22	Komposisi badan tata kelola tertinggi dan komitennya	0	0	0	0	0	0
24	102-23	Ketua badan tata kelola tertinggi	0	0	0	0	0	0
25	102-24	Menominasikan dan memilih badan tata kelola tertinggi	0	0	0	0	0	0
26	102-25	Konflik kepentingan	0	0	0	0	0	0
27	102-26	Peran badan tata kelola tertinggi dalam menetapkan tujuan, nilai-nilai, dan strategi	0	0	0	0	0	0
28	102-27	Pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi	0	0	0	1	0	0
29	102-28	Mengevaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi	0	0	0	1	0	0
30	102-29	Mengidentifikasi dan mengelola dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial	0	0	0	0	0	0
31	102-30	Keefektifan proses manajemen risiko	0	0	0	0	0	0
32	102-31	Pengkajian topik ekonomi, lingkungan, dan sosial	0	0	0	0	0	0
33	102-32	Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan	0	0	0	0	0	0

34	102-33	Mengomunikasikan hal-hal kritis	0	0	0	0	0	0
35	102-34	Sifat dan jumlah total hal-hal kritis	0	0	0	0	0	0
36	102-35	Kebijakan remunerasi	0	0	0	1	0	0
37	102-36	Proses untuk menentukan remunerasi	0	0	0	1	0	0
38	102-37	Keterlibatan para pemangku kepentingan dalam remunerasi	0	0	0	0	0	0
39	102-38	Rasio kompensasi total tahunan	0	0	0	0	0	0
40	102-39	Persentase kenaikan pada total rasio kompensasi total tahunan	0	0	0	0	0	0
41	102-40	Daftar kelompok pemangku kepentingan	1	1	1	1	1	1
42	102-41	Perjanjian perundingan kolektif	1	1	1	1	1	1
43	102-42	Mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan	1	1	1	1	1	1
44	102-43	Pendekatan untuk keterlibatan pemangku kepentingan	1	1	1	1	1	1
45	102-44	Topik utama dan hal-hal yang diajukan	1	1	1	1	1	1
46	102-45	Entitas yang termasuk dalam laporan keuangan dikonsolidasi	1	1	1	1	1	1
47	102-46	Menetapkan isi laporan dan Batasan topik	1	1	1	1	1	1
48	102-47	Daftar topik material	1	1	1	1	1	1
49	102-48	Penyajian kembali informasi	1	1	1	1	1	1
50	102-49	Perubahan dalam pelaporan	1	1	1	1	1	1
51	102-50	Periode pelaporan	1	1	1	1	1	1
52	102-51	Tanggal laporan terbaru	1	1	1	1	1	1
53	102-52	Siklus pelaporan	1	1	1	1	1	1
54	102-53	Titik kontak untuk pertanyaan mengenai laporan	1	1	1	1	1	1

55	102-54	Mengklaim pelaporan sesuai dengan Standar GRI	1	1	1	1	1	1
56	102-55	Indeks isi GRI	1	1	1	1	1	1
57	102-56	Assurance oleh pihak eksternal	1	0	1	1	1	1
58	103-1	Penjelasan topik material dan Batasannya	1	1	1	1	1	1
59	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	1	1	1	1	1	1
60	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	1	1	1	1	1	1
STANDAR TOPIK SPESIFIK								
GRI 200: Ekonomi								
1	201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan	1	1	1	1	1	1
2	201-2	Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim	0	0	0	0	0	0
3	201-3	Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya	0	0	0	1	1	1
4	201-4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah	0	0	0	1	1	0
5	202-1	Rasio standar upah karyawan entry-level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional	0	0	0	1	1	1
6	202-2	Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal	0	0	0	1	1	0
7	203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan	0	1	1	1	1	1
8	203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan	1	1	1	1	1	0
9	204-1	Proporsi pengeluaran untuk pemasok local	0	0	0	0	0	1

10	205-1	Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi	0	0	0	0	0	0
11	205-2	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi	0	0	0	1	1	1
12	205-3	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil	0	0	0	1	1	1
13	206-1	Langkah-langkah hukum untuk perilaku anti-persaingan, praktik anti-trust dan monopoli	0	0	0	0	0	0
GRI 300: Lingkungan								
1	301-1	Material yang digunakan berdasarkan berat atau volume	0	0	1	1	1	1
2	301-2	Material input dari daur ulang yang digunakan	0	0	1	1	1	1
3	301-3	Produk reclaimed dan material kemasannya	0	0	0	1	0	0
4	302-1	Konsumsi energi dalam organisasi	0	1	1	0	1	1
5	302-2	Konsumsi energi di luar organisasi	0	0	0	0	0	0
6	302-3	Intensitas energi	1	1	1	0	0	0
7	302-4	Pengurangan konsumsi energi	1	1	1	1	1	1
8	302-5	Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa	0	0	1	0	0	0
9	303-1	Interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama	0	0	1	1	1	0
10	303-2	Manajemen dampak yang berkaitan dengan pembuangan air	0	0	1	0	0	0
11	303-3	Pengambilan air	0	0	1	1	1	1
12	303-4	Pembuangan air	0	0	0	0	0	0
13	303-5	Konsumsi air	0	0	0	0	0	0

14	304-1	Lokasi operasi yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung	0	0	0	1	1	1
15	304-2	Dampak signifikan dari kegiatan, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati	0	0	0	0	0	0
16	304-3	Habitat yang dilindungi atau direstorasi	0	0	0	0	1	1
17	304-4	Spesies Daftar Merah IUCN dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi	0	1	1	0	1	1
18	305-1	Emisi GRK (Cakupan 1) langsung	0	1	1	0	1	1
19	305-2	Emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung	0	0	1	0	1	1
20	305-3	Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya	0	0	0	0	0	0
21	305-4	Intensitas emisi GRK	1	1	1	0	0	0
22	305-5	Pengurangan emisi GRK	1	0	1	0	0	0
23	305-6	Emisi zat perusak ozon (ODS	0	0	0	0	0	0
24	305-7	Nitrogen oksida (NOX), sulfur oksida (SOX), dan emisi udara signifikan lainnya	1	1	1	0	0	0
25	306-1	Pelepasan air berdasarkan kualitas dan tujuan	1	0	1	0	0	0
26	306-2	Limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan	1	1	1	1	1	1
27	306-3	Tumpahan yang signifikan	0	0	1	1	1	0
28	306-4	Pengangkutan limbah berbahaya	0	0	1	1	1	0

29	306-5	Badan air yang dipengaruhi oleh pelepasan dan/atau limbah air	0	0	1	0	1	0
30	307-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup	0	1	1	1	1	1
31	308-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan	0	0	0	1	1	1
32	308-2	Dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil	0	0	0	0	0	0
GRI 400: Sosial								
1	401-1	Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan	0	1	1	1	1	1
2	401-2	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu	0	1	1	1	1	1
3	401-3	Cuti melahirkan	0	0	0	1	1	0
4	402-1	Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional	0	0	1	1	1	1
5	403-1	Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja	1	1	1	1	1	1
6	403-2	Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden	0	1	0	1	1	1
7	403-3	Layanan kesehatan kerja	0	0	1	1	1	0
8	403-4	Partisipasi, konsultasi, dan komunikasi pekerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja	1	1	1	1	1	1

9	403-5	Pelatihan bagi pekerja mengenai keselamatan dan kesehatan kerja	0	0	1	0	0	0
10	403-6	Peningkatan kualitas kesehatan pekerja	0	0	1	0	0	0
11	403-7	Pencegahan dan mitigasi dampak dari keselamatan dan kesehatan kerja yang secara langsung terkait hubungan bisnis	0	0	0	0	0	0
12	403-8	Pekerja yang tercakup dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja	0	0	0	0	0	0
13	403-9	Kecelakaan kerja	1	0	1	0	0	0
14	403-10	Penyakit akibat kerja	0	0	0	0	0	0
15	404-1	Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan	0	1	1	1	1	1
16	404-2	Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan	0	1	1	1	1	1
17	404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier	0	0	0	1	1	1
18	405-1	Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan	0	1	1	0	0	1
19	405-2	Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki	0	0	1	1	1	1
20	406-1	Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan	0	0	0	1	1	1
21	407-1	Operasi dan pemasok di mana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin berisiko	0	0	0	0	0	0

22	408-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak	0	0	0	1	1	1
23	409-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja	0	0	0	1	1	1
24	410-1	Petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia	0	0	0	1	1	0
25	411-1	Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat	0	0	0	1	1	1
26	412-1	Operasi-operasi yang telah melewati tinjauan hak asasi manusia atau penilaian dampak	0	0	0	0	0	0
27	412-2	Pelatihan karyawan mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia	0	0	0	0	0	0
28	412-3	Perjanjian dan kontrak investasi signifikan yang memasukkan klausul-klausul hak asasi manusia atau yang telah melalui penyaringan hak asasi manusia	0	0	0	0	0	0
29	413-1	Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan	1	1	1	1	1	1
30	413-2	Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal	0	0	0	0	0	0
31	414-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial	0	0	0	1	1	0
32	414-2	Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil	0	0	0	0	0	0

33	415-1	Kontribusi Politik	0	0	0	0	0	0
34	416-1	Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa	0	0	0	0	0	0
35	416-2	Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa	0	0	0	0	0	1
36	417-1	Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa	0	0	0	0	0	1
37	417-2	Insiden ketidakpatuhan terkait informasi dan pelabelan produk dan jasa	0	0	0	0	0	1
38	417-3	Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran	0	0	0	0	0	1
39	418-1	Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan	0	0	0	1	1	1
40	419-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan di bidang sosial dan ekonomi	0	0	0	0	0	0
		Parameter Dipenuhi	51	58	76	83	84	79
		Total Parameter Standar GRI	145	145	145	145	145	145

NO	INDEKS	PENGUNGKAPAN	UNTR			UNVR		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	101	Landasan	1	1	1	1	1	1
2	102-1	Nama organisasi	1	1	1	1	1	1
3	102-2	Kegiatan, merek, produk, dan jasa	1	1	1	1	1	1
4	102-3	Lokasi kantor pusat	1	1	1	1	1	1

5	102-4	Lokasi operasi	1	1	1	1	1	1
6	102-5	Kepemilikan dan bentuk hukum	1	1	1	1	1	1
7	102-6	Pasar yang dilayani	1	1	1	1	1	1
8	102-7	Skala organisasi	1	1	1	1	1	1
9	102-8	Informasi mengenai karyawan dan pekerja lainnya	1	1	1	1	1	1
10	102-9	Rantai pasokan	1	1	1	1	1	1
11	102-10	Perubahan signifikan pada organisasi dan rantai pasokannya	1	1	1	1	1	1
12	102-11	Pendekatan atau Prinsip Pencegahan	1	1	1	1	1	1
13	102-12	Inisiatif Eksternal	1	1	1	1	1	1
14	102-13	Keanggotaan asosiasi	1	1	1	1	1	1
15	102-14	Pernyataan dari pembuat keputusan senior	1	1	1	1	1	1
16	102-15	Dampak penting, risiko, dan peluang	1	1	1	0	0	0
17	102-16	Nilai, prinsip, standar, dan norma perilaku	1	1	1	1	1	1
18	102-17	Mekanisme untuk saran dan masalah etika	1	1	1	1	1	1
19	102-18	Struktur tata kelola	1	1	1	1	1	1
20	102-19	Mendelegasikan wewenang	0	0	0	0	0	0
21	102-20	Tanggung jawab tingkat eksekutif untuk topik ekonomi, lingkungan, dan sosial	0	0	0	0	0	0
22	102-21	Berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan mengenai topik-topik ekonomi, lingkungan, dan sosial	0	0	0	0	0	0
23	102-22	Komposisi badan tata kelola tertinggi dan komitennya	0	0	0	0	0	0
24	102-23	Ketua badan tata kelola tertinggi	0	0	0	0	0	0

25	102-24	Menominasikan dan memilih badan tata kelola tertinggi	0	0	0	0	0	0
26	102-25	Konflik kepentingan	0	0	0	0	0	0
27	102-26	Peran badan tata kelola tertinggi dalam menetapkan tujuan, nilai-nilai, dan strategi	0	0	0	0	0	0
28	102-27	Pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi	0	0	0	0	0	0
29	102-28	Mengevaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi	0	0	0	0	0	0
30	102-29	Mengidentifikasi dan mengelola dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial	0	0	0	0	0	0
31	102-30	Keefektifan proses manajemen risiko	0	0	0	0	0	0
32	102-31	Pengkajian topik ekonomi, lingkungan, dan sosial	0	0	0	0	0	0
33	102-32	Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan	0	0	0	0	0	0
34	102-33	Mengomunikasikan hal-hal kritis	0	0	0	0	0	0
35	102-34	Sifat dan jumlah total hal-hal kritis	0	0	0	0	0	0
36	102-35	Kebijakan remunerasi	0	0	0	0	0	0
37	102-36	Proses untuk menentukan remunerasi	0	0	0	0	0	0
38	102-37	Keterlibatan para pemangku kepentingan dalam remunerasi	0	0	0	0	0	0
39	102-38	Rasio kompensasi total tahunan	0	0	0	0	0	0
40	102-39	Persentase kenaikan pada total rasio kompensasi total tahunan	0	0	0	0	0	0
41	102-40	Daftar kelompok pemangku kepentingan	1	1	1	1	1	1
42	102-41	Perjanjian perundingan kolektif	1	1	1	1	1	1

43	102-42	Mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan	1	1	1	1	1	1
44	102-43	Pendekatan untuk keterlibatan pemangku kepentingan	1	1	1	1	1	1
45	102-44	Topik utama dan hal-hal yang diajukan	1	1	1	1	1	1
46	102-45	Entitas yang termasuk dalam laporan keuangan dikonsolidasi	1	1	1	1	1	1
47	102-46	Menetapkan isi laporan dan Batasan topik	1	1	1	1	1	1
48	102-47	Daftar topik material	1	1	1	1	1	1
49	102-48	Penyajian kembali informasi	1	1	1	1	1	1
50	102-49	Perubahan dalam pelaporan	1	1	1	1	1	1
51	102-50	Periode pelaporan	1	1	1	1	1	1
52	102-51	Tanggal laporan terbaru	1	1	1	1	1	1
53	102-52	Siklus pelaporan	1	1	1	1	1	1
54	102-53	Titik kontak untuk pertanyaan mengenai laporan	1	1	1	1	1	1
55	102-54	Mengklaim pelaporan sesuai dengan Standar GRI	1	1	1	1	1	1
56	102-55	Indeks isi GRI	1	1	1	1	1	1
57	102-56	Assurance oleh pihak eksternal	1	1	1	1	1	1
58	103-1	Penjelasan topik material dan Batasannya	1	1	1	1	1	1
59	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	1	1	1	1	1	1
60	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	1	1	1	1	1	1
STANDAR TOPIK SPESIFIK								
GRI 200: Ekonomi								
1	201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan	1	1	1	1	1	1



2	201-2	Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim	0	0	0	0	0	0
3	201-3	Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya	0	0	0	0	0	0
4	201-4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah	0	0	0	0	0	0
5	202-1	Rasio standar upah karyawan entry-level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional	0	0	0	0	0	0
6	202-2	Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal	0	0	0	0	0	0
7	203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan	0	0	0	0	0	0
8	203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan	1	1	0	1	1	1
9	204-1	Proporsi pengeluaran untuk pemasok local	0	0	0	0	0	0
10	205-1	Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi	0	0	0	1	1	1
11	205-2	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi	0	0	0	0	0	0
12	205-3	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil	0	0	0	0	0	0
13	206-1	Langkah-langkah hukum untuk perilaku anti-persaingan, praktik anti-trust dan monopoli	0	0	0	0	0	0
GRI 300: Lingkungan								
1	301-1	Material yang digunakan berdasarkan berat atau volume	1	0	0	0	0	0
2	301-2	Material input dari daur ulang yang digunakan	0	0	0	0	0	0

3	301-3	Produk reclaimed dan material kemasannya	0	0	1	0	0	0
4	302-1	Konsumsi energi dalam organisasi	1	1	1	1	1	1
5	302-2	Konsumsi energi di luar organisasi	0	0	0	0	0	0
6	302-3	Intensitas energi	0	0	1	1	1	1
7	302-4	Pengurangan konsumsi energi	0	0	0	0	0	0
8	302-5	Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa	1	1	0	0	0	0
9	303-1	Interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama	1	1	1	0	1	0
10	303-2	Manajemen dampak yang berkaitan dengan pembuangan air	0	0	0	0	0	0
11	303-3	Pengambilan air	0	0	0	1	0	1
12	303-4	Pembuangan air	0	0	0	1	0	0
13	303-5	Konsumsi air	0	0	0	1	0	0
14	304-1	Lokasi operasi yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung	0	0	0	0	0	0
15	304-2	Dampak signifikan dari kegiatan, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati	0	0	0	0	0	0
16	304-3	Habitat yang dilindungi atau direstorasi	0	0	0	0	0	0
17	304-4	Spesies Daftar Merah IUCN dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi	0	0	0	0	0	0
18	305-1	Emisi GRK (Cakupan 1) langsung	1	1	1	0	0	0

19	305-2	Emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung	1	1	1	1	1	1
20	305-3	Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya	0	0	0	0	0	0
21	305-4	Intensitas emisi GRK	0	0	1	1	1	1
22	305-5	Pengurangan emisi GRK	0	0	0	0	0	0
23	305-6	Emisi zat perusak ozon (ODS	0	0	0	0	0	0
24	305-7	Nitrogen oksida (NOX), sulfur oksida (SOX), dan emisi udara signifikan lainnya	0	0	0	0	0	0
25	306-1	Pelepasan air berdasarkan kualitas dan tujuan	0	1	1	1	1	1
26	306-2	Limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan	1	1	1	1	1	1
27	306-3	Tumpahan yang signifikan	0	0	1	0	0	0
28	306-4	Pengangkutan limbah berbahaya	0	0	0	0	0	0
29	306-5	Badan air yang dipengaruhi oleh pelepasan dan/atau limbah air	0	0	0	0	0	0
30	307-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup	1	1	1	0	0	1
31	308-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan	0	0	0	0	0	0
32	308-2	Dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil	0	0	0	0	0	0
GRI 400: Sosial								
1	401-1	Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan	0	1	1	1	1	1

2	401-2	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu	0	0	0	0	0	0
3	401-3	Cuti melahirkan	0	0	0	0	0	0
4	402-1	Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional	0	0	0	0	0	0
5	403-1	Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja	0	0	1	0	0	0
6	403-2	Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden	1	1	1	0	1	0
7	403-3	Layanan kesehatan kerja	0	0	1	1	0	0
8	403-4	Partisipasi, konsultasi, dan komunikasi pekerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja	0	0	1	1	0	0
9	403-5	Pelatihan bagi pekerja mengenai keselamatan dan kesehatan kerja	0	0	1	1	0	0
10	403-6	Peningkatan kualitas kesehatan pekerja	0	0	1	1	0	0
11	403-7	Pencegahan dan mitigasi dampak dari keselamatan dan kesehatan kerja yang secara langsung terkait hubungan bisnis	0	0	1	1	0	0
12	403-8	Pekerja yang tercakup dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja	0	0	0	1	0	0
13	403-9	Kecelakaan kerja	0	0	1	1	0	1
14	403-10	Penyakit akibat kerja	0	0		0	0	0

15	404-1	Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan	1	1	1	1	0	1
16	404-2	Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan	1	1	1	0	1	1
17	404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier	1	1	1	0	0	0
18	405-1	Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan	0	0	0	1	1	1
19	405-2	Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki	0	0	0	0	0	1
20	406-1	Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan	0	0	0	1	1	1
21	407-1	Operasi dan pemasok di mana hak atas kebebasan berseikat dan perundingan kolektif mungkin berisiko	0	0	0	0	0	0
22	408-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak	0	0	0	0	0	1
23	409-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja	0	0	0	0	0	1
24	410-1	Petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia	0	0	0	0	0	0
25	411-1	Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat	0	0	0	0	0	0
26	412-1	Operasi-operasi yang telah melewati tinjauan hak asasi manusia atau penilaian dampak	0	0	0	1	1	1

27	412-2	Pelatihan karyawan mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia	0	0	0	0	0	0
28	412-3	Perjanjian dan kontrak investasi signifikan yang memasukkan klausul-klausul hak asasi manusia atau yang telah melalui penyaringan hak asasi manusia	0	0	0	0	0	0
29	413-1	Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan	1	1	1	1	1	1
30	413-2	Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal	0	0	0	0	0	1
31	414-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial	0	0	0	0	0	0
32	414-2	Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil	0	0	0	0	0	0
33	415-1	Kontribusi Politik	0	0	0	0	0	0
34	416-1	Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa	0	0	0	0	0	0
35	416-2	Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa	0	0	0	0	0	0
36	417-1	Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa	0	0	0	1	1	1
37	417-2	Insiden ketidakpatuhan terkait informasi dan pelabelan produk dan jasa	1	1	1	0	0	1
38	417-3	Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran	0	0	0	0	0	0

39	418-1	Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan	0	0	0	0	0	0
40	419-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan di bidang sosial dan ekonomi	0	0	0	0	0	0
		Parameter Dipenuhi	55	56	65	64	56	63
		Total Parameter Standar GRI	145	145	145	145	145	145

NO	INDEKS	PENGUNGKAPAN	WIKA			WSBP		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	101	Landasan	1	1	1	1	1	1
2	102-1	Nama organisasi	1	1	1	1	1	1
3	102-2	Kegiatan, merek, produk, dan jasa	1	1	1	1	1	1
4	102-3	Lokasi kantor pusat	1	1	1	1	1	1
5	102-4	Lokasi operasi	1	1	1	1	1	1
6	102-5	Kepemilikan dan bentuk hukum	1	1	1	1	1	1
7	102-6	Pasar yang dilayani	1	1	1	1	1	1
8	102-7	Skala organisasi	1	1	1	1	1	1
9	102-8	Informasi mengenai karyawan dan pekerja lainnya	1	1	1	1	1	1
10	102-9	Rantai pasokan	1	1	1	1	1	1
11	102-10	Perubahan signifikan pada organisasi dan rantai pasokannya	1	1	1	1	1	1
12	102-11	Pendekatan atau Prinsip Pencegahan	1	1	1	1	1	1
13	102-12	Inisiatif Eksternal	1	1	1	1	1	1

14	102-13	Keanggotaan asosiasi	1	1	1	1	1	1
15	102-14	Pernyataan dari pembuat keputusan senior	1	1	1	1	1	1
16	102-15	Dampak penting, risiko, dan peluang	0	1	1	1	0	0
17	102-16	Nilai, prinsip, standar, dan norma perilaku	1	1	1	1	1	1
18	102-17	Mekanisme untuk saran dan masalah etika	0	1	1	1	0	0
19	102-18	Struktur tata kelola	1	1	1	1	1	1
20	102-19	Mendelegasikan wewenang	0	1	1	0	0	0
21	102-20	Tanggung jawab tingkat eksekutif untuk topik ekonomi, lingkungan, dan sosial	0	1	1	0	0	0
22	102-21	Berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan mengenai topik-topik ekonomi, lingkungan, dan sosial	0	1	1	0	0	0
23	102-22	Komposisi badan tata kelola tertinggi dan komitennya	0	1	1	0	0	0
24	102-23	Ketua badan tata kelola tertinggi	0	1	1	0	0	0
25	102-24	Menominasikan dan memilih badan tata kelola tertinggi	0	1	1	0	0	0
26	102-25	Konflik kepentingan	0	1	1	0	0	0
27	102-26	Peran badan tata kelola tertinggi dalam menetapkan tujuan, nilai-nilai, dan strategi	0	1	1	0	0	0
28	102-27	Pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi	0	1	1	0	0	0
29	102-28	Mengevaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi	0	1	1	0	0	0
30	102-29	Mengidentifikasi dan mengelola dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial	0	1	1	0	0	0
31	102-30	Keefektifan proses manajemen risiko	0	1	1	0	0	0
32	102-31	Pengkajian topik ekonomi, lingkungan, dan sosial	0	1	1	0	0	0

33	102-32	Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan	0	1	1	0	0	0
34	102-33	Mengomunikasikan hal-hal kritis	0	1	1	0	0	0
35	102-34	Sifat dan jumlah total hal-hal kritis	0	1	1	0	0	0
36	102-35	Kebijakan remunerasi	0	1	1	0	0	0
37	102-36	Proses untuk menentukan remunerasi	0	1	1	0	0	0
38	102-37	Keterlibatan para pemangku kepentingan dalam remunerasi	0	1	1	0	0	0
39	102-38	Rasio kompensasi total tahunan	0	1	1	0	0	0
40	102-39	Persentase kenaikan pada total rasio kompensasi total tahunan	0	1	1	0	0	0
41	102-40	Daftar kelompok pemangku kepentingan	1	1	1	1	1	1
42	102-41	Perjanjian perundingan kolektif	1	1	1	1	1	1
43	102-42	Mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan	1	1	1	1	1	1
44	102-43	Pendekatan untuk keterlibatan pemangku kepentingan	1	1	1	1	1	1
45	102-44	Topik utama dan hal-hal yang diajukan	1	1	1	1	1	1
46	102-45	Entitas yang termasuk dalam laporan keuangan dikonsolidasi	1	1	1	1	1	1
47	102-46	Menetapkan isi laporan dan Batasan topik	1	1	1	1	1	1
48	102-47	Daftar topik material	1	1	1	1	1	1
49	102-48	Penyajian kembali informasi	1	1	1	1	1	1
50	102-49	Perubahan dalam pelaporan	1	1	1	1	1	1
51	102-50	Periode pelaporan	1	1	1	1	1	1
52	102-51	Tanggal laporan terbaru	1	1	1	1	1	1

53	102-52	Siklus pelaporan	1	1	1	1	1	1
54	102-53	Titik kontak untuk pertanyaan mengenai laporan	1	1	1	1	1	1
55	102-54	Mengklaim pelaporan sesuai dengan Standar GRI	1	1	1	1	1	1
56	102-55	Indeks isi GRI	1	1	1	1	1	1
57	102-56	Assurance oleh pihak eksternal	1	1	1	1	1	1
58	103-1	Penjelasan topik material dan Batasannya	1	1	1	1	1	1
59	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	1	1	1	1	1	1
60	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	1	1	1	1	1	1
STANDAR TOPIK SPESIFIK								
GRI 200: Ekonomi								
1	201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan	1	1	1	1	1	1
2	201-2	Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim	1	1	1	0	0	0
3	201-3	Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya	1	1	1	1	1	1
4	201-4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah	1	1	1	0	0	0
5	202-1	Rasio standar upah karyawan entry-level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional	0	0	0	0	0	0
6	202-2	Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal	0	0	0	0	0	0
7	203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan	0	1	1	0	0	0
8	203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan	0	1	1	0	0	0

9	204-1	Proporsi pengeluaran untuk pemasok local	1	0	0	1	1	1
10	205-1	Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi	1	1	1	1	1	1
11	205-2	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi	1	1	1	0	0	0
12	205-3	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil	1	1	1	1	1	1
13	206-1	Langkah-langkah hukum untuk perilaku anti-persaingan, praktik anti-trust dan monopoli	0	0	0	1	1	1
GRI 300: Lingkungan								
1	301-1	Material yang digunakan berdasarkan berat atau volume	0	0	0	1	1	0
2	301-2	Material input dari daur ulang yang digunakan	0	0	0	0	0	0
3	301-3	Produk reclaimed dan material kemasannya	0	0	0	0	0	0
4	302-1	Konsumsi energi dalam organisasi	0	1	0	1	1	1
5	302-2	Konsumsi energi di luar organisasi	0	0	0	0	0	0
6	302-3	Intensitas energi	0	0	0	0	0	1
7	302-4	Pengurangan konsumsi energi	0	1	0	1	1	1
8	302-5	Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa	0	0	0	0	0	0
9	303-1	Interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama	0	0	0	1	1	1
10	303-2	Manajemen dampak yang berkaitan dengan pembuangan air	0	1	0	1	1	0
11	303-3	Pengambilan air	0	0	0	0	0	0
12	303-4	Pembuangan air	0	0	0	0	0	0

13	303-5	Konsumsi air	0	0	0	0	0	0
14	304-1	Lokasi operasi yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung	0	0	0	0	0	0
15	304-2	Dampak signifikan dari kegiatan, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati	0	0	0	0	0	0
16	304-3	Habitat yang dilindungi atau direstorasi	0	0	0	0	0	0
17	304-4	Spesies Daftar Merah IUCN dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi	0	0	0	0	0	0
18	305-1	Emisi GRK (Cakupan 1) langsung	0	1	0	0	0	1
19	305-2	Emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung	0	0	0	0	0	0
20	305-3	Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya	0	0	0	0	0	0
21	305-4	Intensitas emisi GRK	0	0	0	0	0	1
22	305-5	Pengurangan emisi GRK	0	1	0	0	0	1
23	305-6	Emisi zat perusak ozon (ODS	0	0	0	0	0	0
24	305-7	Nitrogen oksida (NOX), sulfur oksida (SOX), dan emisi udara signifikan lainnya	0	1	0	0	0	0
25	306-1	Pelepasan air berdasarkan kualitas dan tujuan	0	0	0	0	0	0
26	306-2	Limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan	0	0	0	0	0	1
27	306-3	Tumpahan yang signifikan	0	0	0	0	0	1
28	306-4	Pengangkutan limbah berbahaya	0	0	0	1	1	0

29	306-5	Badan air yang dipengaruhi oleh pelepasan dan/atau limbah air	0	0	0	0	0	0
30	307-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup	0	1	1	0	0	0
31	308-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan	0	0	0	1	1	0
32	308-2	Dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil	0	0	0	0	0	0
GRI 400: Sosial								
1	401-1	Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan	0	1	1	1	1	1
2	401-2	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu	0	1	1	1	1	1
3	401-3	Cuti melahirkan	0	1	1	1	1	0
4	402-1	Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional	0	0	0	0	0	0
5	403-1	Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja	1	1	1	1	1	0
6	403-2	Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden	1	1	1	1	1	1
7	403-3	Layanan kesehatan kerja	1	1	1	1	1	0
8	403-4	Partisipasi, konsultasi, dan komunikasi pekerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja	1	1	1	1	1	0

9	403-5	Pelatihan bagi pekerja mengenai keselamatan dan kesehatan kerja	1	1	1	0	0	0
10	403-6	Peningkatan kualitas kesehatan pekerja	1	1	1	0	0	0
11	403-7	Pencegahan dan mitigasi dampak dari keselamatan dan kesehatan kerja yang secara langsung terkait hubungan bisnis	1	1	1	0	0	0
12	403-8	Pekerja yang tercakup dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja	1	1	1	0	0	0
13	403-9	Kecelakaan kerja	1	1	1	0	0	0
14	403-10	Penyakit akibat kerja	1	1	1	0	0	0
15	404-1	Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan	1	1	1	1	1	0
16	404-2	Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan	1	1	1	1	1	1
17	404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier	1	1	1	1	1	1
18	405-1	Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan	0	1	1	0	0	0
19	405-2	Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki	0	1	1	0	0	0
20	406-1	Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan	0	0	0	0	0	0
21	407-1	Operasi dan pemasok di mana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin berisiko	0	0	0	0	0	0

22	408-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak	0	0	0	0	0	0
23	409-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja	0	0	0	0	0	0
24	410-1	Petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia	0	0	0	0	0	0
25	411-1	Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat	0	0	0	0	0	0
26	412-1	Operasi-operasi yang telah melewati tinjauan hak asasi manusia atau penilaian dampak	0	0	0	0	0	0
27	412-2	Pelatihan karyawan mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia	0	0	0	0	0	0
28	412-3	Perjanjian dan kontrak investasi signifikan yang memasukkan klausul-klausul hak asasi manusia atau yang telah melalui penyaringan hak asasi manusia	0	0	0	0	0	0
29	413-1	Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan	0	0	0	0	0	0
30	413-2	Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal	0	0	0	0	0	0
31	414-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial	0	0	0	0	0	0
32	414-2	Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil	0	0	0	0	0	0

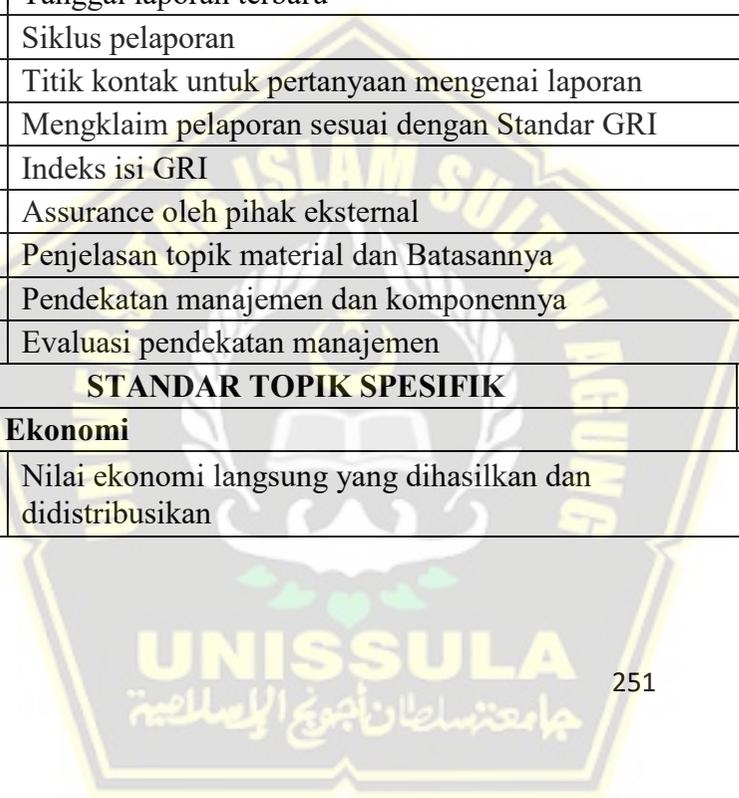
33	415-1	Kontribusi Politik	0	0	0	0	0	0
34	416-1	Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa	0	1	1	1	1	0
35	416-2	Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa	0	1	1	1	1	0
36	417-1	Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa	0	0	0	1	1	0
37	417-2	Insiden ketidakpatuhan terkait informasi dan pelabelan produk dan jasa	0	0	0	1	1	0
38	417-3	Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran	0	0	0	1	1	0
39	418-1	Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan	0	0	0	1	1	0
40	419-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan di bidang sosial dan ekonomi	0	0	0	0	0	0
		Parameter Dipenuhi	58	96	90	68	66	57
		Total Parameter Standar GRI	145	145	145	145	145	145

NO	INDEKS	PENGUNGKAPAN	WSKT			WTON		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	101	Landasan	1	1	1	1	1	1
2	102-1	Nama organisasi	1	1	1	1	1	1
3	102-2	Kegiatan, merek, produk, dan jasa	1	1	1	1	1	1
4	102-3	Lokasi kantor pusat	1	1	1	1	1	1

5	102-4	Lokasi operasi	1	1	1	1	1	1
6	102-5	Kepemilikan dan bentuk hukum	1	1	1	1	1	1
7	102-6	Pasar yang dilayani	1	1	1	1	1	1
8	102-7	Skala organisasi	1	1	1	1	1	1
9	102-8	Informasi mengenai karyawan dan pekerja lainnya	1	1	1	1	1	1
10	102-9	Rantai pasokan	1	1	1	1	1	1
11	102-10	Perubahan signifikan pada organisasi dan rantai pasokannya	1	1	1	1	1	1
12	102-11	Pendekatan atau Prinsip Pencegahan	1	1	1	1	1	1
13	102-12	Inisiatif Eksternal	1	1	1	1	1	1
14	102-13	Keanggotaan asosiasi	1	1	1	1	1	1
15	102-14	Pernyataan dari pembuat keputusan senior	1	1	1	1	1	1
16	102-15	Dampak penting, risiko, dan peluang	1	0	1	0	0	1
17	102-16	Nilai, prinsip, standar, dan norma perilaku	1	1	1	1	1	1
18	102-17	Mekanisme untuk saran dan masalah etika	1	0	1	0	0	0
19	102-18	Struktur tata kelola	1	1	1	1	1	1
20	102-19	Mendelegasikan wewenang	1	0	0	0	0	0
21	102-20	Tanggung jawab tingkat eksekutif untuk topik ekonomi, lingkungan, dan sosial	1	0	0	0	0	0
22	102-21	Berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan mengenai topik-topik ekonomi, lingkungan, dan sosial	1	0	0	0	0	0
23	102-22	Komposisi badan tata kelola tertinggi dan komitennya	1	0	1	0	0	0
24	102-23	Ketua badan tata kelola tertinggi	1	0	1	0	0	0

25	102-24	Menominasikan dan memilih badan tata kelola tertinggi	1	0	1	0	0	0
26	102-25	Konflik kepentingan	1	0	1	0	0	0
27	102-26	Peran badan tata kelola tertinggi dalam menetapkan tujuan, nilai-nilai, dan strategi	1	0	0	0	0	0
28	102-27	Pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi	1	0	1	0	0	0
29	102-28	Mengevaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi	1	0	1	0	0	0
30	102-29	Mengidentifikasi dan mengelola dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial	1	0	1	0	0	0
31	102-30	Keefektifan proses manajemen risiko	1	0	1	0	0	0
32	102-31	Pengkajian topik ekonomi, lingkungan, dan sosial	1	0	0	0	0	0
33	102-32	Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan	1	0	0	0	0	0
34	102-33	Mengomunikasikan hal-hal kritis	1	0	0	0	0	0
35	102-34	Sifat dan jumlah total hal-hal kritis	1	0	0	0	0	0
36	102-35	Kebijakan remunerasi	1	0	0	0	0	0
37	102-36	Proses untuk menentukan remunerasi	1	0	0	0	0	0
38	102-37	Keterlibatan para pemangku kepentingan dalam remunerasi	1	0	0	0	0	0
39	102-38	Rasio kompensasi total tahunan	1	0	0	0	0	0
40	102-39	Persentase kenaikan pada total rasio kompensasi total tahunan	1	0	0	0	0	0
41	102-40	Daftar kelompok pemangku kepentingan	1	1	1	1	1	1
42	102-41	Perjanjian perundingan kolektif	1	1	1	1	1	1

43	102-42	Mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan	1	1	1	1	1	1
44	102-43	Pendekatan untuk keterlibatan pemangku kepentingan	1	1	1	1	1	1
45	102-44	Topik utama dan hal-hal yang diajukan	1	1	1	1	1	1
46	102-45	Entitas yang termasuk dalam laporan keuangan dikonsolidasi	1	1	1	1	1	1
47	102-46	Menetapkan isi laporan dan Batasan topik	1	1	1	1	1	1
48	102-47	Daftar topik material	1	1	1	1	1	1
49	102-48	Penyajian kembali informasi	1	1	1	1	1	1
50	102-49	Perubahan dalam pelaporan	1	1	1	1	1	1
51	102-50	Periode pelaporan	1	1	1	1	1	1
52	102-51	Tanggal laporan terbaru	1	1	1	1	1	1
53	102-52	Siklus pelaporan	1	1	1	1	1	1
54	102-53	Titik kontak untuk pertanyaan mengenai laporan	1	1	1	1	1	1
55	102-54	Mengklaim pelaporan sesuai dengan Standar GRI	1	1	1	1	1	1
56	102-55	Indeks isi GRI	1	1	1	1	1	1
57	102-56	Assurance oleh pihak eksternal	1	1	1	1	1	1
58	103-1	Penjelasan topik material dan Batasannya	1	1	1	1	1	1
59	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	1	1	1	1	1	1
60	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	1	1	1	1	1	1
STANDAR TOPIK SPESIFIK								
GRI 200: Ekonomi								
1	201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan	1	1	1	1	1	1



2	201-2	Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim	1	0	1	0	1	1
3	201-3	Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya	1	1	1	1	1	1
4	201-4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah	1	0	0	1	1	1
5	202-1	Rasio standar upah karyawan entry-level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional	1	0	1	0	0	0
6	202-2	Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal	1	0	0	0	0	0
7	203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan	1	0	1	0	0	0
8	203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan	1	0	1	0	0	0
9	204-1	Proporsi pengeluaran untuk pemasok local	1	1	1	1	1	1
10	205-1	Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi	1	1	1	0	0	0
11	205-2	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi	1	0	1	0	0	0
12	205-3	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil	1	1	1	0	0	0
13	206-1	Langkah-langkah hukum untuk perilaku anti-persaingan, praktik anti-trust dan monopoli	1	1	1	0	0	0
GRI 300: Lingkungan								
1	301-1	Material yang digunakan berdasarkan berat atau volume	0	1	0	1	1	1
2	301-2	Material input dari daur ulang yang digunakan	1	0	1	0	1	1

3	301-3	Produk reclaimed dan material kemasannya	0	0	0	0	0	0
4	302-1	Konsumsi energi dalam organisasi	1	1	0	1	0	0
5	302-2	Konsumsi energi di luar organisasi	1	0	0	0	0	0
6	302-3	Intensitas energi	1	0	0	1	0	0
7	302-4	Pengurangan konsumsi energi	1	1	1	1	0	0
8	302-5	Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa	1	0	1	0	0	0
9	303-1	Interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama	1	1	0	0	0	0
10	303-2	Manajemen dampak yang berkaitan dengan pembuangan air	1	1	0	0	0	0
11	303-3	Pengambilan air	1	0	1	0	0	0
12	303-4	Pembuangan air	0	0		0	0	0
13	303-5	Konsumsi air	0	0	0	0	0	0
14	304-1	Lokasi operasi yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung	1	0	0	0	0	0
15	304-2	Dampak signifikan dari kegiatan, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati	1	0	1	0	0	0
16	304-3	Habitat yang dilindungi atau direstorasi	1	0	0	0	0	0
17	304-4	Spesies Daftar Merah IUCN dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi	1	0	0	0	0	0
18	305-1	Emisi GRK (Cakupan 1) langsung	1	0	1	0	0	0

19	305-2	Emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung	1	0	0	0	0	0
20	305-3	Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya	1	0	0	0	0	0
21	305-4	Intensitas emisi GRK	1	0	0	0	0	0
22	305-5	Pengurangan emisi GRK	1	0	1	0	0	0
23	305-6	Emisi zat perusak ozon (ODS	1	0	1	0	0	0
24	305-7	Nitrogen oksida (NOX), sulfur oksida (SOX), dan emisi udara signifikan lainnya	1	0	1	0	0	0
25	306-1	Pelepasan air berdasarkan kualitas dan tujuan	1	0	0	0	1	1
26	306-2	Limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan	1	0	0	0	1	1
27	306-3	Tumpahan yang signifikan	1	0	0	0	1	1
28	306-4	Pengangkutan limbah berbahaya	1	1	1	0	1	1
29	306-5	Badan air yang dipengaruhi oleh pelepasan dan/atau limbah air	1	0	0	0	1	1
30	307-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup	1	0	1	0	1	1
31	308-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan	0	1	1	0	0	0
32	308-2	Dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil	0	0	0	0	0	0
GRI 400: Sosial								
1	401-1	Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan	1	1	1	0	0	0

2	401-2	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu	1	1	0	0	0	0
3	401-3	Cuti melahirkan	1	1	0	0	0	0
4	402-1	Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional	1	0	0	0	0	0
5	403-1	Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja	1	1	0	1	1	1
6	403-2	Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden	1	1	1	1	1	1
7	403-3	Layanan kesehatan kerja	1	1	0	1	1	1
8	403-4	Partisipasi, konsultasi, dan komunikasi pekerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja	1	1	1	0	1	1
9	403-5	Pelatihan bagi pekerja mengenai keselamatan dan kesehatan kerja	1	0	0	0	1	1
10	403-6	Peningkatan kualitas kesehatan pekerja	1	0	0	1	1	1
11	403-7	Pencegahan dan mitigasi dampak dari keselamatan dan kesehatan kerja yang secara langsung terkait hubungan bisnis	1	0	0	1	1	1
12	403-8	Pekerja yang tercakup dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja	1	0	0	1	1	1
13	403-9	Kecelakaan kerja	1	0	0	1	1	1
14	403-10	Penyakit akibat kerja	1	0	0	0	0	
15	404-1	Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan	1	1	1	1	1	1

16	404-2	Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan	1	1	1	1	1	1
17	404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier	1	1	1	1	1	1
18	405-1	Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan	1	0	1	0	0	0
19	405-2	Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki	1	0	1	0	0	0
20	406-1	Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan	1	0	1	0	0	0
21	407-1	Operasi dan pemasok di mana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin berisiko	1	0	1	0	0	0
22	408-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak	1	0	1	0	0	0
23	409-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja	1	0	1	0	0	0
24	410-1	Petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia	1	0	0	0	0	0
25	411-1	Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat	1	0	0	0	0	0
26	412-1	Operasi-operasi yang telah melewati tinjauan hak asasi manusia atau penilaian dampak	1	0	0	0	0	0
27	412-2	Pelatihan karyawan mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia	1	0	0	0	0	0

28	412-3	Perjanjian dan kontrak investasi signifikan yang memasukkan klausul-klausul hak asasi manusia atau yang telah melalui penyaringan hak asasi manusia	1	0	0	0	0	0
29	413-1	Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan	1	0	1	0	0	0
30	413-2	Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal	1	0	0	0	0	0
31	414-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial	1	0	0	0	0	0
32	414-2	Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil	1	0	0	0	0	0
33	415-1	Kontribusi Politik	1	0	0	0	0	0
34	416-1	Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa	1	1	1	0	0	0
35	416-2	Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa	1	1	0	0	0	0
36	417-1	Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa	1	1	0	0	0	0
37	417-2	Insiden ketidakpatuhan terkait informasi dan pelabelan produk dan jasa	1	1	0	0	0	0
38	417-3	Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran	1	1	0	0	0	0
39	418-1	Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan	1	1	0	0	0	0

40	419-1	Ketidapatuhan terhadap undang-undang dan peraturan di bidang sosial dan ekonomi	1	0	0	0	0	0
		Parameter Dipenuhi	139	66	84	55	62	63
		Total Parameter Standar GRI	145	145	145	145	145	145



